

Swantara

Majalah Triwulanan Lemhannas RI No. 02 TAHUN I/Agustus 2012

Opini

Ibnu Wahyudi

Masih Adakah Kebanggaan Terhadap Bahasa Indonesia

Mudrajad Kuncoro

Pasca 67 Tahun Merdeka, Menuju Kebangkitan Ekonomi Indonesia

Timotius Harsono

Krisis Ketahanan Ekonomi dan Nasionalisme

Parni Hadi

Nasionalisme dan Media Massa Kita

Adrianus Meliala

Kekerasan dan Nasionalisme



67 TAHUN NKRI

QUO VADIS NASIONALISME

ISSN 2252-9659



9 772252 965856

**Pelindung**

Budi Susilo Soepandji

Pembina

Moeldoko

Pengarah

Chandra Manan Mangan

Penasehat

Syahrul Ansory

Herry Haryanto

Santoso

Kontributor Ahli

Dadan Umar Daihani, Timotius Harsono

Rosita S. Noor, Miyasto, Leonardi

Pemimpin Redaksi

Sahat Aritonang

Redaktur Pelaksana

E. Estu Prabowo

Editor

Nanang Sunarto

Staf redaksi

Megawarni Simamora, GT. Situmorang,

Adma Bastari, B. Iman Aryanto, Endah Heliana,

Trias Noverdi

Koordinator Fotografer

Ariyanto

Fotografer

Suryadi, Syafrizal

Grafis

Budi Pasopati

(PT. Yellow Multi Media)

Pemimpin Administrasi

Sumurung

Staf Administrasi

Linda Purnamasari, Gatot

Sirkulasi

Supriyono

Konsultan Media

Eddy Soepadmo

Alamat Redaksi

Gedung Lemhannas RI

Jl. Medan Merdeka Selatan No.10 Jakarta

Telp. (021) 3832108, 3832105**Fax** (021)-34551926**Email** : humas.lemhannasri@gmail.com**Website** : www.lemhannas.go.id**Dicetak oleh** : PT. Yellow Multi Media

Isi diluar tanggung jawab percetakan

Swantara menerima artikel dan opini dari luar Lemhannas RI dan akan dimuat apabila sesuai dengan kebijakan redaksi

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, di tengah sukacita peringatan HUT ke-67 Proklamasi Kemerdekaan RI, majalah triwulan SWANTARA edisi kedua terbit menghampiri para pembaca budiman.

Redaksi sengaja mengangkat isu nasionalisme pada laporan utamanya pada saat segenap komponen bangsa di seluruh tanah air memerahputihkan bulan ini.

Betapa tidak, meski belum mencapai tingkat ideal, mayoritas anak bangsa telah mengenyam pendidikan, layanan kesehatan, kemajuan ekonomi, akses komunikasi dan informasi, eksistensi sosial budaya maupun partisipasi politik secara signifikan. Berkat perjuangan dan pengorbanan para pendahulu kita - sebagian dari mereka tidak dikenal, tanpa nama, apalagi tanda jasa - telah terbentuk nasionalisme Indonesia.

Semangat nasionalisme harus tetap bergelora di hati sanubari, dan segenap komponen bangsa harus merasa tertantang, menghadapi berbagai halang rintang, persoalan dan permasalahan bangsa yang menghadang.

Gubernur Lemhannas RI, Prof. Ir. Budi Soesilo Supandji, DEA menyebutkan sebagai contoh, berlangsungnya praktek korupsi, jika terus dibiarkan, bisa menjadi ancaman terhadap keutuhan bangsa, belum lagi maraknya aksi-aksi kekerasan, anarkis dan sikap intoleran yang menurut penilaian para narasumber bisa memupuskan semangat nasionalisme.

Pandangan dan penilaian akademisi, birokrat, budayawan dan para pakar menyangkut nasionalisme diharapkan akan membuka cakrawala wawasan dan menjadi pemantik bagi kita untuk memetakan persoalan, sebagai pencerahan dan pada gilirannya menginspirasi gagasan cerdas bagi pencarian solusinya.

Rubrik-rubrik lainnya seperti opini, sosok, surat pembaca, suara peserta dan alumni Lemhannas kami harapkan pula akan menginspirasi dan merupakan tambahan informasi bagi pembaca.

Dirgahayu HUT Kemerdekaan RI ke-67, semoga Tuhan YME melimpahkan karunia dan rahmatNya bagi pemimpin dan segenap rakyat Indonesia, segenap jajaran redaksi tidak lupa pula mengucapkan selamat Idul Fitri 1433 H bagi yang merayakannya.

Selamat Membaca.

Salam,

Sahat Aritonang
Pemimpin Redaksi

Surat Pembaca



Pendidikan Nasionalisme Dimulai dari Keluarga

Jakarta, (Swantara) – Siti Musdah Mulia menilai, aksi-aksi kekerasan yang dilakukan dengan mengatasnamakan agama, kelompok atau primordialisme terjadi karena lemahnya pendidikan dan pemahaman mengenai wawasan kebangsaan. “Pendidikan mengenai nasionalisme hendaknya tidak dibatasi oleh pendidikan formal tetapi dimulai dari keluarga,” ujarnya seraya menambahkan “Kita juga harus menanamkan rasa toleransi dan memberikan apresiasi kepada suku atau agama apapun, dan hal ini harus dimulai dari tingkat keluarga”

Siti Musdah mengungkapkan kekecewaannya, betapa mudahnya orang-orang terutama pemuda tersulut untuk melakukan aksi kekerasan. Sebenarnya aksi-aksi kekerasan dilatarbelakangi sentimen agama, kesukuan atau kelompok yang marak terjadi belakangan ini bisa diatasi dengan mempertebal rasa kebangsaan, mulai dari kelompok terkecil masyarakat yakni keluarga.

Dalam keluarga, tuturnya, orang tua bisa memberikan pemahaman kepada anaknya betapa besar dan pluralnya bangsa Indonesia. Bagaimana kita menghargai suku, sekte atau agama serta budaya lain sebagai bangsa Indonesia, jadi tidak ada rasa minoritas atau mayoritas sekecil apapun.

Menurut Siti Musdah, mereka yang melakukan tindak kekerasan adalah penghianat bangsa. Mengapa? Karena tindak kekerasan bertentangan dengan nilai-nilai agama, bertentangan dengan Pancasila dan hukum negara Indonesia. Jika para pelaku kekerasan mengaku sebagai bangsa Indonesia, ia tidak boleh keluar dari koridor Pancasila, karena itu adalah pilihan dari pendiri bangsa ini.

Namun demikian Siti Musdah mengakui, kekerasan adalah eksekusi yang terjadi akibat ketidakadilan. Pada akhirnya, menurut dia, sila kelima Pancasila “Keadilan Bagi Seluruh Rakyat Indonesia” harus diuji, karena kelompok tertentu, misalnya kelompok separatis, ia merasa berhak melakukan kekerasan karena merasakan ketidakadilan dan menganggap dirinya bukan bagian dari Indonesia. Tentu saja, protes tidak harus dilakukan dengan cara seperti itu karena aksi separatisme dengan kekerasan adalah tindakan inkonstitusional.

“Sebaliknya, negara harus menjamin agar rasa adil dirasakan oleh segenap komponen bangsa dan memberikan jaminan pendidikan bagi seluruh penduduk,” katanya menambahkan.[EH]

SITI MUSDAH MULIA



Nasionalisme Digalakkan Sebagai Unfinished Project

Jakarta, (Swantara) – Anggota DPR Komisi VIII, Prof. Dr. Ali MACHSAN MUSA menilai, nasionalisme Indonesia adalah *unfinished project* atau *project* yang tidak pernah selesai, sementara rasa kebangsaan mengandung makna, menderita, bersusah-susah atau bersenang-senang bersama-sama.

Mengutip ungkapan Joseph Ernest Renan dan JP Andersen, Ali MACHSAN menyebutkan bahwa suatu bangsa dimaknai sebagai *‘imagined political community’* atau komunitas politik yang dibayangkan. Dalam perjalanan sejarah, rakyat Indonesia bersatu karena memiliki kesamaan cita-cita untuk merdeka karena merasakan penderitaan bersama saat dijajah Belanda.

Dulu kita membayangkan, Indonesia akan lebih baik setelah penjajah hengkang, namun ternyata sampai saat ini kemerdekaan hanya dirasakan oleh kelompok tertentu, sementara yang lain tidak merasakannya (dari sisi kesejahteraan), akibat terjadinya ketimpangan ekonomi dan sering absennya keadilan.

“Saya berpendapat, nasionalisme harus terus digalakkan sebagai *unfinished project* atau proyek yang tidak akan pernah selesai,” ujarnya. Untuk itu ia berharap agar pemerintah termasuk Lemhannas bersama dengan komponen bangsa lainnya untuk memberikan pemahaman tentang makna nasionalisme, proklamasi dan kepahlawanan yang telah dilupakan oleh sebagian generasi muda.

“Nasionalisme harus mengacu pada sikap kewarganegaraan (*citizenship*) menyangkut pemenuhan hak-hak dasar rakyat misalnya tentang keadilan, kesejahteraan, layanan kesehatan dan pendidikan,” katanya.[EH/NS]

Prof. Dr. H. ALI MACHSAN MUSA (Anggota Komisi VIII DPR-RI)



Peningkatan Kapasitas SDM Lemhannas RI

Jakarta, (Swantara) – Lemhannas RI memiliki cita-cita menjadi lembaga berkelas dunia (*world class institution*). Dalam acara *coffee morning*, pada tanggal 9 November 2011, Gubernur Lemhannas RI telah memaparkan bahwa bidang pendidikan dan pengkajian di Lemhannas RI pada tahun 2015 s.d 2025 ditargetkan akan menjadi rujukan mulai dari tingkat regional sampai pada tingkat internasional.

Salah satu komponen yang dapat menunjang terwujudnya cita-cita tersebut, adalah peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) lembaga. Personel di Lemhannas harus dipersiapkan dengan maksimal, sehingga mampu memiliki berbagai keterampilan dan kompetensi sesuai bidang keahlian masing-masing personel dan dapat mendukung terlaksananya Lemhannas menjadi *world class institution*.

Saya berharap, lembaga dapat memberikan fasilitas kepada para personel untuk diberikan pelatihan-pelatihan yang mendukung upaya Lemhannas RI menuju *world class institution*. Salah satu di antaranya adalah peningkatan kualitas bahasa asing, terutama bahasa Inggris. Seperti yang kita ketahui bersama, bahasa Inggris merupakan bahasa yang dipergunakan dalam dunia internasional. Kemampuan berbahasa Inggris pada personel Lemhannas RI diperlukan agar komunikasi multi-bahasa dapat berjalan secara efektif dan efisien. Dengan demikian, kualitas personel Lemhannas RI dalam keahlian komunikasi serta pemahaman terhadap bahasa Inggris, terutama dalam bidang kajian dan pendidikan meningkat. Hal tersebut pada akhirnya akan dapat menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi lembaga.[EH/NS]

ADITYA SOLEHA

Daftar Isi

Opini

- 4 Masih Adakah Kebanggaan Terhadap Bahasa Indonesia?
- 49 Nasionalisme & Media Massa Kita
- 66 Kekerasan dan Nasionalisme

Laporan Utama

- 6 Quo Vadis Nasionalisme
- 13 17 Agustus Merdeka dari Korupsi
- 17 Dialog Bukan Barang Baru Bagi Masyarakat Papua
- 19 Nasionalisme Indonesia Hanya Retorika?
- 22 Nilai-Nilai Murni Kebangsaan Tidak Boleh Bergeser
- 24 Penegakan Hukum dan HAM Perdebatan Nasionalisme
- 28 Aksi Kekerasan Bisa Kikis Nasionalisme

Suara Peserta

- 32 Nasionalisme Harga Mati
- 34 Nasionalisme Bangsa Indonesia Masih Tebal dan Solid

Hot Issue

- 40 Siapapun Gubernurnya Warga DKI Butuh Pemimpin Amanah
- 44 Kepemimpinan Kim Jong Un Masih Kuat
- 46 Secerch Harapan Bagi Warga Rohingya
- 54 Bashar Al-Assad Bertahan... Sampai Kapan?
- 56 Tempe Bisa Picu Gejolak Sosial, Lho!

Profil

- 62 Letjen Moeldoko, MSi: "Autopoiesis" Seorang Prajurit Sejati Supriyatno Bekerja Dengan Setia dan Penuh Tanggungjawab
- 80 Supriyatno: Bekerja Dengan Setia dan Penuh Tanggungjawab

Sosok

- 67 Hanna Fransisca (Zhu Yong Xia) Nasionalisme dan Kebebasan Berkarya

Suara Alumni

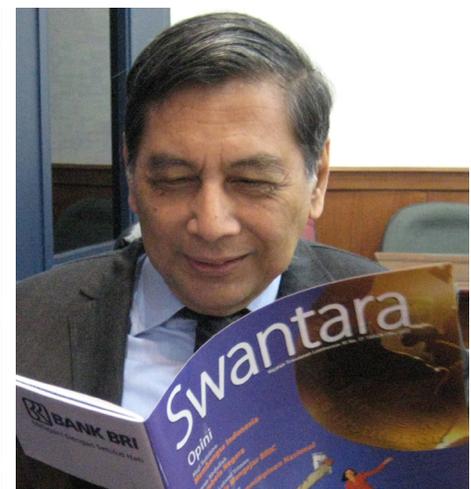
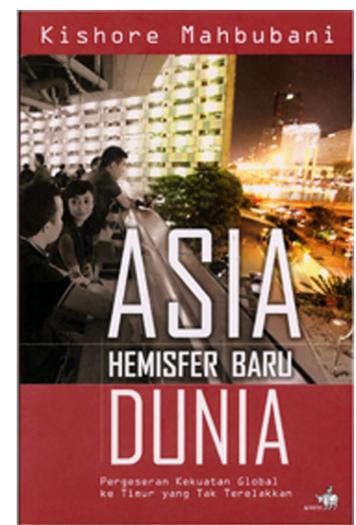
- 69 Kerjasama Pemerintah Pusat dan Daerah untuk Peningkatan Kesejahteraan
- 70 Nasionalisme Berbasis Pasar
- 71 Alumni Kursus Singkat Khusus Angkatan Pertama
- 72 Bangsa Sebagai Rumah Tangga

Seputar Kita

- 78 Lemhannas RI Pacu Reformasi Birokrasi di Semua Lini

Agenda

- 84 Kegiatan Penting Lemhannas RI Agustus – Oktober 2012



Masih Adakah Kebanggaan Terhadap Bahasa Indonesia?

Oleh : Ibnu Wahyudi



Dalam diskusi kebahasaan yang diselenggarakan oleh FBMM (Forum Bahasa Media Massa) bekerja sama dengan Kompas, bertempat di Bentara Budaya Jakarta, 29 Juni lalu, Taufiq Ismail kembali mengungkit “penjajahan bahasa Amerika” dalam praktik berbahasa di negeri ini. Keprihatinan penyajak yang berlatarkan pendidikan kedokteran hewan ini, bukan baru kali ini saja; telah berulang ia menyuarakannya. Melalui “Catatan Kebudayaan” dalam majalah Horison terbitan Desember 2010, misalnya, pernyataan serupa telah ia paparkan, utamanya berkenaan dengan banyak dipakainya nama acara atau tajuk berita yang memakai bahasa Inggris.

Muara dari banyak dan kuatnya kecenderungan memakai bahasa asing—khususnya bahasa Inggris— adalah pada mentalitas sebagian besar bangsa ini yang menganggap segala sesuatu dari luar lebih bergaya, lebih hebat,

lebih bergensi dan lebih modern. Dalam ungkapan Taufiq Ismail, perilaku semacam itu menyiratkan rasa ‘*minder*’, rendahdiri, udik serta kampungan (Kompas, 30/6/2012).

Barangkali dugaan atau simpulan pengelola Rumah Puisi ini tidak sepenuhnya dapat diterima oleh khalayak ramai, namun kenyataan sehari-hari agaknya memang tidak mungkin memungkiri hal itu. Di pelbagai tempat, di mana saja di tanah air kita ini, dengan mudah dapat dijumpai pemakaian kata-kata asing, baik untuk sesuatu yang memang bernuansa mancanegara maupun untuk hal yang sangat mengindonesia.

Keblinger

Dipakainya nama seperti San Diego Hills untuk area permakaman mewah sampai dipilihnya kata “imej” dalam sejumlah tulisan di sejumlah koran dan tabloid, merupakan penanda bahwa telah terjadi semacam kesesatan dalam berpikir—atau keblingeran— pada banyak orang Indonesia. Pada contoh pertama, mengenai nama permakaman tersebut, sesungguhnya memang hak pemilik atau pengelola area tersebut dalam kaitan memberi nama. Sangat mungkin, dipakainya nama yang sungguh “amerika” itu dilandasi oleh sejumlah alasan, yang boleh jadi salah satunya berkenaan dengan kehendak untuk menyulap suatu tempat yang terbungkalai menjadi suatu daerah yang bercitra mewah. Akan tetapi, jika memang demikian halnya, telah diletakkan di mana dimensi

kenasionalan atau rasa bangga terhadap khazanah budaya sendiri?

Demikian pula pada contoh kedua, dengan menuliskan kata sebagaimana ucapannya, yaitu “imej”, dan penulisan ini muncul pada sejumlah media massa cetak, aturan atau ketentuan berbahasa mana yang dipakai sebagai landasan? Sebab, jika kata itu dimaksudkan sebagai pengindonesiaan dari kata image, sesuai kaidah dalam Pengindonesiaan Kata dan Istilah Asing, penulisan kata itu seharusnya menjadi “imaji”. (Bahwa dalam praktik berbahasa-tulis sehari-hari lebih dipilih “imaji” alih-alih “imaji” ini, soalnya lebih kepada tidak taat asasnya sebagian kita pada kaidah yang telah ditetapkan). Atau, penulisan “imej” yang sangat “malaysia” itu memang dipinjam dari tatatulis negeri jiran tersebut? Oh, alangkah nistanya bangsa ini!

Akan tetapi, jika ketidaktepatan dalam penulisan terjadi di ranah keseharian dan tidak berkenaan langsung dengan dunia formal, tentu masih dapat dimaklumi dengan baik. Sebagai misal, apabila di pinggir-pinggir jalan kita menjumpai penulisan seperti “tambal band”, “dikontratkun”, “over hole”, “servic”, “fhotto cppy”, “under wer”, “sop drink”, “mijon”, “fred ciken”, “sok breker”, atau “fesel”, yang muncul dalam benak kita tentu bukan sepenuhnya rasa kesal melainkan malahan suatu rasa bernuansa jenaka mengingat bahwa “kesalahan” itu bukan sesuatu yang disengaja dan umumnya memang bertolak dari semata kehendak

ingin berkomunikasi. Kenyataan ini tentu berbeda dengan penulisan atau penamaan untuk nama kawasan, kompleks perbelanjaan, atau juga rambu-rambu lalu lintas yang tentu berkenaan dengan masalah kebakuan dan berkaitan dengan keformalan karena menyangkut ranah umum.

Namun kenyataan di lapangan sungguh tidak memberi contoh yang baik. Aturan dalam berlalu lintas beberapa tahun belakangan ini, misalnya, justru banyak menggunakan kata atau ungkapan asing seperti *"three-in-one"*, *"green way"*, atau *"contra flow"* yang belum tentu dipahami dengan baik oleh para pengguna jalan dan jangan-jangan oleh para aparat itu sendiri. Rambu yang berbahasa Indonesia sendiri pun menunjukkan ketidakajegan, seperti metamorfosis dari "Belok Kiri Boleh Langsung" menjadi "Belok Kiri Langsung" dan ada juga yang "Belok Kiri Jalan Terus", yang secara tidak langsung menunjukkan kegamangan kita dalam berbahasa.

Peran Badan Bahasa

Pernah terjadinya perubahan nama dari Pondok Indah Mall (PIM) menjadi Mal Pondok Indah (MPI) atau Mulia Tower menjadi Menara Mulia, misalnya, yang menunjukkan bukan semata telah munculnya kesadaran berbahasa Indonesia dengan baik namun juga mengisyaratkan adanya campur tangan pihak lain. (Ini hanya dugaan semata sebab terus terang saja saya tidak mempunyai data akurat saat menuliskan hal ini). Jika benar bahwa memang ada pihak yang telah turut campur atau pihak yang memang berhak campur tangan dalam ihwal menetapkan nama atau penulisan dengan kaidah yang tepat, sebagaimana telah terjadi pada kedua nama tersebut, tentu langkah ini merupakan langkah yang baik.

Banyak dan maraknya



pemakaian kata asing yang tidak semata-mata dilandasi oleh ketepatan pemakaian namun hanya dilandasi oleh suatu sikap kerdil dan rendah diri yang sangat tidak beralasan, perlu memperoleh semacam "pembinaan" yang sifatnya memang tidak harus preskriptif. Dalam kaitan dengan masalah "pembinaan" ini, sudah banyak dimafhumi bahwa hal ini tidak secara khusus menjadi wewenang suatu lembaga atau badan, melainkan juga dapat melalui contoh yang ditunjukkan oleh para pejabat atau siapa saja yang sering tampil di depan khalayak, istimewanya melalui media elektronik dan tercetak. Kata "event" yang pernah sangat deras dipakai—dengan tingkat salah ucap maupun salah makna yang memprihatinkan—adalah contoh betapa ucapan petinggi negeri atau para anggota legislatif di negeri ini telah secara tidak langsung "membina" suatu pemakaian kata, yang sayangnya dalam konteks ini adalah pemakaian yang keliru.

Oleh kenyataan yang sedemikian itu, jelas bahwa

"pembinaan" dalam berbahasa sangat diperlukan. Sudah barang tentu, "pembinaan" yang dimaksudkan di sini berkenaan dengan "koreksi", "pemasyarakatan", "pengembangan" dan langkah yang setara lainnya, yang mengarah kepada suatu pemakaian kata yang tidak mencerminkan adanya "penjajahan" melainkan adanya pendayaan atau penciptaan berdasarkan khazanah sendiri yang sesungguhnya sudah cukup kaya. Khazanah kata dari bahasa daerah misalnya, sungguh merupakan kekayaan yang belum banyak dimanfaatkan.

Akan tetapi, "pembinaan" ini tentu juga tidak boleh bersifat sementara sebab pemakaian atau tindak berbahasa merupakan suatu kegiatan yang terus menerus dan mengada. Dan jika "pembinaan" ini memang harus "diamanatkan", ya, memang Badan Bahasa—dulu populer disebut sebagai Pusat Bahasa—yang harus berada di garis depan. Namun, apa kabar Dewan Bahasa?***

*Pesastra dan Pengajar FIB UI.



Quo Vadis

Nasionalisme

Jakarta, (Swantara)-Ada yang istimewa dalam peringatan HUT Proklamasi Kemerdekaan kali ini. Peringatan HUT Proklamasi Kemerdekaan ke-67 tanggal 17 Agustus 2012, jatuh pada hari Jum'at dan dalam suasana bulan suci Ramadhan. 67 tahun yang lalu, bangsa Indonesia memproklamkan dirinya sebagai bangsa yang merdeka juga pada hari Jum'at dan juga dalam suasana bulan suci Ramadhan. Lantas, bila kita mau introspeksi diri, dari perspektif kehidupan berbangsa dan bernegara, apa perbedaan yang sangat mencolok diantara kedua momen tersebut?

Bila kita renungi kembali catatan sejarah, tentu kita akan mahfum bahwa Nasionalisme dan semangat kebangsaanlah yang telah melahirkan dan

memerdekakan negara bangsa ini. Tidak ada keraguan dan tidak diragukan bahwa ditengah berbagai perbedaan pandangan dan kepentingan politik, pengorbanan yang didasari nasionalisme para elite bangsa kala itu mampu mengelola kemajemukan menjadi kekuatan yang mempersatukan. Lingkungan sosial yang berkembang di alam penjajahan selama beberapa abad telah membangun dan membentuk kesadaran semangat kebangsaan ke-Indonesia-an.

Nasionalisme dipahami sebagai kesadaran keanggotaan dalam suatu bangsa yang secara potensial atau aktual bersama-sama mencapai, mempertahankan, dan mengabadikan identitas, integritas, kemakmuran, dan kekuatan bangsa itu (Kamus Besar

Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. PT Gramedia Pustaka Utama, 2008). Merujuk pada pemahaman tersebut, kita paham bahwa nasionalisme sangat berkaitan erat dengan kondisi kesadaran jiwa suatu bangsa. Disadari, bukan suatu hal yang mudah dan sederhana untuk membangun kesadaran kolektif bangsa bahwa nasionalisme dan semangat kebangsaan merupakan proses panjang pembentukan kesadaran dan jiwa setiap anak bangsa untuk cinta terhadap bangsa dan negaranya. banyak faktor yang menentukan dan banyak aktor yang terlibat. Seluruh komponen bangsa sangat berperan dalam memperkuat dan memperlemah nasionalisme suatu bangsa. Tidak ada yang dominan dan tidak ada yang tidak dominan. Tidak ada

yang superior dan tidak ada yang inferior. Semua komponen bangsa berperan dan bertanggung jawab secara proporsional sesuai dengan tanggung jawabnya masing-masing.

Kini, di tengah kondisi lingkungan sosial yang jauh berbeda, nasionalisme ke-Indonesia-an itu banyak dipertanyakan dan diperdebatkan berbagai kalangan di berbagai tataran. Ada dua pandangan besar. Pertama, sebagian kalangan berpendapat dan memandang bahwa nasionalisme ke-Indonesia-an masih solid dan kokoh. Kedua, sebagian kalangan lagi, beranggapan nasionalisme ke-Indonesia-an memang masih ada namun lemah dan rapuh. Kedua pandangan ini, mungkin ada benarnya dan mungkin juga tidak sepenuhnya benar. Justifikasi kebenaran kedua pandangan besar tersebut, tergantung dari tolok ukur dan sudut pandang mana masing-masing kalangan melihat dan menilainya. Namun demikian, diskursus nasionalisme ke-Indonesia-an ini, harus dapat dijadikan sebagai bahan introspeksi dan otokritik bangsa dalam membangun nasionalisme yang dibutuhkan bangsa ini untuk mempertahankan eksistensinya.

Pendapat yang memandang dan menilai nasionalisme ke-Indonesia-an lemah dan rapuh dengan berbagai aspeknya, tentu dilandasi oleh perspektif dalam memandang berbagai permasalahan aktual yang mengemuka saat ini. Pandangan dan penilaian itu, tentu saja tidak dapat dilepaskan dari sudut pandang maupun kepentingan tiap-tiap komponen bangsa baik sebagai individu maupun sebagai kelompok. Berbagai hasil pembangunan beserta perkembangan yang menyertai, disikapi dan ditanggapi secara beragam. Namun demikian, dari berbagai pandangan tersebut, negara yang diwakili pemerintah dipandang sebagai penyebab utama, baik langsung maupun tidak langsung, melemahnya nasionalisme bangsa. Padahal bila disadari sungguh-sungguh,

rasa nasionalisme itu merupakan produk kolektif bangsa. Apabila memang nasionalisme bangsa dipandang sudah memudar, penyebabnya tidak dapat ditentukan secara hitam dan putih.

Negara memiliki berbagai keterbatasan. Sebagai negara demokrasi, negara tidak memiliki kekuasaan absolut dan memiliki segalanya. Di negara demokrasi, justru peran aktif berbagai komponen bangsa yang diharapkan lebih dominan. Negara melalui pemerintah hanya bertindak sebagai fasilitator, mediator dan regulator seluruh warga bangsa. Namun, tentu negara harus menjalankan perannya tersebut dengan baik, konsisten dan tegas. Sebaliknya, seluruh anak bangsa, utamanya para elite bangsa dan tokoh masyarakat harus mampu berperan secara konstruktif. Berbagai kekurangan dan keterbatasan negara, tidak seharusnya (justru) dimanfaatkan untuk kepentingan individu maupun kelompok.

Sesungguhnya, hasil pembangunan selama ini telah menunjukkan hasil layak disyukuri bersama. Secara makro, tingkat pendapatan per kapita masyarakat Indonesia terus naik dari tahun ke tahun, dari di bawah 1.000 dolar AS dalam dekade-dekade sebelumnya, menjadi sekitar 3.600 dolar AS pada 2011 dan ditargetkan mencapai 5.500 dolar AS pada 2015 dan 14.900 dolar AS pada 2025. Namun secara mikro, harus diakui bahwa masih banyak hal yang perlu diperbaiki dan ditingkatkan. Kecenderungan disparitas tingkat kesejahteraan yang melebar, kemiskinan dan pengangguran merupakan beberapa masalah yang perlu mendapat perhatian serius secara bersama dari seluruh komponen bangsa.

Negara melalui pemerintah, telah melakukan berbagai upaya untuk mengatasi masalah kemiskinan. Berbagai kebijakan, program dan upaya pengentasan kemiskinan, dalam berbagai bentuknya, sudah dan masih

diselenggarakan pemerintah. Namun harus disadari, pengentasan kemiskinan bukan upaya sederhana yang secara instan mampu membalikkan keadaan dalam waktu singkat. Dibutuhkan proses panjang yang terus menerus dan konsisten serta melibatkan tidak hanya pemerintah, tetapi juga elemen bangsa yang lain. Luasnya wilayah, besarnya jumlah penduduk dan tingginya laju pertumbuhan penduduk merupakan permasalahan-permasalahan yang tidak dapat dibebankan secara tunggal kepada pemerintah atau penyelenggara negara saja. Sejatinya, semua komponen harus berpartisipasi secara aktif untuk mencari solusi terbaik mengatasi permasalahan tersebut. Bila peran aktif komponen bangsa lain dapat diwujudkan secara nyata dengan semangat gotong royong, itulah nasionalisme ke-Indonesia-an sesungguhnya.

Dari aspek kehidupan politik, euphoria reformasi telah merubah wajah dan kehidupan demokrasi Indonesia secara total. Demokrasi Pancasila yang dahulu digagas para pendiri bangsa, tampaknya sedang dalam proses untuk ditinggalkan. tampaknya pula, kita menganut demokrasi ala barat yang mengagungkan kebebasan dan keterbukaan. Tapi anehnya, sebagian dari kita, utamanya para politisi dan pengikutnya, tidak siap dengan perbedaan dan kekalahan dalam proses demokrasi. Akhir dari proses demokrasi hampir, selalu membawa persengketaan dan bahkan tindak anarkisme massa.

Para tokoh dan elite bangsa, berlomba untuk berpartisipasi dalam kehidupan politik. Partai politik dan Ormas tumbuh subur ibarat jamur karena dijamin oleh undang-undang. Tujuannya pun terasa mulia, ingin membangun dan mewujudkan kesejahteraan bangsa. Namun dalam implementasinya, semangat perubahan, kebebasan dan keterbukaan justru menghadirkan tatanan kehidupan masyarakat yang

belum mencerminkan kehidupan masyarakat yang demokratis. Perbedaan agama dan pandangan politik yang sesungguhnya dijamin oleh undang-undang, kerap melahirkan perseteruan dan konflik horisontal maupun vertikal yang melibatkan para elite pemimpin hingga akar rumput. Ironisnya, tindak kekerasan dan anarkisme seolah menjadi "model" dan jalan pintas untuk penyelesaian sengketa dan konflik. Pancasila, UUD NRI tahun 1945, Sesanti Bhinneka Tunggal Ika dan NKRI yang merupakan empat pilar kehidupan berbangsa tidak lagi dijadikan dasar pijakan dan kerangka berpikir dalam menyelesaikan berbagai perbedaan pandangan dan perseteruan dalam kehidupan sosial maupun politik.

Dalam pertemuan yang dihadiri para pemimpin lembaga negara pada tanggal 20 Februari 2012 di gedung Nusantara IV kompleks gedung MPR/DPR/DPD, para pemimpin lembaga negara mengakui bahwa pengalaman menuju konsolidasi demokrasi yang berkualitas masih diwarnai adanya paradoks demokrasi dari nilai demokrasi konstitusional yang didambakan. Sejumlah realitas menunjukkan masih ada kelemahan dalam berdemokrasi salah satunya masih adanya praktik kekerasan di masyarakat, pragmatisme-transaksional terutama pada pelaksanaan pemilu dan pilkada, permasalahan institusional politik yang berpotensi pada munculnya distrust. "Dalam konteks ini disadari bahwa pemerintah dan perangkat lembaga negara dituntut untuk bersikap tegas bersama menegakan hukum dan bukan memberikan ruang aksi kekerasan dan anarkisme melanda masyarakat atas nama kebebasan dan demokrasi," tegas Ketua DPR RI, Marzuki Ali kala itu.

Benar adanya, bahwa penegakkan dan supremasi hukum merupakan kunci keberhasilan terselenggaranya

kehidupan demokrasi yang sehat, berkeadilan dan bermartabat. Tanpa penegakkan dan penghormatan terhadap supremasi hukum, kehidupan demokrasi konstitusional yang didambakan seluruh rakyat hanya menjadi blunder yang mengancam persatuan kesatuan bangsa dan NKRI. Bila seluruh komponen bangsa mampu mewujudkan dan menghormati supremasi hukum untuk kepentingan besar bangsa, itulah nasionalisme....

Korupsi dan Nasionalisme

Korupsi kini telah menjadi musuh nomor satu bangsa Indonesia. Hampir semua elemen masyarakat di berbagai tataran, mengancam dan bahkan mengutuk tindak korupsi yang merugikan bangsa dan negara. Yang mengherankan, walaupun korupsi telah menjadi musuh masyarakat nomor satu, hal ini tidak menyurutkan perilaku tindak pidana korupsi di negeri ini. Seolah, perilaku koruptif sudah berurat berakar dan menjadi budaya bangsa. Memang, fakta yang terungkap memberikan gambaran nyata betapa perilaku koruptif telah merasuk hampir di semua lini kehidupan masyarakat. Melibatkan mulai dari kalangan muda hingga kalangan tua. Melibatkan pula masyarakat biasa, pendidik, pengusaha, birokrat, politisi, aparat penegak hukum hingga penyelenggara negara. Lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif-pun tidak terbebas dari perilaku koruptif ini.

Perilaku koruptif inipun sudah merambah mulai dari pedesaan dan perkotaan yang ada di daerah serta merata di seluruh tanah air. Tidak satupun daerah yang terbebas dan bersih dari perilaku koruptif ini. Temuan KPK mengungkapkan ada 99 anggota Dewan, 17 dari 33 gubernur dan 138 bupati/walikota dan wakilnya (dari seluruhnya 497 kabupaten/pemkot) yang

menjadi tersangka kasus tindak pidana korupsi. Temuan ini seolah menegaskan bahwa korupsi sudah menjadi wabah yang menjangkiti seluruh wilayah NKRI. Ironis memang, tapi inilah fakta dan tantangan yang harus dihadapi dan dipecahkan bersama.

Si (apa) yang salah terhadap semakin mengemukanya perilaku koruptif ini? Dimanakah letak akar permasalahan sesungguhnya dari perilaku koruptif ini? Apakah memang lemahnya kebijakan pembangunan yang pro-rakyat dan lemahnya fungsi pengawasan Pemerintah? Ataukah memang sistem politik biaya tinggi yang diwujudkan dalam pemilu legislatif dan kepala daerah secara langsung, yang menjadi penyebab maraknya perilaku koruptif? Ataukah, demokrasi transaksional ini yang menjadi sumber permasalahannya?

Bagi kalangan yang berbeda kepentingan dengan kebijakan pemerintah, mungkin akan menyudutkan pemerintah karena kegagalan menanggulangi merebaknya tindak pidana korupsi. Lemahnya penegakkan hukum terhadap pelaku tindak pidana korupsi merupakan argumen yang dijadikan alasannya. Sementara itu, bagi kalangan yang memiliki agenda dan kepentingan politik kelompok, akan berpandangan bahwa sistem politik biaya tinggi bukan merupakan alasan maraknya perilaku koruptif di berbagai daerah. Semua kalangan memiliki alasan-alasan sesuai dengan sudut pandang dan kepentingan yang dimiliki.

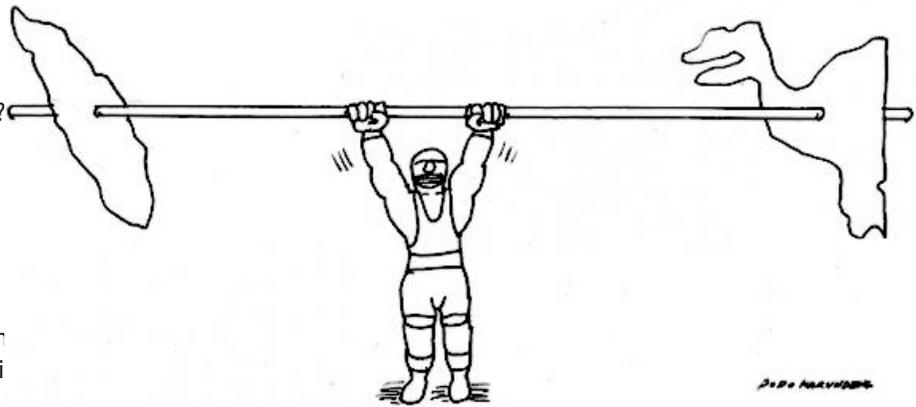
Pada dasarnya perilaku koruptif yang terwujud dalam tindak pidana korupsi merupakan perilaku individu yang didorong oleh kepentingan individu dan atau kepentingan kelompok. Yang pasti, tindak pidana korupsi merupakan tindakan yang melanggar norma-norma hukum dan nilai-nilai moral. Bila demikian, apakah berarti ada yang salah

dengan sistem pendidikan nasional kita? Apakah sistem pendidikan yang ada gagal membentuk watak dan karakter bangsa yang bermoral? Harus diakui, paska reformasi tahun 1998, sistem pendidikan nasional lebih mengutamakan peningkatan kecerdasan dibanding penguatan watak dan karakter bangsa. Hal ini dapat dilihat dari kurikulum pendidikan dasar hingga pendidikan tinggi yang kurang mengakomodasi pendidikan watak dan karakter, utamanya pendidikan moral Pancasila, secara proporsional.

Terlepas dari asumsi siapa benar dan siapa yang salah, apa yang benar dan apa yang salah, yang perlu dipahami bersama adalah perilaku koruptif merupakan perilaku yang jauh dari norma dan nilai-nilai moral. Jauh dari nasionalisme. Melihat dampak yang ditimbulkan, diperlukan upaya ekstra keras dan konsisten dari seluruh elemen bangsa. Perlu dibangun kembali kesadaran kolektif yang sistemik, terstruktur dan sinergis dari berbagai komponen strategis bangsa dalam menanggulangi perilaku koruptif.

Keprihatinan Bangsa

Sementara Gubernur Lemhannas, Prof. Ir. Budi Susilo Soepandji DEA menilai, masalah korupsi merupakan ancaman bangsa Indonesia selain kemiskinan. "Dari pengalaman sejarah, sejumlah negara runtuh akibat praktik-praktik korupsi yang tidak tertangani. Jadi kekhawatiran orang, korupsi bisa meruntuhkan negara, ada benarnya, tidak mengada-ada," kata Budi Susilo. Orang nomor satu di Lemhannas RI tersebut mengakui, praktik korupsi jika dibiarkan akan ikut memudarkan semangat nasionalisme, karena akan memupus kepercayaan satu sama lain, dan pada gilirannya akan merusak segenap sendi-sendi bangsa dan negara. "Semangat nasionalisme harus diamankan, dituangkan dalam



kehidupan sehari-hari, tidak hanya digembar-gemborkan," tandasnya.

Keprihatinan terhadap semakin menipisnya rasa cinta bangsa juga tercermin dari pandangan pejabat pemerintah, kalangan intelektual dan politisi. Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro mengomentari betapa mudahnya masyarakat tersulut aksi-aksi kekerasan atau bertindak anarkis akhir-akhir ini dan berharap agar masyarakat memahami, di satu sisi ada proses demokratisasi yang menampung keterbukaan, informasi dan opini, namun di sisi lain harus disadari pula bahwa keterbukaan dan kebebasan juga ada batasnya.

"Kebebasan harus dalam bingkai demokrasi dan mesti ada rambu-rambunya" tegasnya. Yang paling penting dilakukan, menurut Purnomo, adalah penegakan hukum dan keadilan untuk semua (*justice for all*). Jadi kalau ada yang melanggar Undang-Undang, harus dihukum, walaupun di sisi lain, sikap persuasif, penyadaran dan pencerahan juga harus terus diupayakan.

Sementara cendekiawan Islam Hasyim Muzadi berpendapat, kualitas kepemimpinan atau leadership harus ditingkatkan secara optimal agar kepercayaan rakyat pada pemimpinnya semakin tebal, sehingga mereka mau menyerahkan hak suaranya pada pemimpin

yang mereka percayai dan amanah untuk mensejahterakan rakyat.

"Kita perlu mempertanyakan kembali semangat nasionalisme di tengah merebaknya praktik korupsi yang melibatkan sejumlah anggota Dewan, politisi dan pemimpin bangsa, dan di tengah suasana bagaimana mudahnya orang tersulut aksi anarki akhir-akhir ini," kata Hasyim Muzadi.

Andreas Harsono berpendapat, untuk membangkitkan kembali semangat nasionalisme yang telah memudar, yang penting adalah tegaknya hukum dan keadilan serta HAM, jika ketiganya ditegakkan dengan baik, nasionalisme juga akan bangkit lagi.

Arti penting nasionalisme sebagai perwujudan wawasan kebangsaan, menurut Prof. Mudrajad Kuncoro P.Hd, tidak perlu diperdebatkan lagi, namun bila dewasa ini banyak tokoh mempertanyakannya, ini merupakan refleksi keprihatinan terhadap kenyataan, tergoncangnya persatuan nasional Indonesia yang pada gilirannya bisa mengarah pada ancaman disintegrasi.

Sedangkan sutradara kondang Garin Nugroho berpendapat, aksi-aksi anarkisme, premanisme dan berbagai bentuk pengadilan jalanan disamping meresahkan masyarakat, jika dibiarkan, bisa melunturkan rasa nasionalisme, padahal

pemerintah sedang berupaya menuntaskan segudang persoalan lainnya termasuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Sementara Rohaniawan, Romo Magnis menilai, nasionalisme di dalam sebuah kelompok menjadi lemah, jika menyangkut agama, apalagi masih ada kelompok-kelompok kecil radikal yang memandang bahwa keyakinan yang berbeda adalah ajaran sesat yang harus dimusnahkan. "Akibatnya, yang terbangun dalam masyarakat tidak lagi sikap gotong royong, melainkan nuansa persaingan dan reprimordialitas (mencari identitas dalam agama, suku). Di sini kita berhadapan dengan masyarakat dan juga harus mendidik masyarakat agar saling menghormati," tutur Frans.

Anggota DPD-RI Agustina Basik Basik menilai, nasionalisme Indonesia saat ini lebih banyak berada pada tataran retorika karena rakyat sering menyaksikan perilaku sejumlah tokoh elite masyarakat dan bangsa yang sering tidak bisa diteladani atau dijadikan panutan. Seharusnya, menurut Agustina, mereka yang menyimpang dari falsafah Pancasila, hukum, atau perundang-undangan, dikenakan sanksi, karena jika terus ditoleransi akan semakin menjadi-jadi.

Dari perspektif kalangan pers dan media massa, Ketua Dewan Kehormatan PWI, Tarman Azzam menyoroti bahwa nasionalisme untuk membangun semangat dan menjaga kesatuan nasional memerlukan gagasan yang harus terus digulirkan, terutama gagasan mengenai nasionalisme dalam upaya menjaga NKRI. Dalam konteks ini, pers memiliki peran penting untuk memberikan informasi kepada rakyat dalam upaya meningkatkan rasa kebangsaan di tengah berlangsungnya proses demokratisasi saat ini. Kuncinya, tradisi pers harus dibangun berdasarkan tradisi yang berakar pada Pancasila, sehingga

mampu memberikan penjelasan secara utuh setiap sila dalam Pancasila kepada masyarakat.

Separatisme: Tantangan Nasionalisme

Separatisme bermakna sebagai sebuah paham atau gerakan politik untuk memisahkan diri (mendirikan negara sendiri). Motivasi paham ini pada umumnya berbasis nasionalisme atau kekuatan ideologis religius tertentu. Tidak sedikit pula, separatisme muncul karena ketidakpuasan atas situasi politik dan ekonomi kelompok tertentu. Dalam mencapai tujuannya, separatisme dapat ditempuh dengan cara damai atau dengan menggunakan kekerasan. Separatisme yang berbasis nasionalisme atau kekuatan ideologis, umumnya penyelesaiannya akan berlarut-larut dan bahkan tidak berujung. Sementara, separatisme yang disebabkan karena ketidakpuasan politik atau ekonomi, masih dapat diselesaikan walaupun akan menyita waktu, biaya dan energi.

Banyak negara yang memiliki permasalahan dengan separatisme. Diantaranya, ada yang hidup terus menerus selama berpuluh tahun dengan separatisme. Bagaimana dengan kita, bangsa Indonesia? Sejak Proklamasi kemerdekaan 67 tahun yang lalu, separatisme sudah mewarnai lembaran sejarah bangsa. Sebut saja, DI/TII Kartosuwiryo, PRRI/Permesta, RMS, NII dan masih banyak lagi. Kita patut bersyukur bahwa kita dapat menyelesaikan beberapa ganjalan separatisme. Yang terakhir dapat diselesaikan adalah separatisme di Aceh. Kini, kitapun masih belum dapat lepas sepenuhnya dari isu separatisme, utamanya di tanah Papua.

Bila dicermati, akar permasalahan separatisme di Indonesia banyak disebabkan oleh ketidakpuasan politik dan ekonomi. Ketidakadilan dan frustrasi yang dirasakan oleh

sekelompok masyarakat atau daerah atas berbagai kebijakan pemerintah pusat, kemudian diekspresikan dengan menunjukkan keinginan untuk memisahkan diri. Pemisahan diri dari NKRI, dianggap sebagai obat mujarab untuk memperbaiki ketidakadilan politik maupun ekonomi yang mereka dambakan. Mujarab atau tidaknya, tidak ada satupun yang dapat memberikan jaminan.

Lantas, kini apa yang harus dilakukan bangsa Indonesia untuk menyelesaikan separatisme yang tersisa? Bangsa ini telah mempunyai banyak pengalaman menangani separatisme. Orang bijak berkata: "Pengalaman adalah guru yang baik". Kebijakan, kearifan, kebersamaan dan ketegasan adalah kunci utama penyelesaiannya. Humanisme adalah sentuhan yang dibutuhkan untuk menyempurnakan penyelesaian yang ingin dicapai. Terkait isu panas Papua, tentu pemerintah telah berusaha dengan berbagai upaya untuk meningkatkan status sosial, politik dan ekonomi masyarakat Papua. Otonomi khusus Papua merupakan langkah positif yang perlu mendapat dukungan dari berbagai elemen bangsa. Ditengah pertarungan kepentingan politik nasional, regional maupun global, memang tidak mudah memilih dan memilah akar permasalahan separatisme di bumi cendrawasih. Yang dibutuhkan bangsa ini adalah kebersamaan untuk mengangkat harkat dan martabat masyarakat Papua. Untuk masyarakat Papua, yang dibutuhkan adalah Nasionalisme yang humanis.

Bila nasionalisme ke-Indonesia-an adalah NKRI harga mati, maka berbagai kekurangan dan keterbatasan pemerintah seyogyanya ditutupi dan dilengkapi oleh peran konstruktif dari komponen bangsa lainnya, terutama masyarakat Papua itu sendiri. Tidak elok bila kita saling menuding siapa salah siapa yang

bertanggung jawab. Semua memiliki kontribusi salah dan benar. Sangat bijak bila kita renungi filosofi sederhana yang sering kita lupakan. "Apabila satu telunjuk menunjuk kepada orang lain, maka sesungguhnya tiga jari yang lain menunjuk kepada diri sendiri".

Nasionalisme Kini : Retorika?

Pendapat bahwa Nasionalisme ke-Indonesia-an kini hanya sebatas retorika memang banyak terdengar. Benar tidaknya pandangan ini tentu perlu pengujian dan pembuktian yang mendalam. Namun dalam kehidupan keseharian kita sebagai bangsa, memang dijumpai beberapa hal yang mengusik jati diri sebagai bangsa. Dan itu terjadi sangat dekat dan sering kita saksikan. Namun, kita tidak pernah tersadar atas situasi itu.

Contoh yang paling sederhana adalah penggunaan bahasa. Di pelbagai tempat, mulai dari kompleks pemukiman, kompleks pertokoan, jalan raya dan bahkan kompleks pemakaman, kita akan mudah menjumpai penggunaan istilah dan terminologi asing. Hal ini terjadi tidak saja di ibu kota negara, tetapi juga dapat dilihat di kota-kota besar di seantero negeri. Di layar kaca lokal maupun nasional, kita jumpai banyak acara dan tajuk berita yang menggunakan bahasa asing (Inggris). Seolah, kini kita tidak bangga lagi menggunakan bahasa Indonesia. Tampaknya, kita sudah nyaman dan merasa bergaya, lebih hebat, lebih bergengsi dan lebih modern dengan menggunakan bahasa asing. Apabila dalam berbahasa saja kita tidak mampu mempertahankan nasionalisme, jati diri dan identitas sebagai bangsa Indonesia, lantas pertanyaan yang muncul adalah bagaimana nasionalisme bangsa dalam aspek kehidupan nasional lainnya?

Mungkin kita masih ingat peristiwa pemuatan karikatur Presiden SBY di salah satu surat kabar Australia tahun 2006 lalu

yang menyinggung harga diri anak bangsa di tanah air. Berbagai hujatan dan kutukan merebak di seluruh tanah air, mulai dari organisasi massa hingga anggota legislatif. Respon yang wajar karena nasionalisme sebagai bangsa terusik. Ironisnya, hal serupa sering terjadi di tanah air. Foto Presiden sebagai kepala negara maupun Wakil Presiden kerap menjadi kelengkapan dan sasaran para peserta unjuk rasa yang tidak sejalan dengan kebijakan pemerintah. Tindak pelecehan terhadap simbol negara tersebut mulai dari coret-corek merendahkan hingga pembakaran foto. Anehnya, tidak ada satu komponen bangsa-pun yang protes terhadap tindakan-tindakan yang merendahkan simbol-simbol negara tersebut.

Kita-pun pasti masih ingat, betapa masyarakat kita memberikan reaksi keras terhadap tindakan-tindakan negara tetangga kita, Malaysia, yang dianggap provokatif dan melecehkan kedaulatan bangsa dan NKRI. Mulai dari kasus ambalat hingga klaim atas seni budaya bangsa oleh negara Jiran tersebut. Demikian pula, manakala kita saksikan gelora semangat nasionalisme bangsa menyaksikan pertandingan sepak bola antara Indonesia dengan negara lain. Sayangnya, gelora nasionalisme itu segera sirna sejalan meredanya silang sengketa atau usainya pertandingan sepak bola. Apakah memang nasionalisme hanya menggelora bila berhadapan dengan bangsa lain? Apakah nasionalisme dan semangat kebangsaan tidak diperlukan dalam interaksi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dalam lingkup internal? Benarkan nasionalisme ke-Indonesia-an kita, kini hanya sebatas retorika?

Harapan dan Tekad Bangsa

Memasuki usia ke-67 Kemerdekaan RI, 17 Agustus 2012, bangsa Indonesia tidak

perlu meratapi dan risau terhadap gonjang-ganjing melemahnya nasionalisme ke-Indonesia-an. Kita tidak perlu merasa terlalu terganggu terhadap berbagai penyimpangan dan praktik-praktik buruk yang berlangsung. Sebaliknya, tentu juga tidak bersikap abai, menutup-nutupi, menganggap enteng permasalahan dan ancaman bangsa yang jelas-jelas ada di hadapan mata. Bangsa ini masih memiliki harapan dan tekad yang kuat untuk hidup secara bermartabat dan terhormat sebagai bangsa yang besar.

Asa dan harapan bangsa itu tercermin dari hasil Survei Kehidupan Bernegara yang dilakukan BPS RI sejak tanggal 27 Mei hingga 29 Mei 2011 yang lalu. Survei yang bertujuan untuk mengetahui pemahaman masyarakat terhadap empat pilar kehidupan bernegara (Pancasila, UUD NRI 1945, Bhinneka Tunggal Ika dan NKRI) ini, melibatkan 12.056 responden yang tersebar di 181 kabupaten/kota di 33 Provinsi di seluruh Indonesia. Hasilnya, ternyata bangsa ini masih memiliki tekad dan keyakinan kuat untuk membangun kembali semangat kebangsaan dan nasionalisme ke-Indonesia-annya.

Hasil yang melegakan, hampir seluruh masyarakat (99%), baik masyarakat perkotaan, pedesaan, kelompok elite maupun generasi muda, mengetahui adanya Pancasila. Sebagian besar masyarakat menganggap bahwa keempat pilar kehidupan bernegara penting untuk dipertahankan dengan prosentase masing-masing pilar di atas 75%. Sebagian masyarakat (89,4%) setuju bahwa berbagai permasalahan bangsa seperti tawuran antarpelajar, antar kelompok masyarakat, antar golongan, dan antar etnis muncul akibat kurangnya pemahaman dan pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Pandangan setuju tersebut muncul dari masyarakat di seluruh



provinsi yang mengindikasikan bahwa nilai-nilai luhur yang terkandung di dalam Pancasila dianggap mampu mempersatukan berbagai perbedaan dan mengantarkan Bangsa Indonesia mencapai tujuan nasionalnya.

Terkait aktor yang dianggap pantas untuk memberikan edukasi dan sosialisasi, sebagian besar masyarakat (43,4%) berpendapat bahwa Guru dan Dosen dipandang sebagai figur yang paling tepat untuk memberikan edukasi dan sosialisasi Pancasila. Pendapat masyarakat ini menyebar merata di seluruh Propinsi, bahkan di Gorontalo persentasenya mencapai lebih dari 60%. Figur berikutnya adalah Tokoh Masyarakat/ Pemuka Agama (27,9%), diikuti oleh perlunya Badan Khusus yang dibentuk Pemerintah (19,5%). Sebaliknya Elite Politik dipandang sebagai figur yang kurang cocok karena hanya 3,2% masyarakat yang menyuarakannya.

Dari hasil survei cepat yang dilakukan oleh BPS RI ini, terlihat bahwa sebagian besar responden tahu Pancasila, tapi

belum mengetahui 4 (empat) pilar kehidupan bernegara, namun menganggap penting untuk tetap dipertahankan, karena menyadari bahwa terjadinya permasalahan bangsa saat ini, akibat kurangnya pemahaman dan pengamalan Pancasila, dan masyarakat masih yakin dan percaya bahwa Pancasila mampu mempersatukan berbagai perbedaan yang terjadi, dan mengantarkan Bangsa Indonesia mencapai tujuan nasionalnya. Juga dari hasil survei tersebut diketahui bahwa tenaga pendidik (Guru dan Dosen) sebagai figur yang paling tepat untuk memberikan edukasi dan sosialisasi nilai-nilai Pancasila melalui jalur pendidikan dengan menjadikan Pancasila sebagai kurikulum wajib dalam dunia pendidikan.

Terlepas dari pro-kontra yang mungkin ada, kita patut bersyukur atas hasil tersebut. Sekarang, tergantung bagaimana seluruh komponen bangsa menyikapi hasil tersebut. Apakah kita akan memanfaatkan hal tersebut sebagai modal penguatan nasionalisme kita? Atau, kita bersikap skeptis terhadap

hasil tersebut dan larut dalam hingar bingar bulan madu kehidupan demokrasi? Kita tidak sedang dihadapkan pada dua pilihan tetapi kita dihadapkan pada penentuan sikap dan keputusan. Bila kita berketetapan hati untuk mempertahankan bangsa dan keutuhan NKRI, maka bangsa ini harus mengambil keputusan kolektif untuk segera mengambil langkah nyata memperkuat

nasionalisme ke-Indonesia-an. Hal ini perlu dan harus dimulai dari para pemimpin dan elite bangsa di berbagai tataran. Mengapa harus dimulai dari pemimpin? Sebagai bangsa yang paternalistis, teladan dan panutan dari pemimpin dan elite bangsa merupakan kunci keberhasilan percepatan pembangunan watak dan karakter bangsa.

Di tengah derasnyanya arus perubahan, kita dituntut untuk mengikuti arus perubahan bila tidak ingin tergilas dengan perubahan. Namun kitapun harus sepakat, bahwa perubahan yang ada tidak boleh merubah watak dan karakter bangsa hingga kita lupa terhadap identitas dan jati dirinya sendiri sebagai bangsa majemuk yang mengutamakan semangat kegotongroyongan.

Segegap komponen bangsa Indonesia dengan keanekaragamannya di negeri yang gemah ripah loh jinawi, Bersatulah...!! Bangkitkan Nasionalisme-mu...!! HOLOPIS KUNTUL BARIS....!! BERSAMA KITA BISA...!! [EP/NS/AB/EH]



Apung Widadi
(Divisi Korupsi Politik ICW)

17 Agustus Merdeka dari Korupsi

Jakarta, (Swantara) – Sudah tiba saatnya rakyat Indonesia bangkit untuk menierakkan “kemerdekaan” dari belenggu korupsi, sebaliknya pemerintah harus melakukan introspeksi dan lebih fokus memberantas perilaku buruk tersebut, kata Apung Widadi dari Divisi Korupsi Politik ICW.

Secara *de facto* dan *de jure*, Indonesia sebagai negara kesatuan dan negara yang merdeka serta terbebas dari belenggu penjajahan telah diakui oleh masyarakat dunia. Tentu kemerdekaan yang diraih oleh bangsa Indonesia tidak datang begitu saja, melainkan dengan pengorbanan jiwa dan raga, kerja keras dan gotong-royong untuk mengusir penjajah. Indonesia kini sudah terbebas dari penjajahan fisik, namun selanjutnya, apakah ada jaminan kesejahteraan, kemakmuran dan hidup layak bagi rakyat? Apakah rakyat Indonesia sudah benar-benar merasa bangga dalam memperingati hari kemerdekaan?

“Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan berwibawa

merupakan kado terindah untuk rakyat setiap kali merayakan HUT kemerdekaan. Ini “PR” besar bagi pemerintah, mengingat rakyat merasa di-dzalimi akibat praktik-praktik korupsi yang berlangsung sejak lama,” kata Apung Widadi.

Rakyat, ujarnya, juga harus proaktif dalam pemberantasan korupsi dengan berbagai cara, misalnya melakukan audit sosial dengan melapor ke KPK atau lembaga penegak hukum lainnya jika mengetahui ada pejabat yang memiliki harta tidak wajar. Sanksi sosial terhadap pelaku korupsi juga bisa lebih di kedepankan, baik di tengah masyarakat maupun di media. “Yang paling penting, masyarakat harus lebih cerdas melihat perilaku pejabat yang ahistoris dengan semangat kemerdekaan,” tutur Apung.

Ironisnya, rasa kebanggaan terhadap bangsa dan negara dan semangat nasionalisme rakyat ikut pula terkikis akibat hampir setiap hari disajikan berita-berita mengenai kasus-kasus korupsi yang melibatkan pejabat, politisi atau anggota parlemen, bahkan aparat penegak hukum sendiri.

Apung menilai, rakyat kerap menyaksikan perilaku elit dari berbagai kalangan, termasuk pejabat negara, yang lebih mengutamakan kepentingan pribadi, golongan dan kelompok, daripada kepentingan rakyat dan bangsa secara keseluruhan. Akibatnya, pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat tersendat karena suburnya praktik – praktik korupsi. Menurut Apung, hal inilah yang sedikit banyaknya, mengurangi semangat nasionalisme rakyat. Merebaknya praktik korupsi, menurut dia, memberikan andil berkurangnya rasa bangga dan menipisnya rasa nasionalisme Indonesia.” kata Apung menambahkan.

Pada bagian lain, terkait pengelolaan sumber daya alam, Apung juga menegaskan bahwa penguasaan dan pengelolaan sumber daya alam oleh perusahaan asing, telah menyebabkan beban masyarakat semakin berat. Bagi Apung, jika sumber daya alam dikelola dengan baik, rakyat bisa hidup makmur dan sejahtera. [EP/AB/NS]



Prof. Dr. Ir. Budi Susilo Soepandji DEA
Gubernur Lemhannas

Jakarta, (Swantara) – Semangat kebangsaan yang diwarnai aksi-aksi heroik para pendahulu saat merebut kemerdekaan dari tangan penjajah perlu ditransformasikan guna mewujudkan kemandirian bangsa dalam pengelolaan sumberdaya alam untuk memacu pertumbuhan ekonomi, kata Gubernur Lemhannas, Prof. Dr. Ir. Budi Susilo Soepandji DEA.

“Mengupayakan alih teknologi dan meningkatkan mutu SDM yang akan mengelola pelaksanaan pembangunan juga merupakan bagian semangat nasionalisme yang harus dibangun,” ujarnya.

Nasionalisme atau kecintaan terhadap bangsa, menurut orang nomor satu di Lemhannas itu seharusnya juga tidak diartikan secara sempit sehingga mengarah ke sikap *chauvinistis*, atau nasionalisme yang membabi-butu, sebaliknya, perlu ditumbuhkan pula sikap menghargai bangsa lain.”

“Keberhasilan pembangunan yang kita capai, juga perlu kita tularkan dan sumbangkan selain bagi bangsa dan negara juga untuk dunia,” ujarnya.

Di era globalisasi yang ditandai semangat kemitraan

Perlu Dibangun Semangat Nasionalisme Baru

saat ini, menurut Budi Susilo, Indonesia mau tidak mau harus menggalang kemitraan dengan berbagai pihak, namun di sisi lain juga harus tetap mempertahankan kemandiriannya.

“Kita harus memiliki *bargaining power*, jadi, jangan sampai pengelolaan sumberdaya alam kita serahkan seluruhnya pada pihak asing, sementara bangsa kita cuma jadi kuli,” tandasnya.

Ke dalam, sikap nasionalisme adalah rasa cinta hakiki di tengah keanekaragaman bangsa Indonesia untuk bernaung dalam kerangka NKRI dilandasi semangat Bhinneka Tunggal Ika. Pertanyaannya, bagaimana jika bangsa Indonesia kehilangan rasa nasionalisme,?

“Tanpa nasionalisme, tidak ada Persatuan Indonesia yang merupakan Sila ke-3, karena akan terjadi pengeroposan nilai-nilai Pancasila yang merupakan dasar negara, falsafah, sumber hukum dan ‘*way of life*’ bangsa Indonesia mengingat penghayatan dan pengamalan nilai-nilai Pancasila harus dilihat secara utuh - kelima sila berada dalam kesatuan - saling terkait, tidak terpisahkan,” ujarnya.

Tentang penilaian memburuknya posisi RI dalam Indeks Negara Gagal 2012, Budi Susilo berpendapat, seharusnya pemerintah dan segenap komponen bangsa melakukan introspeksi dan mewaspadaikan peringatan tersebut, namun demikian bangsa Indonesia juga perlu “unjuk gigi” atas kemampuannya.

“Saya sendiri tidak terlalu merisaukan penilaian tersebut, dan sepantasnya kita tidak tergiring

dalam penilaian pihak lain, tetapi kalau kita anggap sebagai cambuk untuk bekerja lebih giat lagi, boleh-boleh saja,” ujarnya.

Dalam Indeks Negara Gagal (*Failed States Index/FSI*) 2012 yang disusun oleh lembaga nirlaba, *The Fund for Peace* bersama majalah *Foreign Policy*, RI menempati peringkat ke-63 dari 178 negara atau termasuk yang dikategorikan dalam bahaya (*in danger*) menuju negara gagal.

Finlandia memperoleh nilai terbaik (178) versi FSI 2012 atas keberhasilannya a.l. dalam pembangunan ekonomi, penyediaan layanan publik dan penegakan HAM yang masuk dalam indikator penilaian.

Penegakan HAM, tekanan demografis dan protes kelompok minoritas merupakan indikator yang membuat terpuruknya posisi Indonesia seluruhnya 12 indikator yang dinilai.

Di kalangan negara-negara ASEAN, RI berada pada peringkat ke-enam setelah Myanmar (21), Timor Leste (28), Kamboja (37), Laos (48) dan Filipina (56), sementara lima negara lainnya dalam peringkat yang lebih baik yakni Thailand (84), Vietnam (96), Malaysia (100), Brunei Darussalam (123) dan Singapura (157).

Menyinggung praktik korupsi yang merajalela di Indonesia, Gubernur Lemhannas mengakui, memang merupakan ancaman terbesar bangsa ini selain isu kemiskinan. Dari pengalaman sejarah, lanjutnya, sejumlah negara runtuh akibat praktik-praktik korupsi yang tidak tertangani.



“Kekhawatiran masyarakat, korupsi bisa meruntuhkan negara, ada benarnya, bukan mengada-ada,” katanya mengingatkan.

Namun demikian, menurut Budi Susilo, praktik korupsi menyangkut banyak aspek, antara lain aspek hukum, budaya (yang berkembang dalam suatu era-red) dan bobotnya juga berbeda-beda. “Kalau alasannya karena pendapatan yang terlalu rendah, mungkin masih bisa ditoleransi. Yang berbahaya, kan pengerukan kekayaan negara secara eksploratif atau korupsi terhadap kebijakan publik,” tuturnya

Masalah korupsi, menurut dia, harus ditinjau secara komprehensif dan integral, sementara Lemhannas, tidak bisa menanganinya langsung, karena memang bukan wewenangnya, hanya bergerak sebatas tataran idiil, menyampaikan masukan berupa kajian yang disampaikan kepada pemerintah.

“Kita menyorotinya dalam skema wawasan kebangsaan,” tuturnya seraya menambahkan, kader-kader bangsa yang belajar di Lemhannas juga selalu

diingatkan mengenai potensi ancaman keutuhan NKRI akibat merajalelanya praktik korupsi.

Ia juga mengakui, praktik korupsi jika didiamkan, akan ikut memudahkan semangat nasionalisme karena bisa memupus kepercayaan antara satu dan lain dan pada gilirannya akan merusak sendi-sendi bangsa dan negara. Mengenai aksi-aksi kekerasan dan separatisme yang terjadi di Papua, Budi Susilo menilai, penyebabnya a.l. kemiskinan dan kesenjangan ekonomi, apalagi kondisi demografi dan geografi Papua yang unik dengan sebaran penduduk terpencar-pencar - di kawasan pesisir, di hutan dan pegunungan -, sehingga hasil pembangunan belum bisa dinikmati secara merata.

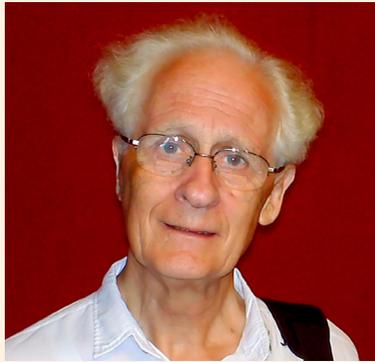
Penyelesaian masalah di Papua, sambungnya, harus dilakukan melalui pendekatan integralistik dengan melibatkan kelompok strategis komponen masyarakat Papua yang akan menjembatannya.

“Mungkin perlu kajian aspek antropologis, misalnya untuk

mengetahui alasan kelompok yang berniat melepaskan diri dari NKRI. Apa mereka merasa termarginalkan, padahal pemerintah telah melakukan berbagai upaya dan mengucurkan dana melalui Otsus. Perlu dipertanyakan pula, apa program yang telah dilakukan tidak tersosialisasikan dengan baik atau tidak sampai menjangkau masyarakat bawah?” katanya balik bertanya.

Budi berpendapat, perlu diskusi panjang-lebar dengan melibatkan banyak institusi dan kelompok masyarakat untuk menuntaskan isu Papua, karena selain aspek separatisme, mungkin ada aspek yang lebih fundamental yakni ketidakpercayaan antara satu dan lainnya (termasuk kepada pemerintah-red).

“Memang perlu diwaspadai, ada sekelompok orang yang menghendaki pemisahan diri dari NKRI,” katanya menambahkan.^[NS]



Frans Magnisuseno
Rohaniawan

Jakarta, (Swantara) – Rohaniawan Frans Magnissuseno menilai, kemajemukan bangsa Indonesia dari sisi budaya, bahasa dan adat-istiadat selayaknya menjadi modal utama untuk membangun negeri yang beradab, bangsa yang bermartabat, makmur dan sejahtera.

“Sayangnya, kemajemukan yang dimiliki, akhir-akhir ini kadang-kadang malah menjadi momok atau hantu menakutkan yang dapat mengancam semangat nasionalisme dan keutuhan bangsa,” ujarnya.

Menurut Romo Magnis, sebenarnya nasionalisme Indonesia masih cukup kuat. “Orang-orang masih merasa dirinya bangsa dan rakyat Indonesia atau bagian dari Indonesia. Hal ini tercermin misalnya dari sejumlah masalah nasionalisme menyangkut hak milik bangsa, seperti klaim-klaim terhadap produk seni-budaya kerap dilancarkan oleh negara tetangga. Masyarakat Indonesia beramai-ramai ikut mempertahankan produk seni-budaya yang diklaim pihak luar tersebut dan menyatakan bahwa itu adalah milik Indonesia. “Lebih jauh lagi, mereka siap memperjuangkannya sampai ke medan perang. Sampai titik darah penghabisan,” ungkap Frans Magnisuseno.

Kemajemukan, Modal Utama Bangun Negeri

“Akan tetapi, nasionalisme di dalam sebuah kelompok menjadi lemah, apalagi jika menyangkut agama. Hal ini terkait dengan kelompok-kelompok kecil radikal yang dalam khotbah-khotbah mereka menyerukan bahwa penganut-penganut keyakinan yang berbeda adalah ajaran sesat yang harus dimusnahkan. Akibatnya, yang terbangun dalam masyarakat tidak lagi sikap gotong royong, melainkan nuansa persaingan, mencari identitas—reprimordialitas (mencari identitas dalam agama, suku). Di sini kita berhadapan dengan masyarakat dan juga harus mendidik masyarakat agar saling menghormati,” tutur Frans.

Frans juga menyampaikan, bahwa kita juga harus memiliki dan memegang teguh nilai-nilai Pancasila yang sudah dirumuskan serta ditetapkan oleh para pendiri bangsa ini, Tepatnya sila ke-2 “Bangsa ini harus selalu menjunjung tinggi Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, artinya, masyarakat harus bisa menerima mereka yang berbeda,” ungkap Frans.

“Di era pergerakan nasional, bangsa Indonesia dipersatukan dalam melawan penjajah. Kita bersama-sama berkorban melawan penjajah. Saat ini Indonesia tidak lagi punya musuh bersama, tapi tekad untuk membangun Indonesia yang lebih baik harus terus digalakkan. Pemimpin

harus memberikan teladan dan memupuk kebanggaan menjadi orang Indonesia. Pimpinan tingkat nasional dan daerah harus memiliki cita-cita untuk mempersatukan bangsa, memajukan bangsa dan mewujudkan negara yang aman, adil dan makmur,” jelas Frans.

Romo Magnis berpendapat, masyarakat harus dilibatkan dalam pembangunan nasional. Bangsa Indonesia sudah hampir 14 tahun menghirup udara demokrasi, namun sampai saat ini kehidupan berdemokrasi belum berjalan baik. “Buah demokrasi belum dapat dinikmati langsung oleh sebagian masyarakat,” tandasnya. Memang di bawah kepemimpinan Soeharto, masyarakat bisa merasakan hasil pembangunan, sehingga masyarakat sangat mendukung kepemimpinannya. Meskipun pada akhirnya dia tidak berhasil membangun demokrasi dan menciptakan suasana politik yang demokratis tapi paling tidak, masyarakat bisa merasakan dampak positif hasil kerja dan kinerjanya.

“Oleh sebab itu, selain menjadi teladan yang baik, pemimpin juga harus melibatkan masyarakatnya dalam pembangunan nasional,” demikian Frans Magnisuseno menambahkan. [AB/NS]



Adriana Elisabeth

Jakarta, (Swantara) – “Sebenarnya dialog bukan barang baru bagi masyarakat Papua. Kesulitannya, mungkin karena penduduk tidak homogen, tetapi terdiri dari banyak suku (253 suku) yang memiliki sistem ‘klan’ sendiri-sendiri, bersifat egaliter dan tidak bisa saling mengatasnamakan satu dan lainnya. “Jadi, kalau ingin mendorong dialog, biarkan mereka yang meramunya,” kata peneliti LIPI, Adriana Elisabeth. Penegasan itu, disampaikan Adriana saat berbicara seputar situasi yang berkembang di tanah Papua akhir – akhir ini.

Mengenai dialog yang digagas Wapres Budiono dalam kunjungannya ke Papua, Februari lalu, menurut Adriana, keterlibatan segenap unsur masyarakat Papua diharapkan akan membangun rasa memiliki dan mengembalikan kepercayaan masyarakat Papua pada pemerintah pusat akibat tidak terselesaikannya berbagai permasalahan di wilayah itu selama ini.

Sebelum memasuki tahap dialog antara keterwakilan masyarakat Papua dengan pemerintah pusat, masing-masing pihak seharusnya mengkonsolidasikan diri dulu, misalnya, di lingkungan internal Papua, dilakukan pertemuan

Dialog Bukan Barang Baru Bagi Masyarakat Papua

antara wakil-wakil tokoh adat dan masyarakat, warga asli dan pendatang, kalangan dunia usaha setempat dan Pemda. Sebaliknya, tim pemerintah pusat yang disiapkan untuk mengikuti dialog juga terlebih dulu harus menyamakan persepsi, mekanisme dan menyusun format dialog.

Selain membuka dialog dengan segenap unsur-unsur yang mewakili masyarakat Papua, pemda setempat perlu bertindak sebagai institusi yang profesional agar wilayah paling ujung timur Indonesia tersebut kembali ke kehidupan normal dalam bingkai NKRI, “Yang penting, bagaimana mengubah pandangan (sebagian) masyarakat Papua pada pemerintah,” ujarnya.

Adriana mengakui, masalah Papua memang sangat sensitif, mengingat proses integrasi wilayah tersebut yang mulai diungkit-ungkit karena ada kelompok warga berpandangan, prosesnya diwarnai ketidakadilan, ketidaknyamanan dan diliputi perasaan tertekan.

Jaringan Papua Damai (JDP) dan Tim Papua LIPI telah mengeluarkan buku saku berisi pedoman tawaran konsep dialog. Buku tersebut memuat detail saran tawaran dialog mulai dari tahap persiapan, makna, pemahaman, skema dan tujuan dialog (membangun saling kesepahaman, take and give, wahana penyampaian aspirasi, kompromi), pradialog, penunjukan juru runding, fasilitator dan

mediator, lokasi, pengertian prinsip kesepakatan, sampai ke piramida dialog dan sistem monitor.

Bab mengenai “Dialog, Bukan Status Quo atau Merdeka” menekankan pemahaman bahwa dialog adalah sarana untuk mencapai kesepakatan baru, mencari solusi permasalahan, bukan untuk mempertahankan status quo penguasa atau sarana untuk memperjuangkan kemerdekaan. Pada bab lainnya di buku saku tersebut, disebutkan bahwa dialog bukan cara memaksa atau menyetujui bulat-bulat praktik pemerintah selama ini dan dialog adalah kesempatan untuk menumbuhkan peluang untuk mencapai kesepakatan baru yang lebih baik. Peserta dialog adalah kedua belah pihak yang mewakili masyarakat Papua dan pemerintah. Dialog dipimpin oleh mediator netral, diikuti tim ahli dan juru runding masing-masing, tokoh adat atau tokoh masyarakat Papua serta wakil-wakil dari pemerintah pusat.

Secara eksplisit pada bab “Dialog, Tempat Pertemuan Aspirasi” ditekankan pemahaman dialog yakni “bukan hasil akhir”, tetapi “sarana pemahaman timbal balik kepentingan para pihak, bukan ajang saling tipu, tetapi juga sebagai wahana penyampaian aspirasi masyarakat luas”

Upaya Pemda agar menjadi institusi yang profesional dalam melaksanakan pengabdian dan

memberikan pelayanan masyarakat, menurut Adriana, perlu segera dilakukan termasuk dengan merekrut kader-kader lokal. “Kader-kader yang terbukti memiliki kinerja dan dedikasi tinggi, nantinya bisa dipromosikan dan ditempatkan di wilayah lain di Indonesia, dengan demikian diharapkan ikatan batin mereka sebagai bagian dari bangsa Indonesia semakin menebal,” tutur Adriana.

Ia memang mengakui, tidak mudah untuk mengubah budaya, pola dan etos kerja Pemda setempat yang telah bertahun-tahun minim evaluasi dan pemberian reward and punishment. “Ya, ini tugas Kemendagri untuk melakukannya, dan jika berhasil, pembenahan dan perombakan pemda Papua bisa dijadikan contoh untuk dilakukan pada pemda di seluruh Indonesia,” ujarnya.

Di sisi lain, lanjutnya, Program Otonomi Khusus yang dimulai sejak 2002 yang dilakukan pemerintah, juga dengan program Unit Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Papua Barat (UP4B) kurang sosialisasi dan belum memiliki persepsi yang sama.

Temuan BPK baru-baru ini mengungkapkan, Rp 4,1 triliun dari Rp19,1 triliun dana Otsus yang diperiksa BPK dan dikucurkan pemerintah pusat sejak 2002 sampai 2010 ke Papua dan Papua Barat telah diselewengkan. Berbagai modus operandi

penyimpangan dilakukan oleh elit lokal yang diserahi amanah untuk melaksanakan otsus. Adriana sepakat bahwa seandainya dana Otsus yang telah dikucurkan, ditambah lagi dengan dana-dana bersumber dari APBN dan APBD dari tahun ke tahun digunakan dengan benar, prasarana dan sarana di wilayah itu pasti jauh lebih baik dari sekarang ini. Begitu pula dengan sekitar 1,5 juta warga asli Papua, pasti mereka sudah mengenyam pendidikan, layanan kesehatan atau kesejahteraan yang jauh lebih baik.

Program pembangunan di Papua yang sebaran penduduknya tidak merata dan kondisi alamnya yang spesifik, kata Adriana, baru

bisa dinilai berhasil jika mampu menjangkau masyarakat luas. Pembangunan infrastruktur juga mendesak dilakukan dalam upaya menggerakkan perekonomian rakyat dan agar produk yang dihasilkan memiliki daya saing yang tinggi.

Adriana kembali mengingatkan, penyelesaian masalah Papua, terutama dengan membangun dialog diantara segenap *stakeholders*, harus segera dilakukan. Jika tidak, situasinya akan terus memburuk dan keutuhan NKRI terus terganggu, apalagi jika ada pihak-pihak yang berupaya menggagalkan dukungan internasional. [EP/NS]





Agustina Basik-Basik
(Anggota DPD RI)

Jakarta, (Swantara) – Anggota DPD-RI Agustina Basik-basik menilai, nasionalisme Indonesia saat ini lebih banyak berada di tataran retorika akibat ulah sejumlah tokoh elit masyarakat dan bangsa yang sering tidak bisa diteladani atau dijadikan panutan. Menurutnya, konflik yang sering terjadi banyak disebabkan oleh ketiadaan contoh dan teladan dari para elit pemimpin.

Seharusnya, menurut Agustina, mereka yang menyimpang dari falsafah Pancasila, hukum, atau perundang-undangan, dikenakan sanksi. Ketidaktegasan terhadap pelanggaran aturan atau pembiaran-pembiaran akan membuat hukum menjadi tumpul, pada gilirannya pupuslah nasionalisme. “Jadi tidak heran jika terjadi aksi-aksi anarkis di daerah maupun di pusat yang merambah segenap lapisan usia, dewasa, mahasiswa, dan siswa SLTA, SLTP bahkan SD,” tandasnya.

Lebih jauh Agustina menuturkan, sebenarnya apa yang dicita-citakan para pendiri bangsa sangat luhur dan mulia, yakni mewujudkan cita-cita mendirikan bangsa merdeka dan berdaulat di

Nasionalisme Indonesia Hanya Retorika?

tengah keanekaragaman dan kemajemukan yang dimilikinya. Negara Indonesia sudah melewati beberapa rezim, Orde Lama, Orde Baru dan kini Orde Demokrasi yang ditandai semangat reformasi.

“Ironisnya, sebagian orang tidak lagi menggantungkan program-program atau kebijakan pada dasar dan ruh Pancasila. Pancasila malah seolah-olah dibiarkan sendiri, terasing di atas menjadi menara gading. Sementara amanat yang tertuang di kelima sila tidak diamalkan. UUD 1945 hanya ungkapan retorik yang tidak dijadikan rujukan, sering dilupakan begitu saja” kata Agustina Basik-Basik.

Solusi bagi Nasionalisme

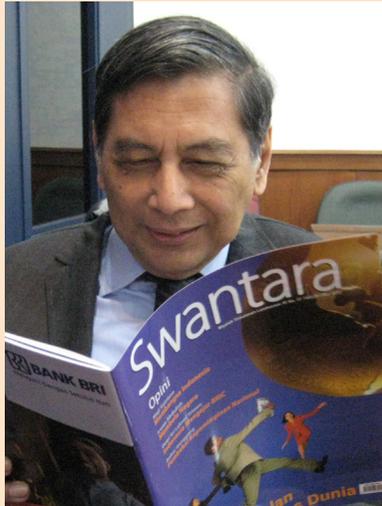
Anggota DPD asal dari Papua tersebut-pun memberikan solusi yang menurut dia bisa dijadikan jawaban atas permasalahan menipisnya semangat nasionalisme. “Yang harus dilakukan untuk meningkatkan rasa nasionalisme dimulai dari orang tua, yang diucapkan harus sejalan dengan tindakan, penegakan hukum, dan kalau terbukti melanggar hukum, terhadap siapapun hendaknya tidak pandang bulu, harus ada sanksi. Jangan sampai menggantung dan akhirnya dilupakan begitu saja karena tertutupi isu lain yang lebih seksi. “Tapi jangan salah, masyarakat tetap mencatatnya, Itulah yang

terjadi di Papua,” terang Agustina.

“Ada kejadian-kejadian dimana pemerintah harus bertindak tegas dan cepat”. “Ketika aparat dinilai melakukan kesalahan, pemimpin harus mampu bertindak dan memberikan sanksi. Artinya pemimpin harus berwibawa. Kalau tidak, ia tidak akan mampu menjatuhkan sangsi”. “Akhirnya, tutur Agustina, api pun mulai menyala di Papua, tidak tahu siapa yang harus disalahkan” kata Agustina menanggapi berbagai permasalahan yang terjadi di Papua.

Berbicara seputar nasionalisme, Agustina berpandangan bahwa nasionalisme selalu terkait dengan cinta tanah air dan komitmen untuk selalu menjaga NKRI. Namun menurutnya, ada syarat yang harus dipenuhi, yaitu pemerintah harus berbuat banyak mengatasi berbagai permasalahan dan harus mampu memberikan contoh dan teladan.

Pada bagian lain, Agustina mengimbau agar perayaan Proklamasi Kemerdekaan RI harus dapat dinikmati oleh seluruh rakyat. Yang menarik, sebagai wujud cinta tanah air, Agustina menyarankan agar gaji bulan Agustus para pejabat negara disumbangkan untuk perayaan kemerdekaan RI. “Ini bisa menjadi panutan bagi masyarakat untuk mempertebal semangat nasionalisme,” kata Agustina menambahkan.^[EP/FE/NS]



Prof. Dr. Juwono Sudarsono, M.A.

Jakarta, (Swantara) – “Konflik horizontal yang sering terjadi, misalnya tawuran antar siswa, desa, antargeng, suku atau aksi-aksi anarkis lainnya terutama yang kerap melibatkan kaum muda di negeri ini, bukan sesuatu yang muncul begitu saja, sehingga tidaklah salah jika kita mengingat pepatah lama, ‘Ada Gula Ada Semut’, tidak ada akibat kalau tidak ada sebab,” kata mantan Menteri Pertahanan, Prof. Dr. Juwono Sudarsono M.A.

“Mungkin saja aksi-aksi tersebut mencerminkan jeritan nurani (perlawanan-red) anak-anak muda di negeri ini,” tutur Juwono seraya menambahkan, penyebabnya antara lain karena jumlah penduduk usia muda Indonesia lebih besar ketimbang penduduk berusia tua, ditambah lagi akibat kemajuan teknologi informasi.

Dibandingkan dengan penduduk berusia tua, lanjutnya, jumlah penduduk berusia muda lebih banyak, yakni hampir mendekati 70 persen. Tahun kelahiran mereka rata-rata pada 1981 ke atas sehingga kelompok

Cari Penyebab Konflik

usia tersebut sudah mengalami era keterbukaan yang dimulai pada tahun 1998. Di sisi lain, penggunaan teknologi komunikasi seperti ponsel dan media sosial membludak, sehingga keterbukaan yang tak terkendali terjadi di mana-mana terutama di kaum muda seluruh Indonesia, termasuk mereka yang menganggur,” tutur Juwono.

Menurut Juwono Sudarsono, penciptaan kesempatan kerja adalah salah satu solusi untuk meredam gejolak kaum muda, agar tidak salah arah. “Jadi gejolak-gejolak ini sepertinya luapan teriakan nurani anak-anak muda yang tidak memiliki pekerjaan. Oleh sebab itu, kita harus menciptakan kesempatan kerja, terutama di kalangan anak-anak muda di kota-kota besar yang dipadati penduduk usia muda. Jadi tidak mungkin penyelesaiannya hanya dengan tindakan represif oleh polisi, TNI atau aparat penegak hukum lainnya. Kita harus membiarkan secara bertahap dinamika ini mengalir. Yang penting adalah ada program nyata untuk memberikan mereka pekerjaan,” jelas Juwono.

Pendekatan Persuasif Efektif

Selain menciptakan lapangan pekerjaan pada kaum muda, bangsa dan pemerintah juga harus memberikan solusi yang lebih tepat sasaran. Salah satunya adalah pendekatan persuasif efektif. Orang yang tidak bekerja, merasa tidak memiliki harapan, dan pemikiran itu sekarang menghantui anak-anak muda Indonesia,

khususnya anak muda yang berusia di bawah 30 tahun. Kelompok anak muda yang menganggur mudah dirasuki, karena merasa terpinggirkan, terlecehkan sehingga ormas-ormas, seperti FPI, FBR kerap memakai bendera suku atau agama sebagai alasan untuk melontarkan keputusan mereka. Sebetulnya kalau ada program-program nyata untuk menyantuni mereka, itu bisa dikurangi atau bahkan dicegah. Tapi gejala semacam ini ada di setiap negara, seperti Meksiko, India, China sekalipun memiliki gejala semacam itu,” tutur Juwono.

Terkait dengan maraknya aksi-aksi tawuran, perkelahian dan aksi-aksi unjuk rasa, Juwono memberikan salah satu contoh yang terjadi di China yang digembar-gemborkan ekonominya memiliki kemajuan pesat. “Di China, dalam kurun waktu satu tahun terakhir ini ada 400 ribu kasus-kasus unjuk rasa dan aksi perusakan, akibatnya, anggaran yang dialokasikan untuk polisi lebih besar ketimbang militernya untuk mengatasi aksi-aksi kekerasan dan perusakan yang dilakukan oleh kalangan muda. Aksi-aksi di China itu juga terjadi karena penduduk usia muda terlalu banyak yang tidak tertampung oleh kemampuan ekonomi China yang digembar-gemborkan tumbuh pesat. Langkah kongkrit yang harus dilakukan adalah

menyadarkan orang-orang kaya agar mereka membantu saudara-saudaranya yang miskin, yang kedua menyabarkan orang-orang miskin bahwa suatu saat kehidupan mereka akan lebih baik. Jadi ada dua strategi, menyadarkan orang kaya dan menyabarkan orang miskin.

"Ini satu-satunya jalan karena sekarang ini ekonomi kita lagi tumbuh, hanya untuk kalangan menengah atas, kelompok profesional dan orang-orang terdidik. Kalau warga kelas bawah memang masih hidup di bawah garis kemiskinan, makanya terjadi tawuran atau aksi perampasan di jalanan karena mereka merasa tidak memiliki harapan dan sudah tidak punya apa-apa lagi, akibatnya, mereka terpaksa melakukan aksi radikalisme.

Juwono juga menilai, praktek korupsi dapat meruntuhkan kepercayaan pada penegakan hukum, karena orang tidak akan percaya dan tidak akan patuh, jika pejabat yang di atas, baik sipil, militer, polisi korup atau berarti tidak melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya dengan baik. "Tugas utama mereka adalah untuk menciptakan pemerataan kesempatan tapi jika mereka yang terkait dalam penegakan hukum justru terlibat kasus korupsi, jual beli perkara atau tindakan melawan hukum jadinya bagaimana," kata Juwono.

Terkait perayaan hari kemerdekaan Indonesia yang tidak lama lagi akan dihelat, Prof. Dr. Juwono Sudarsono, M.A. tidak

terlalu pesimis. "Saya tidak terlalu pesimis, karena orang-orang yang lahir setelah tahun 80-an yang sekarang umurnya 25 tahun ke bawah atau di bawah 30 tahunan, itu tidak begitu merasakan penderitaan dan pengorbanan generasi 1945, jadi jangan terlalu berharap. Tapi yang bisa kita tularkan sebagai semangat adalah bahwa bangsa ini masih setia pada prinsip-prinsip dasar Pancasila, supaya orang tidak ke luar dari jalur itu seperti keinginan untuk mendirikan negara agama. "Kalau mau menggunakan model China sebagai acuan boleh-boleh saja, yang penting tetap bangsa Indonesia," pungkas Juwono. [FE/NS]



Rektor UI Diganti oleh Dirjen Dikti

Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi dan Kebudayaan Djoko Santoso ditunjuk sebagai pejabat sementara Rektor Universitas Indonesia per 14 Agustus 2012. Menurut Bagir Manan, Anggota Majelis Wali Amanat (MWA) Universitas Indonesia, surat keputusan dari Mendikbud tentang penunjukan Djoko Santoso sesuai dengan harapan MWA. Dengan adanya keputusan Mendikbud, mulai 14 Agustus, Djoko langsung menjalankan tugas rektor, bersamaan dengan habisnya masa jabatan Rektor UI sebelumnya yaitu, Gumilar R. Somantri. Tugas utama pejabat sementara rektor adalah menyelenggarakan pemilihan rektor definitif untuk periode 2012-2017. [Koran Tempo]

Menteri BUMN Jamin Proyek Monorel Tak Akan Terbengkalai

Menteri BUMN Dahlan Iskan, menjamin proyek pembangunan monorel di Jakarta tidak akan terbengkalai. Proyek pembangunan yang akan digarap oleh PT Adhi Karya TBK tersebut, akan dimulai setelah mendapat persetujuan dari Pemerintah DKI Jakarta. Proyek yang diperkirakan menelan investasi hingga Rp.3,73 triliun tersebut akan dikerjakan selama 2 tahun 6 bulan, dengan total panjang 13 kilometer, dan akan mulai beroperasi pada 2015. Trayek pertama yang dijuluki Jalur Hijau, meliputi kawasan Rasuna Said – Gatot Subroto – Sudirman – Senayan – Pejompongan. Sedang rute kedua, disebut Jalur Biru, melewati Kampung Melayu – Casablanca – Tanah Abang – Roxy. Setiap jamnya, kereta ringan ini bisa mengangkut 3.500 orang dengan tarif Rp.7.000,-. [Koran Tempo]

Instalasi Buruk dan Pencurian Listrik Masih Marak

Pemeriksaan instalasi listrik di rumah atau tempat usaha yang menjadi tanggung jawab PT Perusahaan Listrik Negara (Persero), masih sulit dilakukan bahkan kerap ditolak warga. Di sisi lain, pencurian listrik dan penggunaan alat kelistrikan tidak standar masih banyak terjadi. Padahal listrik menjadi penyebab utama kebakaran di DKI Jakarta. Data kejadian bencana kebakaran 2007 sampai 2011 di Jakarta bahkan menunjukkan ada peningkatan. [Kompas]



Purnomo Yosgiantoro
Menteri Pertahanan dan Keamanan RI

Nilai-Nilai Murni Kebangsaan Tidak Boleh Bergeser

Jakarta, (Swantara) – Penyesuaian nilai-nilai kebangsaan terhadap pengaruh dari luar (*exogenous*) bisa saja dilakukan, namun nilai-nilai murni (*indigenous*) yang berasal dari akar budaya bangsa harus terus dipertahankan, tidak boleh bergeser, kata Menteri Pertahanan Ir. Purnomo Yusgiantoro, M.Sc, MA, Ph.D.

“Pengaruh dari luar harus disikapi, jadi jika nanti ada yang berubah, cukup dilakukan dengan penyesuaian terhadap hal-hal yang diperlukan dalam perjalanan dan kehidupan bangsa, namun nilai-nilai hakiki harus terus dijaga,” ujarnya.

Purnomo mengungkapkan, dalam sejarah perjalanan bangsa Indonesia, semangat nasionalisme lahir pada

saat pendirian Budi Utomo pada 2008 walaupun pemikiran mengenai nasionalisme itu sendiri sudah muncul sejak lama, kemudian diperkokoh dengan deklarasi Sumpah Pemuda pada 28 Oktober 1928.

Menurut Purnomo, ia setuju jika sikap nasionalisme generasi muda perlu dipertebal lagi, namun ia juga tidak merasa pesimistis bahwa bangsa Indonesia akan terpecah-belah seperti yang terjadi pada Uni Soviet. “Buktinya kita masih mampu mempertahankan NKRI,” ujarnya.

Menjawab pertanyaan tentang mudahnya masyarakat tersulut aksi-aksi kekerasan atau bertindak anarkis akhir-akhir ini, Purnomo mengharapkan agar masyarakat memahami, di satu sisi ada proses demokratisasi

yang menampung keterbukaan, informasi dan opini, namun di sisi lain harus disadarkan pula bahwa keterbukaan dan kebebasan juga ada batasnya. “Kebebasan harus dalam bingkai demokrasi, mesti ada rambu-rambunya,”

Yang paling penting dilakukan, menurut Purnomo, adalah penegakan hukum. Keadilan untuk semua (*Justice for all*). Jadi kalau ada yang melanggar Undang-Undang, harus dihukum, walaupun di sisi lain, sikap persuasif, penyadaran dan pencerahan juga harus terus diupayakan.

Menjawab pertanyaan mengenai potensi ancaman separatisme seperti yang terjadi dalam kasus-kasus kekerasan di Papua akhir-akhir ini, Purnomo menilai, hal itu tidak perlu dibesar-besarkan karena secara umum wilayah itu masih dalam keadaan tertib sipil. Gangguan keamanan yang terjadi masih bisa diatasi oleh aparat teritorial, belum memerlukan penempatan pasukan dari wilayah lainnya.

“Ya ada satuan dari luar wilayah yang diperbantukan, jumlahnya sekitar empat battalion, tetapi itu untuk menjaga perbatasan, sementara penanganan keamanan misalnya terhadap gangguan kelompok OPM, cukup ditangani aparat teritorial dan jika ranahnya masuk dalam tindak pidana atau kriminal, akan ditangani polisi,” kata Purnomo.

Menhan juga tidak melihat adanya intervensi asing di balik berbagai aksi kekerasan di Papua, walaupun ada kelompok misalnya *Internasional Parliamentary for West Papua* pimpinan Benny Wenda yang bergiat di Australia dan menghendaki pemisahan diri dari Indonesia. Yang mendukung kelompok tersebut hanyalah Partai Hijau, bukan pemerintah Australia. Meskipun pemerintah Australia memiliki satu suara, seperti juga di Indonesia, pandangan LSM atau satu partai dan lainnya

bisa saja berbeda-beda dan mereka ini yang memberikan persepsi keliru pada OPM seolah-olah dunia internasional mendukung mereka.

“Gerakan politik khususnya yang mengusung aksi separatisme dari NKRI, kecil sekali, misalnya mereka mencoba menggelar konferensi intrenasional di London, tetapi gaungnya tidak ada,” tutur Menhan seraya menambahkan,

Mengenai akar penyebab konflik di Papua, menurut Purnomo, penyebabnya bermacam-macam, misalnya antara masyarakat di pegunungan dan pesisir, juga akibat perseteruan politik dalam pilkada, pelaksanaan Otsus, ketimpangan ekonomi, perebutan lahan atau lingkungan, atau konflik yang terjadi antara buruh majikan dalam konteks kegiatan penambangan oleh *Freeport* dsb.

Contohnya, kata Menhan, ampas dan residu yang dihasilkan oleh *Freeport* yang dialirkan melalui Sungai Agua kemudian diperebutkan oleh para penambang liar berasal dari berbagai suku sehingga menimbulkan konflik di antara mereka, apalagi masuk pula pendatang dari luar. “Sekarang masalah ini selesai setelah Gubernur mengeluarkan Perda yang mengatur tambang rakyat tersebut.

Yang perlu dilakukan saat ini, menurut Menhan, adalah memperbaiki perekonomian untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua. Potensi Papua sangat besar, dan sekarang sudah dilakukan Otsus, termasuk juga pendanaan dari APBD, sementara penduduknya hanya tiga juta jiwa. Jika ditangani dengan baik, masa depan Papua sangat menjanjikan,” ujarnya.^[EH/NS]

Pemerintah Kolombia Jajaki Perundingan Damai

Bogota, - Presiden Kolombia Juan Manuel Santos Senin mengonfirmasikan, pemerintahnya telah mulai melakukan “diskusi-diskusi penjajakan” dengan pemberontak kiri Angkatan Bersenjata Revolusioner Kolombia (FARC) untuk meletakkan kerangka landasan bagi proses perdamaian. “Sejak pemerintah saya berkuasa, saya menghormati kewajiban konstitusional saya untuk mengusahakan perdamaian, dan kami telah melakukan perundingan awal dengan FARC, untuk berusaha mengakhiri konflik,” kata Santos dalam pidato nasionalnya. Presiden tidak mengatakan tempat penyelenggaraan diskusi-diskusi itu atau siapa persertanya, tetapi menyatakan hasil dari perundingan akan diumumkan dalam beberapa hari ke depan. Rangkaian perundinganterakhir antara pemerintah dengan pemberontak FARC dilakukan pada 2002. Pihak berwenang menghentikan perundingan itu, menuduh pemberontak mengambil kesempatan dari demiliterisasi daerah-daerah negara itu untuk membangun kembali pasukan mereka. [Antara]

Komnas Ham Keluarkan Rekomendasi Isu Sampang

Jakarta,- Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mengaku telah melakukan pemantauan dan penyelidikan pada Januari 2012 lalu, bahkan telah mengeluarkan rekomendasi kepada Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Kabupaten Sampang, Kapolres Sampang dan Pemprov Jawa Timur terkait persoalan kelompok Syiah dan anti-Syiah. Ketua Komnas HAM Ihdhal Kasim, saat jumpa pers di Kantor Komnas HAM, Jakarta, Selasa, mengatakan, rekomendasi Komnas HAM yang dikeluarkan pada Januari 2012 adalah meminta kepada para pihak agar memberikan perhatian khusus terhadap permasalahan tersebut karena berpotensi menimbulkan konflik. “Komnas HAM juga meminta agar aparat memberikan perlindungan keamanan serta menciptakan rasa aman bagi masyarakat serta meminta pertanggungjawaban secara hukum para pelaku pembakaran atau tindak kekerasan lainnya guna memberikan efek jera agar tidak terjadi tindakan serupa dikemudian hari,” katanya. [Antara]



Andreas Harsono

Berikut ini adalah wawancara atau tanya-jawab (T,J) antara SWANTARA dengan tokoh pers, Andreas Harsono seputar aksi-aksi kekerasan dan praktik korupsi yang marak serta dampaknya terhadap rasa cinta bangsa atau nasionalisme Indonesia.

(T) Berdasarkan pengamatan bapak, apa yang melatarbelakangi maraknya aksi aksi kekerasan di Indonesia?

(J) *World Bank* pernah membuat riset soal tawuran pada 2009. Laporan tersebut berjudul *“Understanding Violent Conflict in Indonesia.”* Mereka menulis empat hal dalam laporan tersebut. Pertama, mereka tentu mendaftarkan ribuan kasus yang mereka teliti memakai metode campuran,, mulai dari liputan media hingga studi lapangan, tawuran tanpa atau dengan jatuhnya korban nyawa.

Komponen kedua, mereka melihat rutinitas konflik, termasuk *“lynching”* atau aksi pengganyangan, termasuk terhadap kaum minoritas lewat isu agama. Mulai dari isu yang dimunculkan lewat jargon

Penegakan Hukum dan HAM Pertebal Nasionalisme

seperti “gereja liar” hingga “aliran sesat dan menyesatkan.” Ratusan gereja di Indonesia ditutup dengan alasan perizinan yang diskriminatif. Begitu pula puluhan masjid Ahmadiyah, kelompok Syiah (khusus Madura) dan Sunni (khusus di daerah mayoritas non-Muslim) juga ditutup. Lalu terjadi pula konflik karena masalah tanah atau aksi-aksi kekerasan terkait politik lokal. Dua masalah ini sangat rutin terjadi di Indonesia. Mulai dari soal tanah untuk perkebunan maupun pertambangan. Konflik-konflik yang terjadi di Aceh, Ambon dan Papua juga sering dipicu oleh masalah tanah atau politik lokal terkait dengan perebutan kekuasaan, dari bupati sampai gubernur.

Komponen ketiga, mereka melihat *“escalation of violence”* atau peningkatan kekerasan. Persoalan agama, misalnya Ahmadiyah, dari sekedar beda cara melihat teologi bisa berujung dengan pembunuhan. Ketidaksukaan warga setempat terhadap pendatang yang dianggap mengambil pekerjaan putra daerah juga bisa berujung dengan aksi-aksi pembunuhan, yang menelan sejumlah korban. Ini fenomena menarik pasca Soeharto.

Komponen keempat yang mereka pelajari adalah *“de-escalation of violence”* soal bagaimana kekerasan tersebut menurun. Ada macam-macam faktor, termasuk kejenuhan terhadap kekerasan. Menariknya, faktor penegakan hukum termasuk yang tak membantu banyak penurunan kekerasan. Penegakan

hukum di Indonesia dinilai lemah. Saya kira riset tersebut menarik dibaca dengan cermat untuk mengetahui penyebab terjadinya aksi-aksi kekerasan tawuran atau aksi anarkis lainnya di Jawa, Sumatra, Kalimantan, Sulawesi, kepulauan Maluku, Papua atau wilayah lainnya.

(T) Apakah hal-hal tersebut bisa menyulut potensi lunturnya rasa nasionalisme bangsa Indonesia?

(J) Ada beberapa studi menarik soal nasionalisme. Mulai dari Benedict Anderson sampai Jacques Bertrand. Dalam buku klasiknya, *Imagined Communities: Reflections on the Origin and Spread of Nationalism*, Anderson menulis bahwa “negara-bangsa” adalah sebuah pemahaman tentang komunitas maya. Sebuah komunitas nyata adalah sebuah tempat di mana warganya saling mengenali sebagian besar warga lain. Dalam “negara-bangsa” atau “komunitas maya”, warga tidak mengenal sejumlah besar warga lainnya. Tapi justru itulah letak daya gaib nasionalisme.

Namun luntur atau tidaknya nasionalisme tidak perlu dikuatirkan karena memang naik-turun sesuai mood masyarakat,terkadang mereka kesal namun pada kesempatan lain mereka menyukai masyarakat dimana mereka tinggal. Buat saya, nasionalisme ibarat menonton sepakbola, kadang kita sebal dengan klub kesayangan kita, lalu suka pada klub lain. Mungkin dulu suka AC Milan, sekarang suka Barcelona, tapi

kelak menyukai klub AC Milan.

(T) Jika sudah demikian, apa yang harus dilakukan pemerintah sebagai pengayom dan pelindung masyarakat? Dan apa yang harus dilakukan oleh masyarakat sebagai warga negara?

(J) Saya kira paling penting adalah meningkatkan pengetahuan dan wawasan para pegawai dan pejabat negara, mulai dari sipil sampai aparat keamanan, tentara sampai politisi, agar pengetahuan

mereka meningkat. Salah satu persoalan negara Indonesia adalah lemahnya birokrasi serta meruaknya praktik korupsi. Ada beberapa studi menunjukkan mandegnya reformasi birokrasi di Indonesia. Soal korupsi sudah tak perlu dibahas bukan? Tak perlu membaca riset bila mau bicara korupsi. Cukup korupsi diperangi saja! Semua orang juga tahu tingkat korupsi di Indonesia.

(T) Bagaimana cara membangkitkan kembali

pujanya rasa nasionalisme ?

(J) Buat saya paling penting adalah keadilan, penegakan hukum bermutu, penghormatan kepada hak asasi manusia. Bila semua tersebut dijaga dengan bermutu, nasionalisme hanya perkara efek saja. Ibarat klub sepakbola, bila manajemen bermutu, tak sulit mencari penggemar Real Madrid, Barcelona atau Manchester United. Bahkan bisa lintas negara. Gus Dur bilang, "Gitu saja kok repot!"^[EP/FE/NS]



Tarman Azzam
Ketua Dewan Kehormatan PWI

Tradisi Pers, Tradisi yang Berakar Pada Pancasila

"Kita harus bersatu dan membangun nasionalisme agar NKRI tetap tegak, dan menjadikannya sebagai harga mati"

Menjelang hari kemerdekaan, banyak kalangan, mulai dari petinggi negara, akademisi, politisi dan masyarakat beramai-ramai membicarakan soal nasionalisme. Dalam perbincangannya tersebut ada evaluasi, penilaian kinerja dalam menumbuhkan dan mempertahankan nasionalisme. Yang pasti, sejumlah komponen bangsa ini sedang gundah dan bertanya-tanya. "Sejauh mana nasionalisme masih ada dalam diri bangsa Indonesia?"

Ketua Dewan Kehormatan PWI, Tarman Azzam berpendapat, "Bicara nasionalisme, berarti bicara bentuk negara". "Sebenarnya

masalah ini sangat *debatable*, karena dalam sejarah tidak ada yang permanen dan yang abadi. Suatu negara bisa bangkit, besar dan menjadi hebat, tapi sebaliknya, bisa juga runtuh. Contohnya, Romawi adalah kerajaan besar, namun hanya bertahan tidak lebih dari sepuluh abad. Di China terjadi perang saudara selama berabad-abad, rezim silih-berganti, baru Mao Tse Tung yang bisa memersatukan seluruh Cina dengan melakukan aneksasi Tibet, Xinjiang (Sinkiang) dan Manchuria. Tapi itu juga bukan final, karena masih ada masalah mengenai Hongkong dan Macau yang harus diselesaikan. Jadi sejarah tidak ada yang permanen. Di Lemhannas juga saya sampaikan, tidak ada negara yang permanen.

Ideologi juga bisa berubah. Jadi kalau kita berpikir NKRI harga mati dalam pengertian nasionalisme untuk membangun semangat, menjaga kesatuan nasional, perlu ada pemikiran dan harus terus digulirkan, gagasan mengenai nasionalisme untuk menjaga NKRI. Jika NKRI lemah, pada gilirannya, nasionalisme dan patriotisme kita juga rontok," tutur Tarman.

Pada bagian lain Tarman menilai, kebebasan pers bukanlah ancaman terhadap keberlangsungan Indonesia dan ketahanan nasional Indonesia. Menurut dia, justru faktor kepemimpinan nasional yang akan mempengaruhi kuat tidaknya ketahanan nasional dan nasionalisme bangsa. "Jika kepemimpinan nasional lemah,

Laporan Utama

ragu-ragu, tidak bisa mengambil keputusan tepat dan tidak mampu mengayomi dan menyejahterakan rakyat, disitulah ancaman terhadap nasionalisme dan ketahanan nasional,” Tarman menambahkan.

Terkait kebebasan pers membangkitkan rasa kebangsaan masyarakat dan pemerintah Indonesia, Tarman menjelaskan, sudah baik, khususnya dalam proses demokrasi. Namun insan pers juga tetap harus menghormati rambu-rambu hukum dan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. “Wajar kalau pers buka-bukaan, asalkan tidak melanggar hukum, tidak melakukan fitnah dan tidak melakukan kebohongan publik.” Tarman juga menjelaskan, “Dalam undang-undang pers disebutkan, pers wajib menyiarkan seluruh peristiwa dan opini dengan menghormati norma agama, rasa susila masyarakat dan azas praduga tidak bersalah. Selama tidak bertentangan dengan ini, *go ahead*. Silakan wartawan menyiarkan suatu berita atau peristiwa.”

Mengenai misi bersama media dan negara, Tarman menjelaskan

bahwa media memiliki semangat, sementara pemerintah adalah produk demokrasi yang bertugas menyejahterakan rakyat. Oleh karena itu, pemerintah harus dikontrol oleh parlemen yang juga merupakan produk demokrasi. Ketidakharmonisan yang terjadi antara pemerintah dan perlemen dapat mengakibatkan negara terancam dan rakyat dirugikan. Untuk alasan itulah, pers harus melakukan kontrol terhadap kedua produk demokrasi tersebut. “Pers alat demokrasi yang bukan bagian dari produk. Pers menjadi alat karena dia lahir dari rakyat, rakyatlah yang membuat pers, rakyatlah yang mengontrol negara tadi, baik pemerintah maupun parlemen. Oleh karena itu, penting sekali peran pers dalam negara. Demokrasi bebas adalah ciri demokrasi, kalau pers tidak bebas, tidak ada demokrasi, negara bersikap otoriter,” kata Tarman.

“Kesimpulannya, kita memiliki kebebasan pers yang akan memberikan banyak manfaat bagi bangsa dan negara. Negara-negara

yang menghormati kemerdekaan pers, berdasarkan fakta sejarah, menikmati kemakmuran, karena mereka bisa membangun rasa cinta rakyat dan pemimpin”. Tarman juga menjelaskan bahwa pers di Indonesia belum sepenuhnya bisa disebut pers bebas, “Sejumlah pejabat tidak siap mengungkapkan fakta yang diketahuinya, padahal hal itu penting untuk rakyat banyak. Kalau ditanya mengenai tugas dan tanggungjawab yang menjadi otoritasnya, ada yang malah marah. Yang paling penting, tradisi yang dibangun oleh pers adalah tradisi yang berakar pada Pancasila. Bagi Tarman, pers harus mampu menjelaskan makna sila demi sila dalam Pancasila, karena masih banyak masyarakat yang belum memahaminya dengan benar.”

“Kita harus bersatu dan menjadikan NKRI sebagai harga mati, untuk itu kita harus terus berjuang membangun nasionalisme,” demikian Tarman menambahkan.^[EP/NS]



Jakarta (Swantara) - Hasyim Muzadi menilai, semangat nasionalisme bangsa Indonesia seharusnya tercermin dalam pengamalan nilai-nilai luhur yang tertuang dalam Pancasila khususnya sila kedua Pancasila yakni Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab yang saat ini terasa semakin memudar. Kegusaran seorang Hasyim Muzadi ini, berangkat dari pengamatan panjang terhadap dinamika kehidupan bangsa yang mulai menyimpang dari nilai – nilai luhur Pancasila dan seolah – olah “dibiarkan” oleh berbagai komponen bangsa.

“Anehnya, penyimpangan-penyimpangan yang terjadi tidak diantisipasi dengan cepat dan sigap, malah seolah-olah terjadi pembiaran-pembiaran”. Sebagai akibatnya, nilai-nilai Pancasila juga tergerus dan muncul ancaman disintegrasi. Muzadi mencontohkan bahwa aksi-aksi separatisme di Papua terhadap Persatuan Indonesia yang merupakan sila ketiga, disebabkan oleh kurang diamalkannya sila keempat, Pancasila : Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Menurut-nya, aksi – aksi separatisme muncul sebagai akibat kebijakan-kebijakan yang kurang mencerminkan pengamalan sila keempat tersebut. Lebih jauh lagi, Muzadi menegaskan bahwa hal ini diakibatkan oleh kepemimpinan yang tidak lagi amanah terhadap semangat kemerdekaan, Pancasila dan sumpah jabatan yang dipanggulnya saat mengemban tugas negara.

Menurut Muzadi, penyimpangan-penyimpangan yang terjadi tidak muncul begitu saja, tetapi akibat sejumlah faktor, salah satunya, karena kekuasaan yang dimiliki oleh



Hasyim Muzadi

Membangkitkan Kembali Nasionalisme Yang Mulai Pudar

penyelenggara negara, tidak lagi mengalir untuk kepentingan rakyat, sebaliknya, sering disalahgunakan untuk kepentingan pribadi, kelompok atau golongan. Akibatnya, praktik-praktik korupsi, aksi anarki dan juga aksi separatisme oleh sekelompok warga di Papua misalnya, tidak dapat terhindarkan lagi. Hal itu diperburuk lagi dengan terjadinya transaksi atau jual-beli keadilan dan hukum yang membuat lunturnya pula kepercayaan pada penyelenggara negara.

Berbicara mengenai apa yang harus dilakukan bangsa ini, Hasyim Muzadi menegaskan bahwa diperlukan langkah konkrit yang harus dilakukan segera untuk mengatasi berbagai permasalahan bangsa. Perbaikan sistem peraturan dan perundang-undangan yang belum terintegrasi, yang tentu harus didahului oleh pengkajian

secara mendalam, merupakan langkah mendesak yang harus segera dilakukan. Bila dibiarkan berlarut-larut, korupsi, aksi anarkis dan separatisme tetap akan terus berlanjut karena lunturnya semangat nasionalisme.

“Perbaiki sikap kepemimpinan atau *leadership* secara optimal juga harus dilakukan agar kepercayaan rakyat pada pemimpinnya semakin tebal, dan agar mereka menyerahkan hak suaranya pada pemimpin yang mereka percayai, dan amanah untuk mensejahterakan rakyat”. “Jika dianggap renggang, hubungan antara rakyat dan pemerintah juga harus dimantapkan kembali”. Secara tegas Muzadi menyatakan bahwa pemimpin seharusnya tidak ada yang mengambil jarak terlalu jauh dari rakyat.

Berkaitan dengan perayaan

hari kemerdekaan RI ke-67, Hasyim Muzadi mengajak media massa, baik cetak maupun elektronik, juga segenap komponen bangsa termasuk masyarakat, untuk bersama-sama

merenungkan kembali rasa dan semangat nasionalisme dalam diri masing-masing. "Kita perlu mempertanyakan kembali semangat nasionalisme di tengah merebaknya praktik korupsi yang melibatkan

sejumlah anggota Dewan, Politisi dan Pemimpin bangsa, dan di tengah suasana bagaimana mudahnya orang tersulut aksi anarki akhir-akhir ini," demikian Hasyim Muzadi.^[EP/FE/NS]



Garin Nugroho
Sutradara

Aksi Kekerasan Bisa Kikis Nasionalisme

Jakarta, (Swantara) – Sutradara kondang, Garin Nugroho berpendapat, aksi-aksi anarkisme, premanisme dan berbagai bentuk pengadilan jalanan disamping meresahkan masyarakat, jika dibiarkan, bisa melunturkan rasa nasionalisme, padahal pemerintah sedang berupaya menuntaskan segudang persoalan lainnya.

Akhir-akhir ini, menurut dia, masyarakat kerap menyaksikan aksi perkelahian atau tawuran antarkomunal, antarpelajar maupun antara pelajar dan masyarakat di berbagai kota terutama ibukota, Jakarta. Tidak hanya, itu sekelompok masyarakat yang tergabung dalam ormas tertentu juga kerap melakukan tindak anarkis, disulut berbagai isu dan persoalan .

Situasi ini tentu berakibat meningkatnya keresahan dan ketidakamanan pada diri masyarakat dalam menjalankan aktivitas kesehariannya. Dengan kata lain, permasalahan kesejahteraan masyarakat belum tuntas, aksi-aksi premanisme muncul pula mengganggu kenyamanan kehidupan masyarakat.

Garin berharap, agar pemerintah meningkatkan penegakan hukum terhadap berbagai pelanggaran khususnya di ruang publik, karena jika tidak, kenyataan tersebut dapat menggoyangkan basis Pancasila yang sudah dibangun para pemikir-pemikir negara ini.

"Saya kira, kita perlu menerapkan sistem permainan sepak bola. Siapa yang terbukti melakukan pelanggaran dan kesalahan, harus segera diberi kartu. Khususnya orang atau kelompok yang kerap melakukan tindakan anarkis, termasuk melakukan pengadilan jalanan, harus segera diganjar kartu merah," papar Garin.

Hukum sebagai panglima selayaknya tidak hanya dijadikan wacana, tapi harus dilaksanakan. "Pengadilan jalanan bisa menjadi benih-benih retaknya nasionalisme di ruang sosial, persatuan dan sikap saling menghargai di tengah masyarakat. "Pengadilan jalanan dan semua aksi-aksi anarkis harus ditindak tegas oleh aparat yang berwajib, sesuai hukum dan perundang-undangan agar masyarakat terayomi dan memiliki rasa aman," demikian Garin menambahkan.^[FE/NS]

Pasca 67 Tahun Merdeka Menuju Kebangkitan Ekonomi Indonesia?

Oleh: Mudrajad Kuncoro*

Jakarta, (Swantara) – Arti penting nasionalisme sebagai perwujudan wawasan kebangsaan agaknya tidak perlu diperdebatkan, namun bila dewasa ini banyak tokoh mempertanyakannya, ini merupakan refleksi keprihatinan dan kewaspadaan terhadap bahaya disintegrasi maupun tergoncangnya persatuan nasional Indonesia.

Dalam dimensi ekonomi, nasionalisme ekonomi sering dikonotasikan dengan upaya mengisolasi perekonomian dari pengaruh-pengaruh asing. Hal ini bisa dipahami mengingat sebagian besar negara Dunia Ketiga baru saja lepas dari belenggu penjajahan.

Tahun 2012, merupakan tahun yang penuh momentum bagi perjalanan sejarah bangsa Indonesia, hanya memperingati HUT kemerdekaan RI ke-67, tetapi juga 104 tahun Kebangkitan Nasional, 84 tahun Sumpah Pemuda dan 14 tahun Reformasi. Di tengah gegap gempita perayaan hari kemerdekaan ke-67, pertanyaan yang mendasar untuk diajukan: Sudahkah Kita Merdeka? Merdeka dalam arti tidak hanya bebas dari penjajahan Belanda dan Jepang, namun “merdeka” dari kemiskinan, kebodohan, pengangguran, ketimpangan? Apakah momentum 104 tahun Kebangkitan Nasional sudah menunjukkan tanda-tanda ekonomi Indonesia mulai bangkit?

Bagi banyak anak bangsa di negeri dengan kekayaan sumberdaya alam yang melimpah ruah, ternyata 67 tahun pasca 17 Agustus 1945 belum sepenuhnya merdeka. Merdeka dalam arti tidak hanya bebas dari penjajahan



Belanda dan Jepang, namun “merdeka” dari kemiskinan, kebodohan, pengangguran, dan korupsi. Apa arah pembangunan dan reformasi Indonesia salah?

Wakil presiden RI, Boediono dalam buku “Ekonomi Indonesia Mau Kemana” (2009) mengatakan, Indonesia dinilai belum keluar dari zona aman meski arah pembangunan demokrasi sudah ‘on the right track’. Batas kritis bagi demokrasi adalah bila pendapatan per kapita mencapai US\$ 6.600 berdasarkan paritas daya beli.

Pada tahun 2012 ternyata Indonesia digolongkan oleh Bank Dunia sebagai negara berpenghasilan Menengah papan bawah. Posisi Indonesia bersama negara di kawasan Asia Timur dan Pasifik, yaitu Filipina, Kep. Marshall, Kep. Samoa, Kep. Solomon, Kiribati, Micronesia, Mongolia, Papua New Guinea, Timor Leste, Tonga, Vanuatu, Laos, dan Fiji. Posisi Indonesia diperkirakan akan terus bertahan hingga tahun 2020 sebelum masuk kelompok negara berpendapatan tinggi pada 2025.

Indonesia akan diproyeksikan mencapai pendapatan per kapita sekitar US\$ 14.900 pada tahun 2025, dengan penduduk mencapai 286 juta jiwa, berkat proses industrialisasi. Proyeksi optimistis ini akan menempatkan Indonesia masuk dalam lima besar perekonomian dunia dengan PDB sebesar US\$4,25 triliun.

Bagaimana dengan tingkat dan pola pertumbuhan ekonomi Indonesia? Tingkat pertumbuhan ekonomi Indonesia pada saat krisis 1998 tercatat mengalami kontraksi hingga negatif 13,1 persen. Sejak itu, Indonesia mengalami masa pertumbuhan ekonomi relatif rendah di bawah 6 persen per tahun. Tahun 2008 perekonomian Indonesia mampu mencapai tingkat pertumbuhan mencapai 6,3 persen rekor tertinggi setelah krisis ekonomi tahun 1998.

Di saat dunia terkena krisis keuangan global, ekonomi Indonesia masih mampu tumbuh 4,5 persen pada 2009. Hanya tiga pasar yang terguncang akibat krisis 2008 yaitu pasar modal,

pasar valas, dan ekspor. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) sempat menembus di atas 2.800, namun anjlok drastis hingga 1.111. Kurs Rupiah yang stabil di sekitar Rp 9.000 -10.000 di era SBY sempat melemah terhadap dolar AS hingga hampir mencapai Rp 13.000; namun kini malah menguat menjadi sekitar Rp 9.500. Sementara ekspor mengalami penurunan hingga sekitar 30 persen selama Januari sampai April 2009 dibandingkan tahun sebelumnya.

Ada apa di balik goncangnya ketiga pasar ini? Penyebabnya karena sekitar 67 persen saham dan obligasi di Bursa Efek Indonesia dikuasai oleh para pemain/investor asing. Pasar valas ditentukan oleh permintaan dan penawaran akan valas. Menurunnya ekspor tidak dapat dipisahkan dengan fakta masih dominannya Jepang, AS dan Eropa sebagai tujuan ekspor komoditi kita, yang baru mengalami krisis dan pertumbuhan ekonomi negatif. Singkatnya, di ketiga pasar ini, kita masih "dijajah" oleh para pemain global yang seolah berperilaku seperti tangan gaib yang tidak kelihatan (*invisible hand*).

Pola pertumbuhan ekonomi Indonesia belum mengalami perubahan mendasar jika dilihat dari dimensi sektoral, pengeluaran, dan spasial. Bukti-bukti lebih rinci dapat dibaca dalam buku saya yang berjudul *Ekonomika Indonesia: Dinamika Lingkungan Bisnis di Tengah Krisis Global* (2009). Dari dimensi sektoral, meskipun mengalami pertumbuhan ekonomi yang rendah berkisar antara 3,5 hingga 7,7 persen, industri pengolahan telah menjadi penggerak utama PDB dengan kontribusi antara 23,6 - 28,65 persen, sementara sektor pertanian hanya menyumbang sekitar 15 persen sejak tahun 2000. Data triwulan I-2012 menunjukkan struktur ekonomi Indonesia masih didominasi sektor industri manufaktur (23,6 persen), diikuti oleh sektor pertanian-peternakan-kehutanan-perikanan (15,2 persen),

sektor perdagangan-hotel-restoran (13,5 persen), sektor pertambangan-penggalian (12,7 persen), dan sektor jasa-jasa (10,2 persen), serta sektor konstruksi (10,1 persen). Secara keseluruhan keenam sektor tersebut mempunyai andil peranan sebesar 85,3 persen dalam PDB.

Dari dimensi pengeluaran, kontribusi masing-masing permintaan agregat terhadap pengeluaran PDB tidak terjadi banyak perubahan: pola pertumbuhan Indonesia masih bercirikan *consumption driven growth*, pertumbuhan yang didominasi oleh konsumsi masyarakat. Konsumsi tetap mendominasi (55-57 persen dari PDB), diikuti investasi, pengeluaran pemerintah, dan ekspor bersih (ekspor dikurangi impor). Ini mencerminkan dominasi dan potret konsumsi rumah tangga Indonesia pasca krisis: tetap membeli mobil/sepeda motor, makan mie instant, tetap merokok untuk menghilangkan stress, asyik chatting dan surfing dengan jasa, nonton TV terus, sambil minum teh botol.

Dari dimensi spasial, pulau Jawa dan Sumatra masih menjadi penyumbang terbesar PDB Indonesia. Sumbangan aktivitas ekonomi di pulau Jawa dan Sumatra mencapai sekitar 80 persen terhadap PDB Indonesia. Artinya, kawasan Timur Indonesia hanya menyumbang sekitar 20 persen terhadap ekonomi Indonesia. Masalahnya, terjadi tren ketimpangan antarprovinsi dan kabupaten/kota yang cenderung meningkat pasca otonomi daerah 2001. PDRB per kapita yang tinggi terpusat pada daerah provinsi yang kaya sumberdaya alam serta daerah yang padat penduduk.

Pembangunan Inklusif dan Bebas Korupsi

Pertumbuhan ekonomi hanya mencatat peningkatan produksi barang dan jasa secara nasional, sedang pembangunan berdimensi lebih luas dari sekedar peningkatan pertumbuhan ekonomi.

Manusia seharusnya merupakan hakikat dari tujuan pembangunan, bukan hanya "kue pembangunan" dan "pertumbuhan kue". Sulit dikatakan ada pembangunan bila kemiskinan, pengangguran, anak busung lapar dan gizi buruk, dan ketimpangan masih substansial.

Pascakrisis 1998, tingkat pengangguran akibat PHK besar-besaran terjadi, demikian juga penutupan usaha. Tahun-tahun berikutnya angka pengangguran meningkat sampai menyentuh angka 10,28 persen pada tahun 2006, meski mulai turun menjadi 6,32 persen pada Februari 2012.

Relatif masih tingginya angka pengangguran menunjukkan indikasi bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia pasca krisis belum mampu menyerap tambahan kesempatan kerja baru dan mengurangi kemiskinan secara substansial. Inilah fenomena yang disebut *jobless growth*. Penyebabnya karena sektor penyerap tenaga kerja utama mulai menurun pertumbuhan dan pangsa terhadap PDB yaitu sektor pertanian dan industri.

Sudahkah Indonesia merdeka dari kemiskinan? Pada tahun 1997, kemiskinan di Indonesia menyentuh angka yang sangat tinggi yaitu sebesar 40,3 persen atau meningkat sebesar 22,6 persen dari tahun 1996.

Menurut data BPS, tingkat kemiskinan mengalami penurunan dari 16,66 persen di awal presiden SBY memerintah (2004) menjadi 14,15 persen di akhir pemerintahan Kabinet Indonesia Bersatu I (2009), bahkan menjadi 12,49 persen pada Maret 2012. Namun, patut dicatat bahwa masih ada penduduk miskin sebanyak 29,13 juta orang hingga Maret 2012. Jumlah kaum dhuafa yang belum "merdeka" dari jerat kemiskinan di perdesaan masih sebanyak 18,48 juta orang (15,12 persen dari jumlah penduduk Indonesia), sedangkan penduduk miskin di perkotaan tercatat sebanyak 10,65 juta orang (8,78 persen).

Salah satu indikator yang

populer untuk mengukur kinerja pembangunan manusia adalah HDI (Human Development Index) atau Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM merupakan indeks gabungan dari tiga indikator: longevity sebagai ukuran harapan hidup; pengetahuan (knowledge) yang diukur dengan kombinasi melek huruf dewasa dan gabungan dari rasio pendidikan tinggi primer, sekunder, tersier bruto; serta standar hidup layak (decent standard of living) sebagaimana diukur oleh PDB riil per kapita dalam paritas daya beli. Menurut Human Development Report 2010, IPM Indonesia sebesar 0,600, yang berada dalam peringkat 108 dari 169 negara yang disurvei oleh UNDP. Angka harapan hidup rakyat Indonesia mencapai 71,5 tahun. Rata-rata tahun bersekolah rakyat Indonesia hanya sebesar 5,7 tahun. GNI per kapita Indonesia hanya sebesar US\$3.957. Singkatnya, Indonesia masih berada dalam golongan medium human development. Dengan kata lain, belum seluruh rakyat dan daerah Indonesia “merdeka dari kebodohan dan ketertinggalan”.

Masih ada 183 kabupaten/kota yang tergolong sebagai daerah tertinggal, yang mayoritas berada di Indonesia bagian timur.

Sudahkah Indonesia merdeka dari korupsi? Menurut Transparency International (TI), korupsi adalah perilaku pejabat publik, politikus, pegawai negeri, yang secara tidak wajar/legal memperkaya diri atau memperkaya mereka yang dekat dengan dirinya dengan menyalahgunakan kekuasaan public yang dipercayakan. Indikator yang digunakan TI disebut Indeks Persepsi Korupsi (IPK) atau Corruption Perception Index (CPI), yaitu kumpulan persepsi ahli dan bisnis tentang tingkat korupsi di sektor publik. Dalam survei TI, selama 2000-2002, Indonesia termasuk dalam daftar 10 negara terkorup di dunia, namun sejak tahun 2003 Indonesia tidak lagi masuk dalam daftar tersebut.

Kendati IPK dan peringkat Indonesia membaik, rekor Indonesia masih di bawah negara-negara ASEAN. Pada tahun 2006, IPK Indonesia menempati peringkat ke-130 dari 163 dengan nilai IPK 2,4. Pada tahun 2007 sedikit membaik menjadi peringkat ke-143 dari 179 negara dengan nilai IPK 2,3. IPK Indonesia sedikit mengalami penurunan pada tahun 2010 menjadi 2,8, kendati dalam peringkat mengalami perbaikan menjadi nomor satu dari 178 negara.

Pada tahun 2010, Kabinet Indonesia Bersatu II menargetkan IPK mencapai 5 pada tahun 2014. Ini tidak mudah karena nilai terendah IPK nol dan tertinggi 10. Kasus Nazarudin, Bank Century, Gayus, mafia peradilan semakin membuktikan betapa tidak mudah memerangi korupsi yang sudah tersebar merata, multilevel corruption. Kalau dulu, korupsi di bawah meja, sekarang sudah di atas meja, bahkan mejanya pun dibawa. Kalau dulu hanya pemerintah pusat, sekarang menyebar ke daerah dari gubernur hingga lurah. Pelakunya pun beragam, dari politisi, wakil rakyat, pejabat bank sentral, hingga “penjaga gawang hukum” oknum polisi, jaksa, hakim, KPK.

Kebangkitan Ekonomi Indonesia?

14 tahun era reformasi ternyata belum banyak membawa perubahan di negeri ini. Pembangunan ekonomi kita sudah terbukti bertumpu pada pertumbuhan ekonomi yang tidak berkualitas, aspasial, bias ke kawasan barat Indonesia, dan hanya menguntungkan kelompok kaya di negeri ini. Dengan menyimak perkembangan kinerja ekonomi Indonesia selama 14 tahun terakhir barangkali sudah saatnya “reformasi” perlu dikaji ulang apa sudah berada dalam jalur “yang benar”?

Untuk mewujudkan hal tersebut, dibutuhkan tidak hanya policy mix makro, namun koordinasi dan sinergi

kebijakan fiskal-moneter dengan kebijakan sektoral dan daerah.

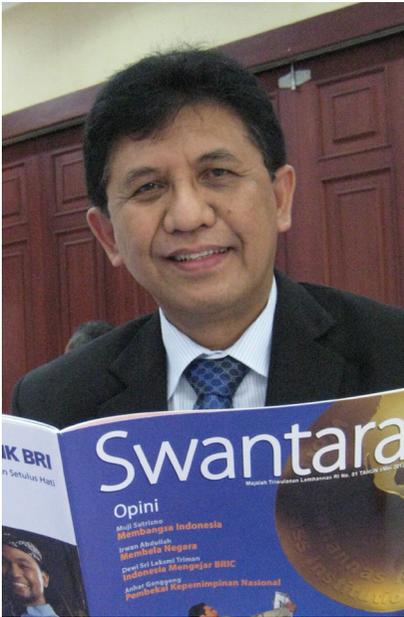
Ini karena pola perencanaan dan pembangunan Indonesia bersifat sektoral meski melibatkan 500-an kabupaten/kota serta 33 provinsi. Banyak kepala daerah mengeluh kurang dilibatkan dalam penyusunan kebijakan strategik level nasional. Kebijakan top-down masih berlangsung di tengah era desentralisasi.

Ke depan agaknya mekanisme perencanaan, anggaran, dan formulasi kebijakan perlu diubah agar tidak terjadi pembangunan yang cenderung ego sektoral maupun fanatisme daerah yang berorientasi jangka pendek dan proyek. Barangkali peran strategis wapres perlu ditingkatkan sekaligus sebagai ‘menteri koordinator’ yang menjalankan wewenang khusus dalam sinergi kebijakan sektoral, makro, dan daerah. Inilah pentingnya peran presiden dan wapres menjadi ‘dirigen suatu orkestra’ kebijakan makro, sektoral, dan daerah.

Kebangkitan ekonomi Indonesia sebagai bangsa yang besar dan disegani masih membutuhkan jalan panjang, berliku serta berlubang-lubang. Meski arah jalannya sudah ‘on the right track’ agaknya perlu pindah ke gigi yang lebih tinggi (shifting into the higher gear) mengejar ketinggalan dibanding negara lain. Kapan kita benar-benar merdeka dari kemiskinan, pengangguran, kebodohan, dan korupsi?

Inilah pekerjaan rumah kita yang belum tuntas di HUT kemerdekaan RI ke-67.^[NS]

* Prof. Mudrajad Kuncoro, Ph.D adalah guru besar ilmu ekonomi pada Fakultas Ekonomika & Bisnis UGM, editor in chief the Journal of Indonesian Economy & Business, pernah menjadi delegasi Republik Indonesia dalam Konferensi International Labour Organization ke-96 di Geneva (2007), Chief Economist Recapital Advisors (2008-2010), Anggota Tim Eksternal Pemantau Pelaksanaan Paket Kebijakan Perbaikan Iklim Investasi di Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (2006-2008), Tim Ahli Bidang Ekonomi Kadin (2007-2009), Tim Penyusun Kebijakan Pembangunan Industri Nasional (2006-2008).



Nasionalisme Harga Mati

Abdullah Sodik

Peserta Pemantapan Nilai-nilai Kebangsaan BP MIGAS

Jakarta, (Swantara) - Di tengah maraknya aksi-aksi perkelahian antarkelompok warga, antarkomunal, antarsiswa serta tindakan anarkis lainnya serta menjamurnya praktik korupsi, menjadi satu alasan kuat, pendidikan kewarganegaraan dan Pancasila perlu digalakkan kembali..

Hal ini dilakukan demi mempertebal kembali semangat nasionalisme dalam diri masyarakat dan bangsa yang majemuk ini. Dengan kata lain, kemajemukan dan kekayaan alam yang dimiliki bangsa Indonesia menjadi modal utama bagi bangsa untuk maju.

Oleh karena itu, perlulah pemerintah dan masyarakat duduk bersama untuk bermusyawarah, membicarakan ke arah mana negara dan bangsa ini akan dibawa agar para pemimpin dan tunas-tunas bangsa bisa seia-sekata untuk mencapai tujuan. Tentunya nasionalisme yang dibangun dari keberagaman budaya, ide dan pemikiran merupakan harga mati dalam kerangka NKRI.

Pendidikan adalah salah satu masalah utamanya. "Anak-anak sudah tidak mendapatkan lagi pelajaran budi pekerti. Di sekolah, anak diarahkan agar lulus ujian nasional dengan berbagai macam cara. Nah disinilah, sadar atau pun tidak sadar, mereka tidak lagi memiliki budi pekerti. Kedua, di tengah kemajuan media yang mudah diakses anak-anak, seringkali anak-anak mendapatkan contoh-contoh perilaku negatif dari tayangan-tayangan TV.

Para pemimpin masyarakat dan media massa hendaknya juga memberi contoh dan informasi yang

baik pada masyarakat agar tunas-tunas bangsa ke depan tidak ikut-ikutan meniru hal-hal buruk. "Misalnya anggota DPR yang berkelahi di tengah sidang atau rapat. Contoh-contoh yang tidak baik semacam inilah yang selanjutnya mudah ditiru oleh anak-anak atau siapapun ketimbang contoh yang baik-baik. Mestinya ada aturan penyiaran, entah bagaimana bentuknya, yang penting program tayangan-tayangan tertentu harus diatur jam tayangnya. Buktinya dulu, saat cuma ada satu stasiun TV yakni TVRI, banyak kejadian buruk yang tidak diketahui oleh anak-anak atau pun orang dewasa, sehingga orang tidak bisa meniru hal-hal yang buruk. Oleh karena itu, ketika anak-anak ini tidak mendapatkan pemahaman tentang budi pekerti di tengah tayangan media yang juga sering menampilkan contoh-contoh buruk, ditambah lagi dengan kesibukan para orang tua, anak semakin terlupakan dan hanya diawasi oleh pembantu rumah tangga yang berpendidikan rendah. Kalau pun ada komunikasi antara orang tua dan anak, cuma ala kadarnya, tidak memadai, baik mutu maupun intensitasnya.

Visi dan Misi yang Sama

Tidak hanya itu, di tengah berbagai persoalan yang menimpa bangsa Indonesia saat ini, menurut Sodiq, setiap komponen bangsa henaknya memiliki satu visi dan misi yang sama. "Sebagai contoh, ketika Jepang dibom atom, yang pertama mereka selamatkan adalah guru karena gurulah kelak yang akan mendidik dan menentukan masa depan negara. Oleh karena itulah, Indonesia harus memiliki *grand strategy* agar

seluruh komponen bangsa memiliki pemahaman bersama. "Sekarang ini saya melihat masyarakat tidak memiliki gambaran ke depannya akan seperti apa,"

Solusi yang pas dan strategi yang jitu adalah salah satu kunci yang tepat dalam mengatasi setiap masalah yang kerap menimpa bangsa ini. "Seandainya saya diberikan tanggungjawab membuat *Grand strategy*, akan saya kumpulkan seluruh komponen bangsa melakukan pemetaan dan kajian bersama untuk mencari solusi. Jangan sampai orang mencari solusi sendiri-sendiri sehingga hasilnya bertentangan antara satu dan lainnya.

Oleh sebab itulah, kita harus duduk bersama guna merumuskan, menentukan tujuan dan cita-cita yang sama, agar perjalanan kita sampai. Sebagai contoh pembangunan tembok China dilakukan oleh tiga generasi. Mustahil pemimpin setiap generasi tidak memiliki satu komitmen dan konsep yang sama. Sementara Indonesia tidak memiliki konsep semacam ini. Jika menginginkan Indonesia yang maju, jaya, harus jelas konsepnya. Masing-masing komponen bangsa, baik menteri, kalangan akademisi, LSM boleh menyampaikan pandangan dan konsep untuk dikaji dan diuji di dalam suatu forum musyawarah,"

"Nasionalisme tetap jadi harga mati. Kita sebagai bangsa Indonesia, memiliki pilar bersama yaitu NKRI, UUD 1945, Pancasila, dan Bhinneka Tunggal Ika. Semua itu lahir diawali dengan kemerdekaan. Lembaga-lembaga pendidikan dan juga Lemhannas yang memiliki fungsi mendidik, bisa menyampaikan tentang pilar-pilar tersebut dengan baik agar kita bangga sebagai bangsa Indonesia," pungkas Sodik.^[FE/NS]

MUSEUM



Ir. Budiyanto, M.Eng
PPSA XVIII

Tindakan Anarkis Bukan Budaya Timur

Jakarta, (Swantara) - Tawuran adalah tindakan anarkis, juga bukan berasal dari budaya masyarakat timur karena bangsa Indonesia sejatinya tidak akrab dengan kekerasan. Ekspresi yang dituangkan dalam bentuk tawuran tidak pas dengan anak bangsa berideologi Pancasila yang dilahirkan dari budaya dan agama. Bangsa Indonesia berlatar belakang sejarah masyarakat yang beragama, dan semua agama menolak kekerasan, termasuk juga tawuran,"

Tentu tindakan anarkis yang dilakukan oleh pelajar atau kelompok masyarakat Indonesia lainnya tidak muncul begitu saja. "Penyebabnya adalah lunturnya karakter bangsa, menyebabkan mereka menjauh dari ideologi, Sila Pertama yakni Ketuhanan Yang Maha Esa. Seharusnya mereka sabar, taat beragama, saling menghormati dan toleran terhadap perbedaan. Ketika mulai lepas dari ajaran ketuhanan Yang Maha Esa, aksi anarkisme bisa terjadi. Kemudian, Sila kedua, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, berarti kita harus menghormati hak-hak manusia, seperti hak asasi, hak berpendapat dan hak untuk berbeda satu sama lain. Sila Ketiga, Persatuan. Bangsa ini sangat beragam, dan kita memiliki Bhineka Tunggal Ika. Sila Keempat, berarti jika melalui musyawarah, semua masalah bisa terselesaikan. Apalagi kalau mereka berpikir jangka panjang, yaitu Keadilan Sosial, jika kita ingin masyarakat berkeadilan sosial, bangsa Indonesia yang sejahtera. Orang-orang

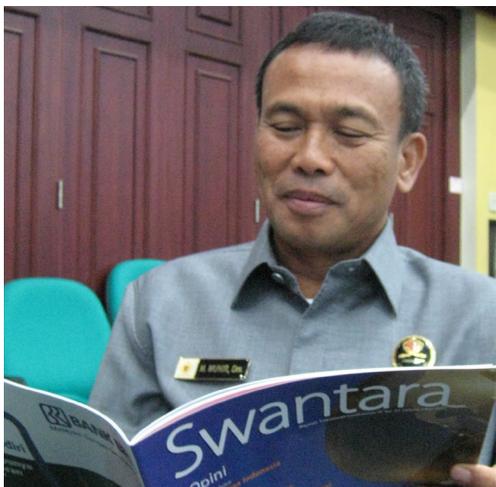
yang sadar akan Pancasila, seharusnya tidak perlu melakukan tindakan anarkis termasuk tawuran,”

Tingkat kesadaran dan pendidikan rendah adalah salah satu faktor penyebab yang utama luntarnya rasa nasionalisme dalam diri masyarakat. “Untuk itu negara bertanggungjawab mencerdaskan dan melindungi segenap bangsa. Dalam hal ini, negara menjamin situasi keamanan di seluruh wilayah Indonesia yang aman dan terkendali. Sebenarnya tawuran, jika dilihat dari sisi keamanan, itu sesuatu yang bisa diprediksi dan dikendalikan. Setelah memperoleh informasi yang cukup tentang lokasi-lokasi yang sering dijadikan ajang tawuran, dilakukan pendekatan-pendekatan antar kelompok atau kepada mereka yang memiliki kaitan dengan konflik-konflik tersebut agar mereka tidak melakukan tindakan anarkisme. Dari kacamata

kecerdasan, rata-rata mereka yang tawuran tingkat kesadaran dan pendidikannya tidak tinggi,”

“Untuk itu, kita harus terus meningkatkan kesadaran khususnya kualitas pendidikan termasuk pendidikan kewarganegaraan dan pendidikan karakter bangsa. Sebagai masyarakat dan sebagai warga negara yang baik, seharusnya orang hidup secara seimbang, antara dunia dan akhirat, antara pemenuhan fisik dan rohani, .hidup arif dan bijaksana,”

Mudahnya masyarakat tersulut aksi-aksi anarkis antara lain juga mengundang keprihatinan Mantan Wapres Jusuf Kalla yang mendesak agar aparat keamanan mengenakan sanksi tegas terhadap setiap pelaku tindak kekerasan karena jika aksi-aksi semacam itu dibiarkan, bisa berpotensi berlakunya hukum rimba di tengah masyarakat.[FE/NS]



Drs M. Munir
PPSA XVIII / Pangkostrad

Nasionalisme Bangsa Indonesia Masih Tebal dan Solid

Jakarta, (Swantara) – Secara umum, kadar nasionalisme bangsa Indonesia sampai sekarang ini masih tinggi dan cukup solid, terbukti dengan masih utuhnya negara kesatuan Republik Indonesia sampai saat ini berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, bahkan sekarang, dari aspek ekonomi, pertumbuhan ekonomi semakin tinggi.

“Kalau pun ada kelompok kecil masyarakat yang berpandangan lain, saya merasa yakin, jika dibandingkan dengan mayoritas warga, nasionalisme bangsa masih tetap tinggi,”

Masalah aksi perkelahian, tawuran antarkelompok

warga, sekolah atau antardesa misalnya yang marak di ibukota atau beberapa kota lainnya, menurut dia, harus diatasi secara cepat untuk mencegah agar aksi-aksi dalam skala kecil itu tidak menyeret kelompok lain, sehingga menjadi lebih besar. “Kalau yang tawuran anak-anak, peranan orang tua, pendidik, guru sangat menentukan. Jika ada siswa satu sekolah tawuran dengan siswa sekolah lain, sebaiknya guru, kepala sekolah harus saling mengevaluasi bersama, mengapa hal itu sampai terjadi. “Diberi pemahaman dan penjelasan, jangan dibiarkan agar tidak menjadi besar,” .

Terkait tawuran, Munir menyoroti peran guru (pendidikan), masyarakat, orang tua dan aparat adalah hal yang harus ditingkatkan. “Saya berpendapat peranan guru, orang tua dan masyarakat harus memberikan pemahaman, dan tentu juga aparat keamanan.

Namun demikian, terjadinya aksi-aksi tawuran atau konflik horizontal lainnya tidak bisa dijadikan cermin bahwa bangsa Indonesia telah terpecah-belah. “Perjalanan bangsa Indonesia selalu diwarnai ancaman, baik secara ideologis maupun sebagai dampak keterbukaan informasi dari luar yang bebas masuk dan tidak bisa dibendung,”

Yang pasti, semua sebab dan semua akibat yang terjadi dalam lingkungan sosial kemasyarakatan, menimbulkan dampak positif sekaligus negatifnya, tinggal cara penyelesaiannya yang efektif.

“Jika mata kuliah yang diajarkan di Lemhannas, yaitu konsep Astagrata diterapkan secara konsisten dan konsekuen, muaranya adalah terciptanya ketahanan nasional yang tinggi, sehingga keutuhan negara kesatuan republik terjaga.

“Saya kira, kita masih tetap dalam jalur, kita masih dalam proses, dan proses ini memang panjang. Proses perjalanan bangsa itu tidak bisa dihitung dalam hari, bulan tahun, berkepanjangan dan berkelanjutan, yang penting asal tetap dalam koridor,”.[FE/NS]

Jakarta, (Swantara) – Aksi-aksi kekerasan massa dalam konflik horizontal termasuk tawuran antarsiswa dan aksi-aksi anarkis lainnya yang sering terjadi akhir-akhir ini jika terus dibiarkan bisa berpotensi mendorong munculnya benih-benih disintegrasi.

“Walaupun baru berupa potensi ancaman disintegrasi, kita semua harus berupaya mencegahnya agar itu tidak terjadi,”

Akibat tergerusnya nilai-nilai kebangsaan, setiap perbedaan yang seharusnya disyukuri, malah memicu terjadinya konflik. Kita sekarang sudah jarang mendengar lagu-lagu kebangsaan, jarang melakukan upacara bendera. Kita juga jarang memperoleh informasi yang berwawasan kebangsaan. Kalau melihat dari struktur penduduk kita sekarang didominasi oleh penduduk berusia produktif yang sangat potensial beraktivitas,” tutur Sonny.

“Masalahnya tidak semuanya berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi, ada yang menganggur dengan tingkat rata-rata pendidikan cukup baik sehingga dikhawatirkan mereka justru menyalurkan



Sonny HB Harmadi
Dosen UI

Kekerasan Bisa Jadi Benih Disintegrasi

keaktivitas dan produktivitasnya ke hal-hal buruk. Nah, itu juga bisa memicu konflik. Oleh karena itu kita harus paham betul struktur penduduk. Konflik juga bisa dipicu oleh pemberitaan media. Media harus pandai memilah-milih mana yang perlu diberitakan dan mana yang tidak, mengingat perannya, media bisa menginspirasi hal-hal yang baik, tapi sebaliknya juga bisa menjadi pemicu konflik,”

Untuk mencegah agar benih-benih disintegrasi tidak jadi tumbuh, apalagi berbuah, Sonny HB Harmadi menyarankan, sebaiknya, pihak-pihak terkait duduk bersama untuk membahas masalah nasionalisme dan kebangsaan. “Harus ada upaya-upaya menumbuhkan nasionalisme dari pengetahuan, dari sikap dan perilaku. Seperti upacara bendera dan lagu-lagu kebangsaan harus kita dorong lagi, jangan dilupakan. Lantas semuanya itu tergantung pada pemimpinnya.

“Pemimpin harus berinisiatif mendorong munculnya nasionalisme di tengah masyarakat, begitu pula dengan sikap saling menghargai, harus terus ditingkatkan. Sedangkan di dunia pendidikan, keberagaman itu harus dianggap sebagai anugerah,”

Menurut catatan, berbagai aksi tawuran pelajar terjadi di Jakarta yang menelan sejumlah korban, tanpa sebab yang jelas, bahkan ada korban yang tidak ada sangkut-pautnya, hanya kebetulan mengenakan pakaian seragam sekolah yang mirip atau sama dengan lawan. Berbagai aksi kekerasan lainnya juga terjadi misalnya aksi kekerasan oleh geng motor di Jakarta baru-baru ini, begitu dengan kasus-kasus diwarnai perbedaan kepercayaan, bahkan pembakaran bus Trans Jakarta oleh sekelompok warga yang berang akibat tewasnya seorang bocah, tertabrak bus yang melaju pada jalur khusus tersebut. [FE/NS]



Krisis Ketahanan Ekonomi dan Nasionalisme

Oleh: Timotius Harsono

Perkembangan Kebijakan Industri Nasional

Jenis Kebijakan	Periode Rehabilitasi dan Stabilisasi (1967 - 1972)	Periode Boom Minyak (1973 - 1981)	Periode Penurunan Harga Minyak (1982 - 1985)	Periode Penurunan Harga Minyak (1986 - 1996)	Periode Krisis dan Pemulihan 1997-2004	Pemulihan & Pengembangan (2005-2009)
Industri	Pengembangan industri Substitusi Impor	<ul style="list-style-type: none"> Pengembangan Industri Substitusi Impor dengan Pendalaman & pemantapan struktur industri. Pengembangan industri melalui penguasaan teknologi di beberapa bidang (pesawat terbang, mesin, perkapalan) 	<ul style="list-style-type: none"> Pengembangan Industri Substitusi Impor dengan Pendalaman & pemantapan struktur industri. Pengembangan industri melalui penguasaan teknologi di beberapa bidang (pesawat 	<ul style="list-style-type: none"> Revitalisasi, konsolidasi, dan restrukturisasi industri 	<ul style="list-style-type: none"> Revitalisasi, konsolidasi, dan restrukturisasi industri Pengembangan industri berkeunggulan kompetitif dengan pendekatan Klaster 	
Orientasi		<i>Inward looking</i>	<i>Outward looking</i>	<i>Inward and Outward looking</i>		

Sumber: Departemen Perindustrian (2006)

Stabilisasi dan liberalisasi ekonomi yang dimulai pada akhir dekade 1960-an merupakan langkah awal pembangunan ekonomi dan industri pada era Orde Baru. Pembangunan pada era pemerintahan Orde Baru dapat diklasifikasikan dalam empat tahap penting (Hill, 1997). Tahap pertama (1967-1973), menciptakan iklim usaha yang kondusif untuk meningkatkan permintaan konsumen, mempercepat pertumbuhan ekonomi, dan membuka kesempatan investasi

bagi investor asing maupun swasta nasional. Tahap kedua (tahun 1973-1981) terkait dengan booming harga minyak yang dimanfaatkan untuk membangun banyak industri meskipun kurang efisien. Pengaruh oil boom terhadap pertumbuhan ekonomi sangat signifikan, sehingga permintaan domestik untuk produk manufaktur pada periode ini ikut meningkat pula. Kebijakan pemerintah saat itu adalah mempercepat proses industrialisasi dengan membangun berbagai industri besar yang padat modal,

seperti industri penyulingan minyak, gas alam, pupuk, petrokimia dan semen. Tahap ketiga (1981-1985), ditandai dengan mulai munculnya permasalahan struktural dan rendahnya efisiensi sektor industri. Tahap keempat (1985-1998) pemerintah mengubah kebijakan investasi dan melakukan intervensi untuk mendorong berkembangnya industri substitusi impor dan industri yang berorientasi ekspor.

Pemerintahan orde lama mengadopsi strategi inward looking

sedangkan pada era orde baru, Indonesia melakukan reorientasi dengan lebih membuka diri terhadap investasi asing (outward looking). Hal ini ditandai dengan diberlakukannya undang-undang No.1 tahun 1967. Transformasi industri nasional mulai berlangsung pada tahun 1970-an hingga pertengahan tahun 1980-an, di mana arah kebijakannya diarahkan pada produksi barang-barang substitusi impor. Sasaran kebijakan ini adalah untuk menghemat devisa negara namun dalam praktiknya strategi industri substitusi impor ini ternyata justru banyak menggunakan cadangan devisa karena produksi barang mewah yang berteknologi tinggi membutuhkan modal besar sehingga Indonesia semakin bergantung pada pasokan input negara-negara industri maju. Pada periode ini sesungguhnya Indonesia menerapkan strategi campuran (inward dan outward looking) (Kuncoro, 2007:128).

Jatuhnya harga minyak pada awal tahun 80-an berdampak negatif terhadap tingkat penerimaan ekspor nasional. Kondisi ini kemudian mendorong pemerintah untuk mengubah strategi industri nasional yang berbasis substitusi impor menjadi industri berbasis ekspor. Strategi ini dilakukan dengan memberikan stimulus untuk memacu pertumbuhan industri yang berorientasi ekspor melalui pemberian insentif dan kemudahan permodalan untuk usaha swasta nasional serta izin investasi asing. Kebijakan investasi pada periode ini cenderung ekspansif. Di sisi lain pemerintah juga melakukan kebijakan penetapan tarif terhadap produk-produk impor tertentu. Penetapan tarif tersebut merupakan "barier" yang dimaksudkan untuk melindungi perkembangan industri nasional namun dalam prakteknya justru menciptakan oligopoli. Alhasil, pertumbuhan industri pada tahun 80-an meningkat pesat dengan adanya "proteksi"

pemerintah dalam bentuk kebijakan perizinan dan tarif namun sesungguhnya perekonomian saat itu belum memiliki basis yang kuat.

Krisis dan Ketahanan Ekonomi

Industri nasional pada periode 1973-1996 yang masih pada tahap "pembentukan" mengalami pukulan sangat berat dengan terjadinya krisis ekonomi pada tahun 1998 sehingga banyak industri runtuh, termasuk industri tekstil dan berbagai industri manufaktur. Beberapa permasalahan mendasar yang menyebabkan rentannya industri nasional pada tahun 1998 adalah: (1) terjadinya funding mismatch antara investasi jangka panjang menggunakan pinjaman jangka pendek (short call); (2) terjadinya currency mismatch antara hutang dalam mata uang asing dan pendapatan dalam mata uang rupiah; (3) struktur modal tidak memadai (praktik mark-up); dan (4) lemahnya pengawasan BI terhadap sektor perbankan sehingga tidak mengetahui tingkat hutang sektor swasta.

Kebijakan pemerintah untuk mengatasi krisis 1998 seperti dengan melakukan pengetatan kredit, restrukturisasi perbankan, dan liberalisasi pasar yang dipersyaratkan oleh IMF dimaksudkan untuk mendorong perkembangan industri nasional. Liberalisasi di beberapa sektor perekonomian, termasuk agrobisnis, pertambangan, transportasi udara, real estate (strata title), dan retail telah mendorong terjadinya pertumbuhan ekonomi. Namun, pemulihan ekonomi berjalan sangat lambat sehingga Indonesia semakin tertinggal lebih jauh dengan Thailand, Malaysia, dan Korea Selatan. Lambatnya pemulihan ekonomi tersebut disebabkan karena pada saat yang sama Indonesia juga sedang menghadapi instabilitas politik dan mengalami pergantian presiden sebanyak lima kali dalam waktu yang relatif singkat (1998-2004).

Pelaksanaan agenda reformasi

politik juga telah melahirkan undang-undang Otonomi Daerah yang dalam implementasinya tidak didukung dengan koordinasi yang efektif sehingga terjadi disharmonisasi yang menyebabkan timbulnya business uncertainty dan high cost economy yang tentunya menghambat proses industrialisasi. Di sisi lain, kebijakan di bidang moneter yang mulai dilaksanakan pada tahun 1998 melalui pengetatan Legal Lending Limit dan Loan to Debt Ratio dapat dikatakan berhasil menjaga stabilitas moneter dan meningkatkan Capital Adequacy Ratio (CAR) sehingga Indonesia mampu memenuhi persyaratan Basel III.

Perekonomian suatu negara memang tidak dapat dilepaskan dari perkembangan ekonomi global. Beberapa aspek penting tentang ekonomi global yang perlu menjadi perhatian bagi negara berkembang dalam memanfaatkan peluang dan menghadapi kendala ataupun ancaman, yakni (Harsono, 2008): pertama, dinamika dan pertumbuhan ekonomi global yang mencakup perkembangan kependudukan, arus modal, ilmu pengetahuan dan teknologi, sumber kekayaan alam, kondisi keamanan, dan kebijakan negara-negara maju yang memiliki kekuatan ekonomi. Kedua, kesenjangan ekonomi antarnegara. Perbedaan kesiapan antarnegara menyebabkan fenomena ekonomi global disikapi secara berbeda. Negara-negara maju umumnya menanggapi fenomena ekonomi global sebagai peluang, sedangkan negara berkembang yang umumnya belum siap menganggapnya sebagai tantangan. Perkembangan tersebut berpotensi menciptakan kesenjangan yang lebih jauh antara negara maju dan negara berkembang. Ketiga, krisis dan ketahanan ekonomi. Dalam ekonomi global, krisis ekonomi sangat mungkin terjadi secara periodik. Hal tersebut dikarenakan turbulensi dalam perekonomian suatu negara (kawasan), terutama

negara yang memiliki kekuatan ekonomi besar, akan berdampak pada negara-negara lain khususnya negara berkembang. Tidak dapat dipungkiri bahwa Indonesia mengalami dampak yang paling berat pada saat terjadinya krisis 1998. Namun kebijakan yang diambil untuk mengatasi krisis 1998 telah memperkokoh sistem moneter sehingga ekonomi Indonesia lebih “tahan” dalam menghadapi

Indonesia dapat memperkokoh ketahanan ekonomi nasional, agar mampu menghadapi pengaruh perubahan lingkungan strategis, dan sekaligus meredam guncangan ekonomi yang datang dari luar. Dengan demikian apabila krisis ekonomi terjadi lagi, maka dampak negatifnya dapat diminimalisasi.

Nasionalisme

Nasionalisme merupakan suatu

kesamaan nasib sebagai sesama kaum terjajah. Soekarno sebagai salah seorang founding father dan Presiden pertama negara RI, selama masa kekuasaannya ideologi nasionalisme diarahkan untuk mendesain suatu nation state dengan nation and character building sebagai fundamennya. Nasionalisme adalah dasar untuk membangun kemandirian bangsa yang diperlukan sebagai modal

Perbandingan Dampak Krisis Ekonomi pada tahun 1998 dan 2008

Indikator	Krisis Ekonomi Asia 1998	Krisis Ekonomi Global 2008
Tingkat pertumbuhan PDB terendah (yoy, %)	-18.3	4.4
(kuartal)	Desember-98	Maret-09
Inflasi IHK tertinggi (yoy, %)	82.6	12.1
(bulan)	September-98	September-08
Tingkat SBI 30 hari tertinggi (%)	70.4	11.2
(bulan)	Agustus-98	November-08
Penurunan cadangan devisa		
(\$ miliar)	12.3	10.4
(%)	42.7	17.1
(periode)	Juni-97 – Februari-98	Juli-08 – November-08

Catatan: Tabel didasarkan pada data akhir bulan, kecuali pertumbuhan PDB, yang didasarkan pada data kuartalan. Sumber: Diolah dari DEIC Asia Database; Kuncoro, *et al.* (2009)

krisis ekonomi global 2008.

Krisis ekonomi 1998 dan 2008 telah menjadi pengalaman dan pelajaran yang sangat berharga bagi Indonesia. Dampak kedua krisis ekonomi ini terhadap Indonesia sangatlah berbeda bila ditinjau dari indikator pertumbuhan ekonomi, inflasi, fluktuasi suku bunga dan penurunan cadangan devisa (lihat Tabel). Berangkat dari pengalaman ini, hendaknya secara bertahap bangsa Indonesia mampu untuk senantiasa meningkatkan kemandirian dan membangun daya saing nasional sehingga dapat memanfaatkan peluang pasar global. Dengan demikian

bentuk ideologi yang meletakkan kecintaan, kesetiaan dan komitmen tertinggi pada negara kebangsaan (Kohn, 1961). Konsep nasionalisme mengandung unsur utama untuk hidup bersama sebagai suatu komunitas bangsa yang memiliki tujuan dan cita-cita yang hendak diraih bersama. Sehingga pemikiran dan tingkah laku seorang nasionalis senantiasa didasarkan pada kesadaran menjadi bagian dari suatu komunitas bangsa dan berorientasi pada pencapaian tujuan bersama sebagai bangsa.

Nasionalisme Indonesia pada awalnya muncul sebagai respon atas kolonialisme dan

utama untuk mewujudkan tujuan dan cita-cita melalui proses pembangunan nasional.

Menurut pakar sosiologi Selo Soemardjan (1993), manusia pembangun memiliki lima ciri utama. Pertama, memiliki kepercayaan atas dirinya sendiri. Kedua, memiliki keinginan untuk memperbaiki nasibnya. Ketiga, pandai memanfaatkan kesempatan yang dapat menguntungkan baginya, mampu memecahkan setiap persoalan hidup yang dihadapi, dan selalu siap menghadapi perubahan-perubahan sosial-budaya yang terjadi di masyarakat. Keempat, bersedia

dan mampu bekerjasama dengan manusia-manusia lain atas dasar pengertian dan penghormatan hak dan kewajiban masing-masing pihak. Kelima, memiliki watak yang bermoral tinggi yang diwujudkan dalam sifat jujur, selalu menepati janji, lagi pula peka terhadap hak serta kepentingan pihak lain.

Bangsa Jepang adalah salah satu bangsa yang memiliki kesadaran tinggi tentang arti nasionalisme. Jiwa nasionalisme tersebut diaktualisasikan dalam semua dimensi kehidupan, baik dimensi ekonomi, politik, sosial dan budaya. Tidak heran bilamana bangsa ini memiliki ketahanan yang luar biasa. Hal ini dapat dibuktikan dari berbagai fenomena yang terjadi di Jepang beberapa tahun terakhir ini. Jepang secara nasional menanggung beban utang sekitar dua kali lipat dari PDB. Namun perekonomian Jepang tetap berjalan dengan baik karena masyarakat Jepang menempatkan tabungannya di dalam negeri sehingga gejolak moneter internasional tidak terlalu mempengaruhi perekonomian Jepang. Bersamaan dengan usaha Jepang mengatasi dampak krisis ekonomi 2008, telah terjadi bencana Tsunami yang mengakibatkan kerusakan dan kerugian yang

sangat besar, termasuk terjadinya insiden Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) di Fukushima yang memaksa Jepang untuk menutup sebagian besar PLTN yang mendorong terjadinya krisis listrik. Kondisi ini tentunya mengancam kelangsungan industri-industri strategis di Jepang. Dalam kondisi yang sedemikian parahnya, Jepang masih mampu menjaga stabilitas ekonomi, politik, dan keamanan. Hal ini menunjukkan bahwa sikap nasionalisme bangsa Jepang telah memberikan kontribusi penting dalam membentuk ketahanan nasional sehingga berhasil menghadapi berbagai krisis yang terjadi secara simultan (krisis ekonomi dan bencana alam).

Nasionalisme sebagai suatu konsep perlu diwujudkan secara nyata dalam semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara agar mampu bertahan dan berkembang dalam era globalisasi yang sarat dengan tantangan, persaingan dan perubahan. Adapun peningkatan daya saing nasional membutuhkan dukungan lingkungan usaha yang kondusif dan produktif. Untuk meraih cita-cita kemerdekaan, mutlak diperlukan jiwa dan sikap nasionalisme seluruh komponen

bangsa serta peran pemerintah dalam menyelenggarakan pemerintahan yang efektif untuk menghadirkan pelayanan publik yang berkualitas dan penegakan hukum yang berkeadilan.

Dalam menyongsong ulang tahun kemerdekaan yang ke-67, kita semua perlu memantapkan komitmen bersama dalam mewujudkan tujuan kemerdekaan bangsa Indonesia yaitu untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Peningkatan kualitas SDM, selain dilakukan melalui program pembangunan di bidang pendidikan dan kesehatan, juga mesti didukung oleh kebijakan yang unggul dan pelaksanaan pembangunan ekonomi di sektor-sektor strategis. Pembangunan ini antara lain mencakup sektor infrastruktur, industri, dan pertanian/perikanan, dengan cara memanfaatkan segala potensi sumberdaya nasional secara optimal, dengan melibatkan seluruh komponen bangsa dan masyarakat luas.^[NS]



LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

mengucapkan

*Selamat Hari Raya
Idul Fitri
1 Syawal 1433 H*





Siapapun Gubernurnya Warga DKI Butuh Pemimpin Amanah

Jakarta, (Swantara) – Bak turnamen olahraga, hasil “pertandingan babak final” antara pasangan juara bertahan Fauzi Bowo - Nachrowi (Foke-Nara) melawan “debutan” Jokowi-Tjahaya Purnama (Jokowi-Ahok), 20 September tahun ini, dinanti-nanti warga DKI Jakarta.

Bagi sekitar 24 juta warga ibu kota saat ini, siapapun pemenangnya agaknya tidak begitu penting, karena yang lebih mendesak adalah agar warga bisa terlepas dari beratnya beban yang dipikul menjadi pelanggan setia banjir, terperangkap kemacetan lalu-lintas, kesemrawutan kakilima dan tawuran antar pelajar.

Warga Jakarta juga bermimpi naik kendaraan umum dengan nyaman dan aman, terbebas dari rasa takut dan cemas khususnya warga perempuan yang terpaksa menyelesaikan urusan di luar

rumah di tengah larutnya malam.

Sebelumnya, warga DKI Jakarta juga bisa menarik nafas lega, karena putaran pertama Pilkada DKI Jakarta berlangsung aman, bebas huru-hara atau aksi kekerasan, walaupun ada protes-protes kecil mengenai perhitungan suara dan tema kampanye yang dinilai mengandung unsur SARA.

Jokowi, semula hanya dikenal sebagai walikota Solo dan tokoh di balik mobil Esemka yang masih menuai kontroversi, di luar dugaan mampu menjungkirbalikkan perkiraan orang, memenangi putaran pertama pilkada DKI Jakarta, dengan angka telak, mengalahkan calon petahana, Fauzi Bowo dan pasangannya, Nachrowi Ramli.

Berpasangan dengan dengan mantan Walikota Solo, Jokowi yang berpasangan dengan mantan Bupati Belitung Timur, Basuki

Tjahaya Purnama (Jokowi-Ahok) dalam Pilkada DKI Jakarta 11 Juli lalu berhasil mengantongi 1.847.157 suara (42,6 persen), unggul di lima wilayah kota. Sedangkan pasangan nomor urut satu, Fauzi Bowo-Nachrowi Ramli (Foke-Nara) yang semula dijagokan oleh sekelompok masyarakat dan lembaga, hanya mampu mengumpulkan 1.476.648 suara (34,05 persen), unggul di Kabupaten Kepulauan Seribu dengan perolehan 6.916 suara. Sedangkan Jokowi-Ahok hanya memperoleh sebanyak 1.273 suara. Begitu juga dengan pasangan calon lainnya yang berhasil mengumpulkan suara lebih kecil dari Foke-Nara.

Pasangan calon Hidayat Nur Wahid-Didik J Rachbini dengan nomor urut empat, berhasil menduduki posisi ketiga dengan perolehan 508.113 suara. Pasangan Faisal Basri-Biem Benyami, dengan

nomor urut lima, berada di posisi keempat dengan perolehan 215.953 suara. Berikutnya adalah pasangan Alex Noerdin-Nono Sampono berhasil mengumpulkan 202.643 suara. Pasangan calon gubernur dan wakil gubernur yang terakhir adalah pasangan Hendarji Soepandji-Riza Patria, berhasil mengumpulkan sebanyak 85.990 suara.

Menurut hasil survey Kompas, pasangan Jokowi-Ahok berhasil mengumpulkan suara dari warga kelas atas (58,8 persen), sementara suara yang diberikan kepada calon petahana, Foke yang berpasangan dengan Nachrowi hanya 17,6 persen, sedangkan sebagian besar suara dari kelompok masa mengambang (26 persen) juga jatuh ke pasangan Jokowi-Ahok.

Walaupun masih harus bertarung lagi pada putaran kedua, 20 September nanti, kemenangan (sementara) pasangan Jokowi dinilai banyak pihak sebagai simbol perlawanan masyarakat terhadap hegemoni petahana, dengan memilih pasangan yang dianggap lemah (underdog) dan luapan frustrasi warga DKI terhadap berbagai masalah klasik

yang belum teratasi (a.l.kemacetan lalu-lintas, banjir, kakilima).

Selain hasrat warga DKI untuk mendapatkan pemimpin baru yang akan membawa angin segar menuju perubahan ke arah yang lebih baik, kekalahan sementara pasangan Foke-Nara juga bisa menjadi pelajaran bahwa isu-isu primordialitas dan agama ternyata, paling tidak, sudah berkurang keampuhannya” untuk diusung sebagai tema kampanye.

Keberpihakan pada “wong cilik” dibarengi dengan gaya kampanye yang terpresepikan bersahaja, tanpa jarak antara calon dan konstituennya, dan menggunakan bahasa “rakyat”, agaknya juga ikut mendongkrak prolehan suara Jokowi-Ahok, selain sasaran kampanye yang pas a.l. untuk menggaet calon pemilih dari kalangan menengah ke atas dan mereka yang belum menentukan pilihannya (massa mengambang).

Keberhasilan Jokowi juga didukung oleh pasangannya, calon wakil gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama, mantan Bupati

Belitung Timur. Pria kelahiran Manggar, 29 Juni 1966 ini selama kepemimpinannya di Belitung Timur tersebut pernah membebaskan biaya kesehatan pada seluruh warganya. Ahok yang memiliki nama Tionghoa, Zhong Wan Xie, ini juga turut menyumbang rasa simpati masyarakat Jakarta, untuk memilih dirinya dan Jokowi sebagai gubernur dan wakil gubernur.

Namun demikian, di putaran kedua nanti, tentu saja semua masih bisa berubah, Kedua pasangan, Jokowi-Ahok dan Foke-Nara, tentunya akan mengatur strategi pemenangan, sebaliknya warga DKI akan kembali menjatuhkan pilihannya. Paling penting lagi, masyarakat ibu kota tetap menanti-nantikan pimpinan yang berpihak pada kepentingan rakyat, bukan kepentingan golongan.

Jadi, siapapun pemenangnya dalam putaran kedua Pilkada nanti, warga DKI berharap mendapatkan pemimpin yang amanah, pemimpin yang menepati janji-janji yang dilontarkannya saat berkampanye”.^[AB/NS]





Enam buah jet tempur Sukhoi melakukan atraksi "Flying Pass" saat Peringatan Detik-Detik Proklamasi Kemerdekaan Indonesia di Istana Negara Jakarta - Rabu, 17 Agustus 2011 [FOTO ANTARA/Widodo S. Jusuf/Koz/Spt/11]



Peserta Lomba memanjat batang Pinang yang telah dilumuri oli dalam rangka perayaan Kemerdekaan RI ke-66 di Pantai Indah Taman Impian Jaya Ancol Jakarta, 17 Agustus 2011 [FOTO ANTARA/Rosa Panggabean/ed/nz/11]



Puluhan mahasiswa pecinta alam dari berbagai universitas yang tergabung dalam Mahasiswa Pecinta Alam Sumatera Utara (Mapalasu) melakukan pengibaran bendera merah putih dalam rangka memperingati HUT RI ke-66 di puncak gunung Sibiyak kabupaten Karo, Sumatera Utara- Rabu, 17 Agustus 2011 [FOTO ANTARA/Irsan Mulyadi/ed/nz/11]



Sejumlah warga pulau Langiyan mengiring bendera merah putih usai upacara hari Proklamasi yang dipusatkan di Langiyan Kecamatan Dampai Utara Kabupaten Tolitoli Sulawesi Tengah, 17 Agustus 2011 [FOTO ANTARA/Basri Marzuki/ed/nz/11]



Kepemimpinan Kim Jong Un Masih Kuat

Jakarta (Swantara) - Musuh-musuh Korea Utara, paling untuk saat ini, tentunya akan gigit jari, karena penganugerahan pangkat tertinggi militer untuk pemimpin negara itu, Kim Jong Un baru-baru ini menyiratkan bahwa cengkeraman kekuasaannya di negara yang tertutup dan penuh misteri itu agaknya masih kuat.

Dengan pangkat baru yang disandanginya – Marsekal Republik Rakyat Demokrasi Korea - Kim Jong Un diperkirakan memiliki kekuasaan mutlak untuk mengendalikan angkatan bersenjata berkekuatan 1,2 juta personil itu. Marsekal (wonsu) di dalam hirarki kepangkatan militer Korut adalah pangkat dua tingkat di atas jenderal besar (bintang lima).

Sementara jenjang kepangkatan baru Jong Un diberikan selang dua hari setelah Marsekal Madya Ri Yong Ho diberhentikan dari jabatannya dengan alasan kesehatan sebagai panglima angkatan bersenjata di benteng terakhir negeri komunis di benua Asia tersebut.

Menurut laporan kantor berita Korut, KCNA, Ri tidak hanya melepaskan jabatannya sebagai orang nomor satu di jajaran AB Korut, tetapi juga diberhentikan dari semua jabatan politik yakni sebagai Wakil Ketua Komisi Sentral Partai Pekerja Korea dan presidium politburo partai komunis tersebut.

Ri digantikan oleh Hyon

Yong Cho, yang dipromosikan pangkatnya menjadi marsekal madia (cha'su) atau jenjang kepangkatan tertinggi ketiga dalam hirarki AB Korut (setingkat di atas jenderal besar berbintang lima).

Tidak banyak yang mengetahui sepak terjang Hyon di kalangan perwira tinggi militer Korut, selain ia dikenal sebagai salah satu anggota Komite Pusat Partai Pekerja Korut dimana Ri yang digantikannya menjabat sebagai wakil ketuanya.

Pengamat memperkirakan, pengangkatan Yong Cho sebagai panglima Angkatan Bersenjata Korut, menyusul pergantian pejabat tinggi lainnya termasuk Kepala Polisi Rahasia, U Dong Chuk didasarkan atas niat Kim Yong Un untuk melakukan alih generasi di lingkungan elit negara itu. Namun ada juga yang berspekulasi bahwa pergantian posisi orang nomor satu di hirarki AB Korut tersebut terkait dengan perebutan kekuasaan di lingkaran kekuasaan negara itu.

Ri yang terpilih menjadi salah satu dari tujuh pendamping Kim Jong Un yang berjalan mengiringi jenazah Kim Jong Il pada acara pemakaman mendiang pemimpin Korut tersebut menunjukkan bahwa ia memang dekat dengan pusat lingkaran kekuasaan saat itu.

Selain isu politik, sebenarnya perekonomian negara yang menerapkan sistem ekonomi sosialis itu juga cukup memprihatinkan, apalagi menyusul serangan badai yang menyebabkan banjir di wilayah miskin di Propinsi Pyongan Selatan dan Songchon sejak

Akhir Juni lalu,

Kantor Berita Korut, KCNA Sabtu lalu (4/8) melaporkan KCNA, 169 orang tewas, dan 400 hilang, 1.400 bangunan pabrik, rumah sekolah, rumah sakit hancur, 8.600 bangunan rusak dan 43.770 bangunan terendam air atau tertimbun lumpur..

Korut sering mengalami kesulitan untuk menyediakan pangan bagi 24 juta rakyatnya akibat keterbatasan lahan pertanian, juga akibat buruknya sistem distribusi pangan, inflasi yang tinggi dan juga akibat sanksi embargo terkait program pengembangan nuklir dan rudal oleh negara itu.

Diperkirakan ratusan ribu penduduk Korut tewas saat terjadi krisis pangan pada dekade 1990-an walaupun pemberitaan mengenai peristiwa tersebut tertutup bagi dunia luar, sementara PBB dalam laporannya menyebutkan bahwa pada 2012 ini sekitar tiga juta penduduk Korut memerlukan bantuan pangan.

Program Pangan Dunia (WFP) PBB juga dilaporkan akan segera mengirimkan bantuan pangan darurat setelah pemerintah Korut menyatakan dalam keadaan darurat pangan dan memerlukan uluran tangan PBB.

Tentu saja pencopotan Ri yang terkesan mendadak memunculkan berbagai spekulasi dari pihak luar, khususnya dari tetangga serumpun, sekaligus seterusnya, Korea Selatan, yang dengan harap-harap cemas menanti perkembangan selanjutnya. [Reuters/AFP/NS]

Membantu Indonesia Menjadi Negara Digdaya yang Seutuhnya



Djarum Foundation berkomitmen melalui program-program yang fokus dan terstruktur di bidang sosial, olahraga, lingkungan, pendidikan dan budaya. Area-area tersebut adalah aspek kehidupan bangsa yang saling mendukung untuk meningkatkan prestasi negeri secara keseluruhan, memajukan Indonesia menjadi negara digdaya yang seutuhnya.

Sumbangsih Sosial

Sejak 1951

Filosofi Djarum berakar pada budaya lingkungan sekitarnya. Nilai gotong royong, *tepo seliro* dan kebersamaan menjadi bagian dalam kegiatan perusahaan. Seiring berjalannya waktu, kegiatan tersebut bertransformasi menjadi program sosial, sebagai upaya khusus untuk membantu masyarakat dan lingkungan sekitar. Kegiatan tersebut diantaranya adalah program Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN), Donor Darah, Bak Penampungan Air Hujan (PAH) dan Operasi Katarak Mata gratis. Dengan Program PSN untuk memberantas nyamuk Aedes Aegypti di 2 RW, lebih dari 10.000 jiwa terhindar dari ancaman Penyakit Demam Berdarah. Lebih dari 10.000 kantong darah telah terkumpul dari kegiatan Donor Darah. Dan akan ada lebih dari 600 orang akan mampu melihat kembali setelah menjalani Operasi Katarak Mata sepanjang tahun 2012. Sementara itu bak Penampungan Air Hujan telah membantu lebih dari 15.000 warga mendapatkan pasokan air. Sumbangsih Sosial Djarum Foundation terus melanjutkan tradisi untuk membantu kehidupan masyarakat demi kemajuan bangsa Indonesia.

Beasiswa Bulutangkis

Sejak 1969

Olahraga berperan sangat penting dalam membangun karakter bangsa. Selain membentuk badan yang sehat, olahraga melatih kerja sama, kepemimpinan dan pemikiran yang fokus. Sejak 1969 Djarum telah aktif memberikan dukungan pada bulutangkis, olahraga unggulan Indonesia. Sebagai wujud prestasi yang membanggakan, sejak 1992 hingga 2008 ada 9 atlet PB Djarum yang berhasil meraih medali di Olimpiade. Kini, beasiswa bulutangkis penuh diberikan kepada kandidat yang terpilih dari audisi khusus dan umum atlet PB Djarum. Mereka akan memperkuat negeri untuk berkompetisi di pertandingan tingkat internasional demi kejayaan Bulutangkis Indonesia.



Peserta Audisi Umum atlet PB Djarum.

Trees For Life

Sejak 1979

Wilayah tropis di ekuator dapat menyerap lebih banyak CO₂ daripada zona iklim lain berkat banyaknya vegetasi yang tumbuh di area ini. Karena itulah, sebagai upaya mengurangi dampak pemanasan global, Djarum Foundation telah menanam lebih dari 1 juta pohon sejak tahun 1979. Kami juga mengadakan inisiatif penanaman pohon besar-besaran di pulau Jawa untuk meneduhkan jalan dan menyerap gas CO₂, sekaligus mempertahankan struktur tanah dan menyerap air hujan. Hingga tahun 2014 nanti, kami berencana menanam pohon Trembesi sebanyak mungkin di sepanjang 478 km jalur Pantura Jawa Tengah, yang mampu menyerap 685 juta kg CO₂ per tahun. Semua untuk menjaga kelestarian bumi tempat kita tinggal demi generasi mendatang.

Beasiswa Plus

Sejak 1984

Djarum Foundation konsisten berupaya untuk menghasilkan calon pemimpin masa depan Indonesia dengan telah memberikan beasiswa kepada 7.274 mahasiswa dari 84 Perguruan Tinggi di 24 propinsi yang terbukti memiliki prestasi akademis, kepemimpinan serta kemampuan interpersonal. Djarum Beasiswa Plus memberikan dukungan finansial dan pelatihan *soft skills* untuk membina kemampuan dan keterampilan kepemimpinan intelektual. Dengan demikian, kami berharap dapat meluaskan cakrawala wawasan dan membekali mereka dengan keterampilan emosional dan intelektual yang dibutuhkan untuk membentuk Indonesia yang tangguh menghadapi tantangan di masa mendatang.



Pelatihan Character Building diberikan dalam kegiatan Outbound untuk semua Beswan Djarum.

Apresiasi Budaya

Sejak 1992

Indonesia adalah negeri yang kaya ragam budaya. Keanekaragaman tersebut merupakan kekayaan yang harus kita gali secara mendalam dan perlu dipahami dengan bijaksana, agar dapat menambah semangat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Djarum Apresiasi Budaya ikut andil dan berusaha membangun hubungan kerjasama dalam usaha-usaha untuk meningkatkan apresiasi terhadap budaya Indonesia serta mendukung semangat kreatif masyarakat. Sejak tahun 1992, telah memberikan dukungan terhadap lebih dari 1.000 seni pertunjukan dan pentas budaya. Diharapkan nantinya ruang-ruang ekspresi dan apresiasi lebih terbuka, dan komunikasi antar kultur budaya dapat terjalin lebih erat lagi. Mencintai budaya adalah wujud rasa bangga dan cinta kita terhadap Indonesia. Karena yang menyatukan bangsa adalah budaya. Cinta Budaya, Cinta Indonesia.

Djarum Foundation membuktikan baktinya pada negeri:

Lebih dari 10.000 jiwa terhindar dari ancaman penyakit Demam Berdarah.

9 atlet PB Djarum berhasil meraih medali di Olimpiade.

Menanam lebih dari 1 juta pohon sejak 1979, dan hingga 2014 nanti, melakukan penanaman Trembesi di sepanjang 478 km jalur Pantura Jawa Tengah.

Memberikan beasiswa kepada 7.274 mahasiswa dari 84 Perguruan Tinggi di 24 propinsi.

Mendukung lebih dari 1.000 seni pertunjukan dan pentas budaya sejak tahun 1992.



www.djarumfoundation.org

DJARUM foundation
Bakti Pada Negeri

Sosial ♦ Olahraga ♦ Lingkungan ♦ Pendidikan ♦ Budaya

Secercah Harapan Bagi Warga Rohingya



Jakarta, (Swantara) – Warga Rohingya mulai melihat titik terang dengan meluasnya simpati internasional pada mereka yang telah puluhan tahun hidup dalam kegelapan panjang tanpa asa dan harapan, diliputi rasa takut, kelaparan, penyiksaan dan bayang-bayang kematian.

Organisasi Kerjasama Islam (OKI) dalam rapat konsultasinya di Kuala Lumpur (3/8) mendesak komunitas internasional untuk memberikan tekanan politik pada pemerintah Myanmar terkait aksi-aksi kekerasan dan diskriminatif terhadap etnis minoritas Rohingya yang telah

bermukim bertahun-tahun di negara bagian Arakan (Arkhine) di wilayah barat negeri itu.

OKI dalam sidang luar biasa yang akan digelar di Mekkah, 14 dan 15 Agustus juga sudah mengagendakan pembahasan dan pencarian solusi atas tragedi kemanusiaan etnis Rohingya di Myanmar.

Presiden Susilo B Yudhoyono, Sabtu (4/8) dalam pernyataannya meminta agar bantuan solidaritas bagi kelompok Rohingya hendaknya dikirim dengan cepat, namun tentunya perlu dikonsultasikan dan dikoordinasikan

dulu dengan kemenlu RI.

Koordinasi, menurut presiden, perlu untuk menghindari masalah diplomatik seperti yang terjadi di masa lalu dimana komponen masyarakat secara spontan memberikan dukungan, bahkan bahkan datang langsung ke suatu tempat, akhirnya menimbulkan masalah, hingga pemerintah harus turun tangan.

Pada bagian lain Presiden menegaskan, Indonesia berharap agar konflik diselesaikan secara bijak, adil, tepat dan tuntas, dan untuk itu pemerintah RI juga siap membantu, baik melalui jalur

diplomasi maupun cara lain guna mengakhiri konflik komunal dan masalah pengungsi Rohingya.

Sejarah kehadiran pasti etnis Rohingya di Arakan masih tertutup tabir gelap, namun diperkirakan sudah berada di sana sejak Abad ke-7 saat wilayah itu menjadi pusat pertemuan para pedagang Timur Tengah.

Secara fisik, bahasa dan budaya mereka mirip dengan etnis Bengali di Asia Selatan, namun melalui pembauran, banyak diantara mereka berasal dari Arab, Parsi dan Pashtun yang bermigrasi ke wilayah itu pada zaman Kerajaan Mogul.

Gelombang pengungsian etnis Rohingya dari Arakan terjadi setelah tentara Burma melancarkan operasi militer 'Raja naga' pada 1978 untuk mengawasi dengan ketat aktivitas mereka. Sekitar 250.000 etnis Rohingya mengungsi akibat aksi-aksi penganiayaan, pembantaian dan perkosaan serta praktik pelanggaran HAM berat lainnya sebagai eksekusi operasi tersebut.

Pada periode 1991-1992 terjadi lagi gelombang pengungsian sekitar satu juta warga Rohingya dari Arakan ke negara-negara di sekitarnya seperti Pakistan, Thailand, Malaysia dan Indonesia. Tidak tercatat, mereka yang tewas tidak sampai daratan akibat menggunakan sarana angkutan laut, berupa kapal-kapal atau perahu seadanya, dengan perlengkapan dan bekal minim.

Asisten Sekjen OKI, Atta El-Manan Bakhit dalam pernyataannya antara lain menyebutkan, kelompok etnis Rohingya di Myanmar telah mengalami tekanan, kekerasan dan aksi-aksi pelanggaran HAM lainnya sejak lama.

Atta mengajak segenap anggota OKI untuk bersama-sama mencari jalan keluar agar aksi kekerasan dan diskriminasi segera diakhiri. Atta juga mengajak segenap negara anggota OKI untuk melihat masalah Rohingya dengan kacamata atau perspektif kemanusiaan yang lebih netral walaupun korbannya

adalah kelompok muslim.

Sementara Ketua PMI Jusuf Kalla yang hadir termasuk diantara 40 utusan LSM dari 20 negara anggota OKI dalam pertemuan di Kuala Lumpur tersebut mengedepankan penyelesaian kasus Rohingya secara netral dan meminta semua pihak untuk melihatnya sebagai kasus pelanggaran HAM berat.

Mantan Wapres RI itu juga mengimbau masyarakat internasional baik melalui forum PBB, OKI maupun ASEAN, untuk melakukan tekanan diplomatik kepada Myanmar dan Bangladesh agar membuka dialog dan memberikan akses bagi organisasi kemanusiaan internasional untuk memasuki wilayah Arakan.

Manusia perahu Rohingya berdatangan dari wilayah Arakan, Myanmar, untuk menghindari aksi kekerasan oleh aparat pemerintah setempat. Di berbagai wilayah Indonesia sejauh ini tercatat 270 pencari suaka dan 124 pengungsi Rohingya.

Sementara itu Badan Kerjasama Antar Parlemen DPR-RI Almuzamil Yusuf mengemukakan, DPR akan segera mengirimkan delegasi resmi ke Myanmar untuk membuka dialog dengan parlemen negara itu dan mencari solusi agar konflik Rohingya tidak meluas.

"Kami meminta agar pemerintah RI lebih proaktif ambil bagian untuk menuntaskan isu Rohingya demi menjaga agar kawasan ini tetap kondusif dan terhindar dari eskalasi konflik," ujarnya.

Dalam Piagam ASEAN (ASEAN Charter) disebutkan bahwa salah satu tujuan pembentukannya adalah untuk menjamin agar rakyat anggota ASEAN hidup secara damai dan harmonis di lingkungan yang adil dan demokratis.

Pemerintah RI sendiri, seperti yang diungkapkan Menlu Marty Natalegawa menegaskan, tidak dapat menerima bentuk-bentuk aksi diskriminatif atau represif terhadap kelompok apapun dan dimanapun dan dengan alasan apapun, termasuk terhadap

etnis maupun agama tertentu

Terhadap manusia yang tidak memiliki kewarganegaraan, ujarnya, bukan berarti bisa dilakukan tindakan semena-mena, sebaliknya, masyarakat internasional justru harus memberikan naungan pada mereka.

"Indonesia menentang setiap bentuk intoleransi, termasuk di negara kita sendiri, akan kita tentang. Kita tidak bisa menerimanya," kata Menlu.

Penolakan terhadap kehadiran pengungsi Rohingya dilakukan, baik oleh pemerintah Myanmar yang ketempatan kelompok etnis tersebut dan negara asal mereka yakni Bangladesh. Pemerintah Myanmar menganggap etnik Rohingya sebagai imigran gelap dari Bangladesh, sebaliknya pemerintah Bangladesh bersikeras menganggap mereka adalah warga Myanmar.

Rezim junta militer Myanmar hanya mengakui kewarganegaraan etnis Rohingya yang sudah bermukim di wilayah negara itu sebelum Myanmar merdeka dari tangan Inggris pada 1948, sedangkan mereka yang datang setelah itu dianggap sebagai pendatang haram.

Pemerintah Bangladesh bahkan meminta organisasi internasional menghentikan operasi pemberian bantuan pada pengungsi Rohingya yang berdatangan di Distrik Cox's Bazaar yang berbatasan dengan Provinsi Rakhine (Arakan), Myanmar, lokasi konsentrasi etnis Rohingya.

Bangladesh menolak kedatangan pengungsi baru yang membanjiri melalui perbatasan Myanmar sejak kerusuhan Juni lalu. Diperkirakan sejauh ini sekitar 30.000 pengungsi berada di Distrik Cox's Bazaar.

Sejumlah organisasi kemanusiaan internasional seperti Dokter Tanpa Batas (MSF Perancis), Aksi Memerangi Kelaparan (ACF, Inggris) dan Bantuan Muslim (MA Inggris).

Ketua PMI Jusuf Kalla juga mengemukakan bahwa ia telah melakukan pertemuan konsultasi



di Kuala Lumpur dengan wakil-wakil negara anggota OKI dan sejumlah LSM untuk menggalang langkah bersama guna membantu pengungsi Rohingya.

Sementara itu peraih Nobel Perdamaian Aung San Suu Kyi di depan parlemen negara itu baru-baru ini walaupun tidak secara eksplisit menyebut etnis Rohingya, mendesak parlemen negara itu untuk merumuskan pembentukan UU perlindungan hak-hak etnis termasuk etnis minoritas dan pemberian hak-hak yang sederajat.

Pernyataan Suu Kyi tersebut disampaikan sekitar sebulan setelah terjadi bentrokan berdarah antara etnis Rohingya dan kelompok etnis pemeluk Buddha di Arakan, Juni lalu.

Sementara itu Penyelidik Khusus PBB Thomas Quintana dalam pernyataannya (4/8) mendesak pemerintah Myanmar membentuk komisi pencari fakta atas berbagai pelanggaran HAM yang berlangsung di bawah junta militer negara itu termasuk terhadap etnis Rohingya.

Aksi solidaritas terhadap masyarakat Rohingya juga

berlangsung di berbagai kota di Indonesia seperti di Jakarta, Solo, Makassar dan Padangsidempuan yang umumnya mendesak pemerintah RI dan komunitas internasional segera melakukan langkah kongkret untuk membantu warga Rohingya.

Konflik yang dipicu tewasnya seorang wanita pemeluk Buddha di Arakan, Juni lalu menurut laporan organisasi masyarakat Rohingya Burma di Inggris telah menyebabkan 650 etnis Rohingya terbunuh, 1.200 hilang dan 90.000 lainnya mengungsi ke berbagai negara sekitarnya, sementara laporan resmi mengungkapkan, 77 orang tewas, 17 mesjid dan 15 kuil Buddha dan 5.000 bangunan rumah rusak dalam peristiwa tersebut.

Pernyataan-pernyataan sudah dilontarkan, dan sekarang warga Rohingya tentunya menanti dengan penuh harap uluran tangan dan aksi bersama badan-badan dunia, lembaga dan komunitas internasional untuk mengakhiri tragedi kemanusiaan yang dialami etnis Rohingya selama bertahun-tahun. [Reuters/AFP/NS]

Musim Gurita, Masyarakat Ramai-Ramai Ke Pantai

Natuna, - Warga Natuna berduyun-duyun ke pantai Sujung, Minggu, untuk memancing gurita yang saat ini sedang musim. "Saya tiap hari bisa mendapatkan i 40 ekor gurita sebesar dua ons atau lebih," ujar Tuki (56) warga Ranai Darat, Natuna. Musim panen gurita di wilayah Natuna diperkirakan berlangsung hingga hingga Nopember. [ANT]

Kominfo Buka 36 Kanal Tivi Di Kepri

Batam, - Kementerian Komunikasi dan Informatika membuka 36 kanal televisi digital di Provinsi Kepulauan Riau. Menteri Kominfo Tifatul Sembiring di Batam, Sabtu, mengatakann 36 kanal itu berasal dari tiga multiplexing yang dilelang Kominfo. "Sebenarnya ada lima *multiplexing* yang ditawarkan tapi cuma tiga yang laku," kata Menteri. Setiap multiplexing memiliki 12 kanal sehingga di warga Kepri nantinya dapat menikmati 36 kanal televisi. Menteri mengatakan mendulukan Kepri dalam kanal televisi digital mengingat provinsi itu berbatasan dengan enam negara tetangga. Pemerintah tengah mengembangkan teknologi televisi digital untuk melayani kebutuhan masyarakat. Dengan tivi digital maka masyarakat dapat memperoleh kualitas tivi yang lebih beragam. Selama ini, kata Menteri, masyarakat sering mengeluhkan kualitas program tivi yang tidak variatif. "Makanya sekarang, kalau ada ibu-ibu mengeluhkan konten tivi, buat tivi sendiri saja, bisa," kata Menteri. Menurut Menteri, konten tivi yang tidak variatif disebabkan televisi nasional di Indonesia dikuasai lima pemodal yang memiliki lebih dari satu stasiun. Ia mengatakan kementerian tidak mengurus masalah konten, melainkan hanya infrastruktur. "Yang urus konten justru Komisi Penyiaran Indonesia. Selama ini sering salah," kata Menteri. Menteri meminta anggota KPI dan KPID di seluruh Indonesia memperhatikan masalah konten kanal televisi. Bukan soal infrastruktur. []

Tindak Industri Pariwisata Pengabaikan Kebersihan

Keberadaan sampah tak lepas dari kehadiran manusia. Data dari Indonesia Solid Waste Association (InSWa) menyebut, setiap hari seorang manusia rata-rata membuang 0,5 kilogram sampah. Hal ini tak berhenti ketika manusia berpeleisir. Alasan yang dikemukakan seseorang ketika membuang sampah di destinasi wisata adalah kurangnya tempat pembuangan. Atau minimnya jumlah tempat sampah yang ada. []

Nasionalisme & Media Massa Kita

Oleh: Parni Hadi*



Membicarakan nasionalisme dan media massa dalam rangka peringatan ke 67 Proklamasi Kemerdekaan RI sungguh tepat, karena kemerdekaan bangsa Indonesia dari penjajahan adalah hasil penyediaan, penyebaran dan pengobaran semangat kebangsaan oleh para pemimpin pergerakan Indonesia, yang didukung penuh oleh media massa.

Namun, membicarakan nasionalisme dan media massa di era globalisme sekarang, berkat kemajuan teknologi informasi,

tidaklah sederhana seperti pada era kebangkitan nasional satu abad lalu. Sesungguhnya bahwa kebangkitan nasionalisme Indonesia tidak bisa dipisahkan dengan sejarah pers Indonesia. Organisasi Boedi Oetomo yang didirikan Dr. Wahidin Sudirohusodo dan Dr. Sutomo pada tanggal 20 Mei 1908 memiliki harian "Boedi Oetomo", yang kemudian dilanjutkan surat kabar Sedio Tomo, sebagai corong atau alat propagandanya.

Para perintis dan tokoh pergerakan Kemerdekaan Indonesia adalah "four in one" (empat dalam satu): kaum terdidik (cendekiawan), budayawan, wartawan dan pejuang sekaligus, karena tercerahkan oleh "Zeitgeist" atau semangat zaman.

Mereka menyampaikan gagasan dan mengobarkan semangat nasionalisme melalui rapat-rapat anggota perkumpulan secara rutin dan media cetak. Bung Karno menulis di koran "Pikiran Rakyat" dan Bung Hatta di "Daoelat Rakyat". Sebelum itu, RM Tirto Adisoeryo menerbitkan dan memimpin "Medan Prijaji", HOS Tjokroaminoto mendirikan Harian "Oetoesan Hindia", H Agus Salim menerbitkan Harian "Fajar Asia" dan Ki Hajar Dewantoro (Soewardi Soeryaningrat), pendiri Taman Siswa dan Bapak Pendidikan Nasional, ditangkap dan dibuang Pemerintah Penjajahan Belanda karena tulisannya di koran.

Sejak dulu Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu Pendiri Bangsa (*The Founding Fathers and Mothers*) kita menyadari untuk membangkitkan semangat nasionalisme dan membangun karakter bangsa cara yang paling ampuh adalah melalui media massa dan pendidikan. Karena itu, di samping menjadi pemimpin organisasi politik dan sosial-budaya, mereka juga penerbit dan atau penulis, sekaligus terjun sebagai guru. Para Pendiri Bangsa itu sungguh tepat disebut sebagai Guru Bangsa sejati.

Jadi, jika kini banyak himbauan agar media massa turut membangkitkan kembali semangat nasionalisme dan membangun karakter bangsa sudah betul, walau semangat zaman telah berubah. Kini nasionalisme tidak sekedar masalah penjajahan atau pendudukan wilayah secara fisik, budaya asli dan asing serta produk dalam atau luar negeri saja. *Time flies* atau zaman berubah dengan cepat dan telah menyebabkan terjadinya hubungan tali temali yang kompleks, saling mempengaruhi antara yang asli dan asing serta yang dalam dan luar negeri dengan hasil: suatu perpaduan (convergence) yang bersifat global dan dapat diterima oleh umat manusia seluruh dunia. Karena itu muncul istilah "*global civilization*", "*global culture*" and "*global product*". Sengaja memakai beberapa istilah

asing, bukan untuk pamer atau karena tidak bangga dengan bahasa Indonesia, tapi untuk menunjukkan bahwa Indonesia kini mau tak mau harus memahami dan mengamalkan apa yang terkandung dalam istilah-istilah global, jika ingin tetap eksis, maju, dihargai dan bermartabat dalam percaturan global.

Masalahnya kini, bukan bangga atau tidak bangga dengan yang sering disebut secara keliru sebagai “aseli” Indonesia (kecuali yang berasal dari alam langsung, sulit menemukan yang 100 persen aseli), melainkan seberapa besar kontribusi Indonesia dalam produk-produk peradaban komunitas global. Intinya, mampukah kita memenangkan persaingan ketat dengan bangsa-bangsa lain?

Di bidang media massa, memang banyak pihak yang risau dengan sajian media massa akhir-akhir ini, yang ditengarai sebagai bukti kemerosotan nasionalisme dan karakter bangsa Indonesia, akibat kebebasan pers yang hampir tanpa batas. Di antara bukti itu adalah laporan tentang isu SARA (Suku, Agama, Ras dan Antar golongan) saat ini dapat mengancam kemajemukan Indonesia sebagai negara bangsa (*nation-state*), yang terdiri atas berbagai suku, ras, adat istiadat, golongan, strata sosial, budaya dan agama. Bukti lain adalah ekspose secara berlebihan gaya hidup asing, yang mengesankan lupa karakter bangsa.

Menguasai Hajat Hidup

Sejak dulu, lebih-lebih sekarang, media massa (cetak, radio dan televisi) dan media sosial berbasis internet (facebook, twitter dan youtube) menguasai hajat hidup orang banyak. Kini hidup kita tidak dapat lepas dari media massa. Lihat saja, mulai ABG (anak-anak baru gede) sampai orang tua siang malam tak lepas dari HP untuk berkomunikasi dan

mengakses informasi dengan sangat cepat dan semakin murah.

Karena menguasai hajat hidup orang banyak, tentu saja media massa mempunyai peran dan kontribusi besar bagi pembentukan karakter bangsa. Media massa melalui *content/message* atau pesan yang disampaikannya baik secara sengaja dan tidak sengaja mempengaruhi *mindset* (pola pikir) dan perilaku seseorang, sekelompok orang, masyarakat yang menjadi konsumen dari pesan itu.

Karakter adalah ciri-ciri sebagai tanda pengenalan identitas seseorang, sekelompok orang, masyarakat dan bangsa. Karakter dapat dibentuk melalui pembudayaan, yakni penanaman nilai-nilai secara terus menerus baik secara langsung dan tidak langsung sehingga menjadi kebiasaan dalam hidup sehari-hari atau perilaku dari seseorang, sekelompok orang, masyarakat dan bangsa.

Salah satu fungsi mulia media massa adalah mendidik, di samping memberi informasi, menghibur, memberi advokasi, melakukan kontrol sosial, mencerahkan dan memberdayakan. Media massa dapat menjadi pendidik dan sekaligus kontributor bagi pembentukan karakter dengan cara menyampaikan pesan-pesan yang mengandung nilai-nilai luhur dan perbuatan baik untuk diteladani dan hal-hal buruk untuk dihindari.

Agar mampu menjadi kontributor bagi pembentukan karakter bangsa yang mulia (antara lain: jujur, suka menolong, menjunjung tinggi kebenaran, menegakkan keadilan dan bertanggungjawab), pemilik dan pengelola media massa, (para wartawan), harus memiliki dan mengamalkan nilai-nilai luhur. Singkat kata, amalkan dasar falsafah negara Pancasila! Ini gampang diomongkan oleh semua orang, terutama para politisi, tapi sulit dilaksanakan. Alih-alih Pancasila,

para penyeru itu adalah “Jarkoni” (bisa berujar dan mengajar, tapi tidak bisa melakoni).

Pemilik dan pengelola media massa sebagai penyedia pesan (*content providers*) juga manusia biasa, oleh karena itu mereka perlu diawasi oleh lembaga yang bertugas untuk itu (Dewan Pers dan Komisi Penyiaran Indonesia), media watchdogs, lembaga konsumen media, lembaga swadaya masyarakat, publik dan penegak hukum berdasar UU yang mengatur media massa.

Media massa perlu diawasi dan diingatkan untuk mematuhi perintah UU dan Kode Etik. Pengawasan dan peringatan ini perlu juga untuk *citizen journalists/citizen content providers* dan kontributor lepas, termasuk facebookers, tukang tweeter dan pengirim SMS. Yang harus diwaspadai bukan hanya berita/informasi dan hiburan, tetapi juga iklan yang mendorong orang hidup konsumtif dan berperilaku sesat.

Di lain pihak, konsumen atau masyarakat luas juga perlu mendapat pendidikan melek media (*media literacy*) agar mampu memilih, memilah dan memahami secara benar pesan-pesan yang disampaikan media massa, termasuk iklan.

Kemerdekaan plus Kearifan

Sekalipun berperan besar, media massa, pemilik dan pengelolanya bukanlah kontributor tunggal bagi pembentukan karakter. Causa prima atau penyebab utama dan pertama dari sebuah peristiwa yang kemudian dikemas dan disiarkan pada umumnya adalah pihak-pihak di luar media massa, termasuk dalam kelompok ini adalah orang-orang berbudi mulia, juga koruptor, pelaku kerusakan, penjahat dan pelaku tindak asusila.

Oleh karena itu, mengharapakan media massa sebagai pelaku tunggal untuk mengobarkan



semangat nasionalisme dan membangun karakter bangsa adalah sesuatu yang berlebihan. Para kontributor lain, termasuk para pemimpin, pendidik, alim ulama, politisi, tokoh masyarakat dan aparat hukum perlu terlibat secara aktif sesuai tugas dan fungsi masing-masing. Para kontributor dari beragam latar belakang suku, ras, agama, budaya, profesi dan ideologi itu perlu diberi tempat di media massa untuk menyampaikan pesan-pesan mereka.

Agar masing-masing kontributor non media dapat tempat secara proporsional, perlu dihindari adanya pemusatan kepemilikan media yang berujung ke monopoli opini dan hegemoni makna. *Diversity of ownership and diversity of opinion* (Keragaman kepemilikan dan keragaman opini) itulah prinsip yang dipegang oleh para penyusun UU tentang Pers no 40 tahun 1999 dan RUU Penyiaran sebagai pengganti UU No. 32 tahun 2002 tentang Penyiaran.

Saya setuju sepenuhnya himbuan agar media massa berlaku arif (*wise*) dengan tidak menyiarkan fakta yang punya pengaruh buruk secara telanjang apa adanya, apalagi dibumbui sensasi berlebihan dan diulang-ulang hingga mudah ditiru dan

dapat memecah belah persatuan NKRI serta menggerus nasionalisme.

Himbau itu adalah bagian pengawasan publik atas media massa. Penyampaian informasi/pemberitaan tentang kasus SARA memang memerlukan kearifan, tapi tanpa harus mengorbankan kebenaran dan keadilan serta kritik atas ketidakmampuan penyelenggara negara demi perbaikan kinerja mereka.

Untuk menjunjung tinggi hak azasi manusia, sekaligus mewujudkan masyarakat Indonesia yang pluralis, multi kultural, media massa perlu menampilkan berbagai kearifan lokal yang terkandung dalam bentuk kesenian dan kebudayaan semua suku bangsa untuk diramu dan kembangkan menjadi kebudayaan nasional Indonesia sebagai salah satu sumber pembentukan karakter bangsa. Perlu juga disadari bahwa tidak semua nilai yang berasal dari luar Indonesia jelek dan harus dihindari, tapi penyajian dan penyampaiannya memerlukan kearifan.

Singkat kata, saya tidak setuju dengan seruan untuk menunjukkan nasionalisme, media massa harus menerapkan semboyan *"Right or wrong my country"* (benar atau salah negara saya) atau membela secara membabi buta Indonesia karena

kesalahan oknum penyelenggara negara. Itu pembodohan atau kebohongan publik. Kita harus laksanakan: *"If my country is wrong, we make it right"* (Jika negara saya salah, saya harus meluruskannya).

Lebih-lagi, saya menolak keras seruan untuk kembali ke sistem pers zaman Orde Baru dan sebelumnya, yang memungkinkan pembreidelan pers. Kemerdekaan pers yang ada sekarang jauh lebih baik dan bermanfaat bagi publik dibandingkan sebelumnya. Tanpa kebebasan pers, ketidakadilan, kezaliman dan korupsi akan bersimharajalela.

Inilah saya pikir semangat nasionalisme yang harus diamalkan dan dikobarkan oleh media massa kita di era global sekarang: mencerdaskan, mencerahkan, menegakkan kebenaran dan keadilan, menggelorakan semangat bersaing dan memberdayakan rakyat menuju Indonesia yang adil dan makmur serta bermartabat dalam percaturan global.^[NS]

*Wartawan sejak 1973, mantan Pemimpin Umum/Pemred Republika, Dirut (Pemimpin Umum/Pemred) Kantor Berita Nasional ANTARA serta Dirut RRI. Kini Pemimpin Umum Majalah Swaracita, terbitan Dompot Dhuafa, kolumnis, pembicara dan aktivis sosial. Bisa dihubungi di parnihadi@yahoo.com



Provinsi	14000
Berdiri	2 Juli 1958
Iskods	14000
Luar Wilayah	55.430 km ²
Jumlah Penduduk	2.575.731 jiwa (2010)
Pemerintahan Daerah	9 Kabupaten, dan 1 Kota
Head Office	Kabupaten Sembak, Kancil, dan Talo

PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAMBI

VISI

**"TERWUJUDNYA EKONOMI MAJU, AMAN,
ADIL DAN SEJAHTERA (JAMBI EMAS)**

Panca Misi Pembangunan Lima Tahun

1. Meningkatkan kualitas dan ketersediaan infrastruktur pelayanan umum.
2. Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan, kehidupan beragama dan kebudayaan.
3. Meningkatkan Perekonomian Daerah dan Pendapatan Masyarakat berbasis Agribisnis dan Agro Industri.
4. Meningkatkan Pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) yang optimal dan berwawasan lingkungan.
5. Meningkatkan Tata Pemerintahan yang baik, jaminan kepastian dan perlindungan hukum serta kesetaraan Gender dan Perlindungan Anak.

10 Program Prioritas Provinsi Jambi 2010 - 2015

1. Membangun dan meningkatkan infrastruktur jalan, irigasi, listrik, air bersih dan kawasan potensial yang sulit dijangkau pembangunan serta mempercepat pembangunan infrastruktur penunjang pelabuhan Muara Sabak dan Kuala Tungkal dan membangun pelabuhan alternatif untuk melayani ekspor-impor.
2. Merenovasi 5.000 unit rumah tidak layak huni dan pemberian 10.000 sertifikat gratis per tahun bagi keluarga miskin.
3. Membangun SMK di setiap Kabupaten/Kota, pemberian beasiswa S1, S2, dan S3, dan mempercepat proses sertifikasi guru dengan kerjasama dengan perguruan tinggi melalui program "satu milyar satu produk" bagi peneliti yang inovatif.
4. Memperkuat nilai-nilai agama dan budaya dalam kehidupan bermasyarakat termasuk pengurus utamaan gender dan perlindungan anak.
5. Membantu biaya operasional seluruh puskesmas di Provinsi Jambi untuk pelayanan masyarakat kurang mampu.
6. Membangun Pusat Olahraga Terpadu atau Jambi Sport Center (JSC).
7. Mengurangi pengangguran dengan cara memberikan modal usaha bagi UMKM senilai Rp5jt/unit usaha untuk 1.000 UMKM per tahunnya.
8. Meningkatkan nilai tambah petani dengan cara membangun industri hilir CPO dan karet serta membangun pabrik pupuk organik dan pakan ternak.



Drs. H. Hasan Basri Agus, MM
Gubernur Jambi 2010 - 2015

Drs. H. Fachrori Umar, M.Hum
Wakil Gubernur Jambi 2010 - 2015

9. Meningkatkan kelestarian Sungai Batanghari, melakukan restorasi lahan-lahan yang terancam serta mengelola areal pasca tambang dengan pertimbangan lingkungan.
10. Meningkatkan kinerja birokrasi antara lain dengan melanjutkan pemberian TKD, membentuk Lembaga Arbitrase Daerah dalam rangka percepatan penyelesaian konflik lahan di Provinsi Jambi dan memberi bantuan hukum gratis bagi keluarga kurang mampu.

SEJARAH BERDIRINYA PROVINSI JAMBI

Dengan berakhirnya masa kesultanan Jambi menyusul gugurnya Sulthan Thaha Saifuddin tanggal 27 April 1904 dan berhasilnya Belanda menguasai wilayah-wilayah Kesultanan Jambi, maka Jambi ditetapkan sebagai Keresidenan dan masuk ke dalam wilayah Nederlandsch Indie. Residen Jambi yang pertama O.L Helfrich yang diangkat berdasarkan Keputusan Gubernur Jenderal Belanda No. 20 tanggal 4 Mei 1906 dan pelantikannya dilaksanakan tanggal 2 Juli 1906.

Kekuasaan Belanda atas Jambi berlangsung ± 36 tahun karena pada tanggal 9 Maret 1942 terjadi peralihan kekuasaan kepada Pemerintahan Jepang. Dan pada 14 Agustus 1945 Jepang menyerah pada sekutu. Tanggal 17 Agustus 1945 diproklamkanlah Negara Republik Indonesia. Sumatera disaat Proklamasi tersebut menjadi satu Provinsi yaitu Provinsi Sumatera dan Medan sebagai ibukotanya dan MR. Teuku Muhammad Hasan ditunjuk memegang jabatan Gubernurnya.

Pada tanggal 18 April 1946 Komite Nasional Indonesia Sumatera bersidang di Bukittinggi memutuskan Provinsi Sumatera terdiri dari tiga Sub Provinsi yaitu Sub Provinsi Sumatera Utara, Sumatera Tengah dan Sumatera Selatan. Sub Provinsi Sumatera Tengah mencakup keresidenan Sumatra Barat, Riau dan Jambi. Tarik menarik Keresidenan Jambi untuk masuk ke Sumatera Selatan atau Sumatera Tengah ternyata cukup alot dan akhirnya ditetapkan dengan pemungutan suara pada Sidang KNI Sumatera tersebut dan Keresidenan Jambi masuk ke Sumatera Tengah. Sub-sub Provinsi dari Provinsi Sumatera ini kemudian dengan undang-undang nomor 10 tahun 1948 ditetapkan sebagai Provinsi.

Dengan UU.No. 22 tahun 1948 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah keresidenan Jambi saat itu terdiri dari 2 Kabupaten dan 1 Kota Praja Jambi. Kabupaten-kabupaten tersebut adalah Kabupaten Merangin yang mencakup Kewedanaan Muara Tebo, Muaro Bungo, Bangko dan Batanghari terdiri dari kewedanaan Muara Tembesi, Jambi Luar Kota, dan Kuala Tungkal. Masa terus berjalan, banyak pemuka masyarakat yang ingin keresidenan Jambi untuk menjadi bagian Sumatera Selatan dan dibagian lain ingin tetap bahkan ada yang ingin berdiri sendiri. Terlebih dari itu, Kerinci kembali dikehendaki masuk Keresidenan



Jambi, karena sejak tanggal 1 Juni 1922 Kerinci yang tadinya bagian dari Kesultanan Jambi dimasukkan ke keresidenan Sumatera Barat tepatnya jadi bagian dari Kabupaten Pesisir Selatan dan Kerinci (PSK)

Tuntutan keresidenan Jambi menjadi daerah Tingkat I Provinsi diangkat dalam Pernyataan Bersama antara Himpunan Pemuda Merangin Batanghari (HP.MERBAHARI) dengan Front Pemuda Jambi (FROPEJA) Tanggal 10 April 1954 yang diserahkan langsung Kepada Bung Hatta Wakil Presiden di Bangko, yang ketika itu berkunjung kesana. Penduduk Jambi saat itu tercatat kurang lebih 500.000 jiwa (tidak termasuk Kerinci) Keinginan tersebut diwujudkan kembali dalam Kongres Pemuda se-Daerah Jambi 30 April – 3 Mei 1954 dengan mengutus tiga orang delegasi yaitu Rd. Abdullah, AT Hanafiah dan H. Said serta seorang penasehat delegasi yaitu Bapak Syamsu Bahrin menghadap Mendagri Prof. DR.MR Hazairin.

Berbagai kebulatan tekad setelah itu bermunculan baik oleh gabungan parpol, Dewan Pemerintahan Marga, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Merangin, Batanghari. Puncaknya pada kongres rakyat Jambi 14-18 Juni 1955 di gedung bioskop Murni terbentuklah wadah perjuangan Rakyat Jambi bernama Badan Kongres Rakyat Djambi (BKRK) untuk mengupayakan dan memperjuangkan Jambi menjadi Daerah Otonomi Tingkat I Provinsi Jambi. Pada Kongres Pemuda se-daerah Jambi tanggal 2-5 Januari 1957 mendesak BKRK menyatakan Keresidenan Jambi secara de facto menjadi Provinsi selambat-lambatnya tanggal 9 Januari 1957 .

Sidang Pleno BKRK tanggal 6 Januari 1957 pukul 02.00 dengan resmi menetapkan keresidenan Jambi menjadi Daerah Otonomi Tingkat I Provinsi yang berhubungan langsung dengan pemerintah pusat dan keluar dari Provinsi Sumatera Tengah. Dewan Banteng selaku penguasa pemerintah Provinsi Sumatera Tengah yang telah mengambil alih pemerintahan Provinsi Sumatera Tengah dari Gubernur Ruslan Mulyohardjo pada tanggal 9 Januari 1957 menyetujui keputusan BKRK.

Pada tanggal 8 Februari 1957 Ketua Dewan Banteng Letkol Ahmad Husein melantik Residen Djamin gr. Datuk Bagindo sebagai acting Gubernur dan H. Hanafi sebagai wakil Acting Gubernur Provinsi Djambi, dengan staff 11 orang yaitu Nuhan, Rd. Hasan Amin, M. Adnan Kasim, H.A. Manap, Salim, Syamsu Bahrin, Kms. H.A.Somad. Rd. Suhur, Manan, Imron Nungcik dan Abd Umar yang dikukuhkan dengan SK No. 009/KD/U/L KPTS. tertanggal 8 Februari 1957 dan sekaligus meresmikan berdirinya Provinsi Jambi di halaman rumah Residen Jambi (kini Gubernuran Jambi).

Pada tanggal 9 Agustus 1957 Presiden RI Ir. Soekarno akhirnya menandatangani di Denpasar Bali. UU Darurat No. 19 tahun 1957 tentang Pembentukan Provinsi Sumatera Barat, Riau dan Jambi. Dengan UU No. 61 tahun 1958 tanggal 25 Juli 1958 UU Darurat No. 19 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Daerah Sumatera Tingkat I Sumatera Barat, Djambi dan Riau. (UU tahun 1957 No. 75) sebagai Undang-undang.

Dalam UU No. 61 tahun 1958 disebutkan pada pasal 1 huruf b, bahwa daerah Swatantra Tingkat I Jambi wilayahnya mencakup wilayah daerah Swatantra Tingkat II Batanghari, Merangin, dan Kota Praja Jambi serta Kecamatan-Kecamatan Kerinci Hulu, Tengah dan Hilir.

Kelanjutan UU No. 61 tahun 1958 tersebut pada tanggal 19



Desember 1958 Mendagri Sanoesi Hardjadinata mengangkat dan menetapkan Djamin gr. Datuk Bagindo Residen Jambi sebagai Dienst Doend DD Gubernur (residen yang ditugaskan sebagai Gubernur Provinsi Jambi dengan SK Nomor UP/5/8/4).

Pejabat Gubernur pada tanggal 30 Desember 1958 meresmikan berdirinya Provinsi Jambi atas nama Mendagri di Gedung Nasional Jambi (sekarang gedung BKOW). Kendati dejure Provinsi Jambi di tetapkan dengan UU Darurat 1957 dan kemudian UU No. 61 tahun 1958 tetapi dengan pertimbangan sejarah asal-usul pembentukannya oleh masyarakat Jambi melalui BKRK maka tanggal Keputusan BKRK 6 Januari 1957 ditetapkan sebagai hari jadi Provinsi Jambi, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Provinsi Djambi Nomor. 1 Tahun 1970 tanggal 7 Juni 1970 tentang Hari Lahir Provinsi Djambi.



PENGERTIAN LAMBANG DAERAH

1. Bidang dasar persegi lima : Melambangkan jiwa dan semangat PANCASILA Rakyat Jambi.
2. Enam lobang mesjid dan satu keris serta fondasi mesjid dua susun batu diatas lima dan dibawah tujuh : Melambangkan berdirinya daerah Jambi sebagai daerah otonom yang berhak mengatur rumahtangganya sendiri pada tanggal 6 Januari 1957.
3. Sebuah mesjid : Melambangkan keyakinan dan ketaatan Rakyat Jambi dalam beragama.
4. Keris Siginjai : Keris Pusaka yang melambangkan kepahlawanan Rakyat Jambi menentang penjajahan dan kezaliman menggambarkan bulan berdirinya Provinsi Jambi pada bulan Januari.
5. Cerana yang pakai kain penutup persegi sembilan : Melambangkan Keiklasan yang bersumber pada keagungan Tuhan menjiwai Hati Nurani.
6. GONG : Melambangkan jiwa demokrasi yang tersimpul dalam pepatah adat "BULAT AIR DEK PEMBULUH, BULAT KATO DEK MUFAKAT".
7. EMPAT GARIS : Melambangkan sejarah rakyat Jambi dari kerajaan Melayu Jambi hingga menjadi Provinsi Jambi.
8. Tulisan yang berbunyi: "SEPUCUK JAMBI SEMBILAN LURAH" didalam satu pita yang bergulung tiga dan kedua belah ujungnya bersegi dua melambangkan kebesaran kesatuan wilayah geografis 9 DAS dan lingkup wilayah adat dari Jambi : "SIALANG BELANTAK
9. BESI SAMPAI DURIAN BATAKUK RAJO DAN DIOMBAK NAN BADABUR, TANJUNG JABUNG".



Bashar Al-Assad Bertahan... Sampai Kapan?

Jakarta, (Swantara) – Revolusi bersenjata di Suriah agaknya sudah berada di penghujung jalan, akan segera berakhir, tinggal menghitung hari, pertanyaannya, apakah Presiden Bashar al-Assad akan mengalami nasib tragis seperti dialami pemimpin Arab lain yang digulingkan dari singgasananya.

Pemimpin Libya Muamar Gadafi tewas secara mengenaskan setelah tertangkap di kota Sirte, dan langsung dieksekusi oleh massa yang menentangnya dalam revolusi lalu, sementara Presiden Irak Saddam Husein setelah tertangkap pasukan AS, harus mengakhiri ajalnya di tiang gantungan. Nasib agak lebih baik dialami mantan Presiden Husni Mubarak yang diadili dan menjalani hukuman seumur hidup setelah digulingkan dalam aksi unjukrasa berhari-hari di lapangan Tahrir, Kairo.

Berdasarkan laporan kantor berita asing, pertempuran antara kelompok perlawanan,

Tentara Pembebasan Suriah (FSA) dengan pasukan pendukung rezim al-Assad masih berlangsung Minggu lalu terutama di kawasan seputar ibukota Suriah, Damaskus di Distrik Berze, Kafr Souseh, Midan dan Qabun, sehingga mendorong ratusan warga mengungsi untuk menyelamatkan diri.

Sebelumnya kelompok oposisi juga berhasil melakukan aksi pemboman ke Markas Besar Biro Keamanan Nasional di Damaskus yang menyebabkan tewasnya empat pejabat tinggi militer.

Ratusan orang dilaporkan tewas termasuk puluhan warga sipil akibat serangan pasukan pemerintah ke kota dagang terbesar di wilayah utara Suriah, Aleppo sehingga menambah jumlah korban menjadi sekitar 19.000 orang yang tewas sejak pecahnya revolusi bersenjata di sana dalam 16 bulan terakhir ini.

Tentara Suriah juga dilaporkan tengah mengerahkan kekuatannya dengan menarik pasukannya di

perbatasan Turki untuk menyerang konsentrasi pasukan oposisi di Aleppo di tengah kekhawatiran pihak Barat bahwa militer akan senjata kimia yang dimilikinya ke tangan kelompok militan, Heszollah atau Alqaeda.

Pengakuan Suriah tentang kepemilikan senjata kimia disampaikan oleh Jubir Kemlu negara itu, Jihad Makdissi, yang menyatakan tentara tidak akan menggunakan senjata kimia untuk membunuh rakyat kecuali terhadap serangan dari luar.

Rezim Assad juga mengalami pukulan besar akibat aksi pembelotan tokoh-tokoh penting di pemerintahannya seperti diplomatnya yang ditempatkan di luar negeri yakni dubesnya untuk Uni Emirat Arab, Abdel Latif al-Dabbagh, dubes untuk Siprus, Lamia al-Hariri dan, dubes itu untuk Irak, Nawaf Fares.

Salah seorang anggota parlemen, Ikhlas al-Badawie

juga dilaporkan kabur ke Turki, padahal saat itu ia berada di Aleppo dan diminta untuk meninggalkan Aleppo sebelum tentara pro pemerintah menyerbu salah satu kota basis perlawanan oposisi tersebut

Bahkan berdasarkan laporan terakhir kantor-kantor berita asing (6/8), PM Riyadh Hijab juga telah membelot dan saat ini sudah berada di Jordania bersama keluarganya.

Pasukan FSA dilaporkan sudah berhasil menduduki pintu gerbang di perbatasan antara Suriah an Turki serta gerbang perbatasan negara itu dengan Irak dan sedang berupaya merebut bandara Damaskus yang dipertahankan mati-matian oleh pasukan yang loyal pada Assad.

Bukannya mundur, al-Assad, seperti yang dilaporkan oleh para saksi mata malah memerintahkan pasukannya untuk melakukan pembantaian ke basis-basis kelompok perlawanan seperti yang dilakukan di desa Treimseh, dekat kota Hama di utara Damaskus, pada 12 Juli lalu.

Pasukan el-Assad dilaporkan menggempur desa tersebut yang dianggap sebagai basis kelompok perlawanan dengan jet-jet tempur MiG, helikopter serang, tank dan artileri berat sebelum mengerahkan tentara dan milisi pro-pemerintah dengan konvoi truk untuk membantai lebih 200 warga desa yang mereka jumpai di jalan-jalan desa Treimseh.

Kantor Berita Pemerintah, dalam pernyataannya, berdalih bahwa pasukan pemerintah justeru diterjunkan ke desa tersebut untuk menghentikan aksi kelompok teroris yang melancarkan serangan ke sana.

Bashar al-Assad yang tidak jelas keberadaannya sejak empat jenderalanya terbunuh beberapa pekan lalu menyemangati pasukannya yang sedang

mengepung Aleppo yang dinilainya sangat heroik dalam pertempuran yang akan menentukan nasib bangsanya tersebut.

Sampai berita ini diturunkan, berdasarkan laporan kantor-kantor berita asing, pemerintah Suriah telah mengerahkan 20.000 pasukannya untuk mengepung Aleppo, kota kedua terbesar di negara itu yang berpenduduk sekitar 2,5 juta jiwa.

Sementara itu, Liga Arab, dalam upaya mencegah jatuhnya lebih banyak korban terutama warga sipil, menawarkan solusi penyelesaian konflik bersenjata di Suriah dengan meminta Presiden Assad meletakkan kekuasaannya, dan sebagai kompensasinya, ia akan mendapatkan jalan keluar yang aman dari negerinya.

Di Doha (23/7), Ketua Liga Arab yang membidangi masalah Suriah, PM dan juga menjabat Menlu Qatar Sheik Hamd bin Jaseem al Thani mengemukakan, negara-negara anggota Liga Arab bersepakat untuk mencari jalan yang aman bagi Assad jika ia bersedia mengundurkan diri dan menghentikan pertumpahan darah di negeri yang dipimpinnya.

Sheik Hamd membujuk Assad dengan mengatakan bahwa jika ia bersedia menerima tawaran Liga Arab tersebut, Assad berarti telah melakukan langkah berani demi menyelamatkan rakyat dan negaranya. "Bukan tindakan melarikan diri," ujarnya.

Namun sejauh ini, Jubir Kemenlu Suriah, Jihad Maqdas dalam pernyataannya malah menuding Liga Arab mencampuri urusan dalam negerinya, padahal menurut dia, Suriah adalah pendiri Liga Arab.

Seruan Liga Arab bagi pengunduran Assad memang belum menyebutkan secara detail bentuk jalan keluar yang aman

bagi Assad untuk meninggalkan negerinya jika ia bersedia mengundurkan diri, namun Liga Arab sebelumnya telah berkali-kali menyarankan skenario seperti yang dilakukan terhadap solusi konflik politik dalam negeri Yaman.

Dalam kasus kemelut politik di Yaman, Liga Arab meminta Presiden Yaman Ali Abdullah Saleh mengundurkan diri dan menyerahkan kekuasaan pada wakil presidennya dan sebagai kompensasinya ia tidak dikenakan sanksi hukum atas pelanggaran hukum yang dilakukan saat ia berkuasa.

Sebaliknya, kelompok perlawanan sendiri juga menentang cara penyelesaian seperti yang dilakukan untuk menakhiri krisis politik Yaman tersebut, dan bersumpah untuk tidak membiarkan Assad memperoleh suaka politik.

Ketua Dewan Nasional Suriah (SNC) Abdel Basset Sayda menegaskan bahwa yang diinginkan kelompok oposisi hanyalah utuk menyeret Assad ke meja hijau atas kejahatan perang yang dilakukan terhadap rakyatnya dan tidak tertarik untuk menyepakati cara penyelesaian model Yaman.

Di Dewan Keamanan PBB sendiri, Rusia sejauh ini masih bersikeras untuk menolak setiap ancaman sanksi dan intervensi asing terhadap krisis yang terjadi di Suriah karena menganggap nasib Suriah harus ditentukan oleh pihak-pihak yang bertikai di negeri itu.

Putaran waktu jua yang akan membuktikan, apakah Assad akan mengalami nasib tragis seperti yang dialami Saddam Husein atau Muamar Gadaffi, kecuali jika ia segera sadar atau hatinya melunak untuk bersedia lengser demi menyelamatkan negaranya dari kehancuran dan menghindari pembantaian terhadap rakyatnya. [Reuters/AFP/NS]

Tempe Bisa Picu Gejolak Sosial, Lho!

Jakarta, (Swantara) - "Bangsa Indonesia bukan bangsa tempe," ungkapan ini dulu sering dikumandangkan oleh proklamator dan pemimpin bangsa, Bung Karno di massa lalu jika merasa dilecehkan atau untuk menyemangati rakyat agar tidak merasa rendah diri bersaing, disejajarkan atau berhadapan dengan bangsa lain.

Namun jangan main-main dan anggap remeh. Saat tempe raib dari pasar-pasar - walaupun ada harganya tidak lagi merakyat - jika situasi ini terus berlanjut, dikhawatirkan para perajin tahu tempe akan gulung tikar, dan pada gilirannya, masyarakat konsumen tahu-tempe pasti akan protes, sehingga ujung-ujungnya bisa menyulut gejolak sosial.

Betapa tidak, tempe atau 'saudara kembarnya', tahu, menjadi menu andalan sehari-hari yang hampir tidak pernah absen menghiasi meja makan di rumah-rumah, tidak terbatas di Pulau Jawa saja, tetapi dikonsumsi oleh penduduk dari Sabang sampai Merauke - dua kota di paling ujung timur dan paling ujung barat wilayah NKRI - yang menjadi simbol kesatuan dan luasnya bentangan wilayah nusantara.

Konon kabarnya, Timor Leste yang dulu sempat berintegrasi dengan Indonesia namun kemudian merdeka melalui referendum, warganya tetap mengkonsumsi tempe yang tetap mudah dijumpai di pasar-pasar di kota-kota di negara sampai hari ini.

Fakta inilah yang terjadi sejak menjelang Ramadhan, awal Juli lalu, di satu pihak, perajin tahu tempe menjerit, karena semakin sulit mendapatkan pasokan kedelai, sementara margin laba pun tergerus, sebaliknya konsumen tahu-tempe juga berteriak, karena naiknya harga membuat anggaran belanja mereka terbebani

Rasa "galau" tidak saja dialami oleh masyarakat penggemar tempe, tetapi juga para perajin tahu-tempe di seluruh Indonesia yang telah berusaha menyasiasi usahanya dengan 'mengerdilkan' ukuran tahu-tempe, sekaligus menaikkan harga jualnya akibat terus membubungnya harga kedelai di pasar internasional.

Lonjakan harga tahu tempe tidak terhindari seiring naiknya harga internasional akibat anjloknya produksi kedelai di kedua negara penghasil kedelai

utama dunia (60 persen), Amerika Serikat dan Brazil yang dilanda kekeringan, walaupun Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) masih menginvestigasi adanya indikasi ulah kartel importir kedelai yang ikut 'numpang' untuk mempermainkan harga.

Ungkapan kekhawatiran akan bangkrutnya kegiatan usaha perajin tahu tempe bermunculan dari daerah-daerah, seperti disampaikan Himpunan Pengusaha Pribumi (HIPPI) Palembang (2/8) yang menyerukan agar pemerintah turun tangan menahan laju kenaikan harga kedelai. "Jika harga kedelai, tidak turun-turun, para perajin tahu tempe akan gulung tikar," demikian isi pernyataan HIPPI.

Suryana, perajin tempe di Pare-Pare, mengaku terpaksa memberhentikan dua dari empat karyawannya untuk menekan biaya produksi, selain mengecilkan ukuran tempe yang dijualnya dan menaikkan harga jual. Keluhan sama juga dilontarkan oleh sejumlah perajin di berbagai wilayah, baik di P Jawa maupun di wilayah lainnya.

Hajjah Lilis, perajin tahu tempe di Ciracas, Jakarta Timur yang sudah merintis usahanya sejak 20 tahun lalu, ketika ditemui Swantara (29/7) mengaku ia sudah tiga hari menghentikan kegiatannya untuk mengikuti seruan mogok dari Induk Koperasi Tahu Tempe Indonesia (Inkopti) sehubungan dengan naiknya harga kedelai.

"Karyawan tetap hadir, tetapi tidak kerja," tuturnya seraya menambahkan, dengan aksi mogok tersebut ia dan rekan-rekan perajin tahu tempe lainnya berharap agar pemerintah mendengarkan jeritan mereka. Menurut dia, sesuai dengan anjuran Inkopti, para perajin akan meneruskan aksi mogoknya sampai harga kedelai turun.

Pada hari-hari sebelumnya Lilis masih bertahan untuk meneruskan usahanya dengan mengakali ukuran tahu tempe dan menaikkan harga jual, walaupun laba yang diperolehnya menyusut, dari Rp2.500 per Kg kedelai yang diolah, menjadi Rp1.000, dan juga akibat sepiunya pembeli.

Namun Lilis masih menggantungkan harapannya, suatu saat nanti harga kedelai kembali ke tingkat normal, sehingga ia bisa



meneruskan usahanya sebagai perajin tahu tempe yang sudah digelutinya sejak 20 tahun lalu.

Masalah pengembangan kedelai, memang cukup rumit, harus dilihat dari berbagai aspek, misalnya saja dari sisi produktivitas, tanaman, kedelai lokal hanya menghasilkan sekitar 1,4 ton per HA, tertinggal jauh dibandingkan dengan di negara produsen kedelai lainnya seperti AS dan Brazil yang bisa mencapai tiga ton.

Penelitian tanaman kedelai di Indonesia, memang tidak semaju tanaman padi yang telah menghasilkan puluhan varietas padi unggul. Indonesia juga pernah mencanangkan swasembada kedelai, saat mencapai swasembada beras pada dekade '80-an, namun nyatanya, jumlah impor terus meningkat, salah satu alasannya, permintaan kedelai yang terus meningkat karena juga digunakan untuk campuran pakan ternak.

Di pihak lain, untuk memenuhi kebutuhan, pemerintah terpaksa membuka keran impor, ini juga dilematis, karena kebijakan ini jelas tidak propetani lokal. Sebaliknya, petani sendiri juga bingung, karena dengan produktivitas rendah, untuk menaikkan margin laba, harga jual harus tinggi, padahal dengan menjual produk dengan harga tinggi, selain akan diprotes oleh perajin dan masyarakat konsumen tahu tempe, juga tidak akan laku karena akan kalah bersaing dengan kedelai impor.

Belum lagi di sisi pemanfaatan lahan, sebagian petani kedelai juga mulai beralih ke tanaman

lain seperti tanaman padi, sayur-mayur, tomat atau bawang yang lebih menguntungkan.

Kepala Dinas Tanaman Pangan Cianjur, Sudrajat Laksana (3/8) mengakui, petani di wilayah tersebut lebih suka menanam padi ketimbang kedelai, karena dengan waktu panen yang sama menanam padi lebih menguntungkan.

"Petani paling menanam kedelai untuk selingan (di sela dua kali panen padi setiap tahun), "tuturnya.

Tanpa insentif dari pemerintah, agaknya petani juga tidak bisa didorong untuk menanam kedelai, hal itu terbukti, pada saat produktivitas masih rendah, areal tanam kedelai justru menyusut dari 1,6 juta HA menjadi sekitar 600.000 HA, akibatnya volume impor kedelai juga terus membengkak menjadi 1,2 juta ton atau 70 persen dari sekitar 2,2 juta ton kebutuhan kedelai pada 2012.

Gejolak harga kedelai termasuk salah satu masalah ketahanan pangan sehingga selayaknya dicari dicari solusi, baik untuk jangka pendek, jangka menengah maupun jangka panjang.

Program penelitian untuk menghasilkan varietas kedelai unggul yang produktivitasnya tinggi perlu diseriusi, dibarengi dengan perluasan (ekstensifikasi) areal tanam, pengendalian stok, tata niaga dan regulasi, termasuk pemberian insentif bagi petani, menciptakan substitusi bahan mentah tahu tempe selain kedelai, juga program diversifikasi pangan untuk menekan konsumsi kedelai.^[NS]



LEON MUHAMAD
Dirjen Perhubungan Laut
Kementerian Perhubungan RI



DIRJEN PERHUBUNGAN LAUT KEMENTERIAN PERHUBUNGAN RI

Perkembangan teknologi di bidang perkapalan, kepelabuhanan dan angkutan laut pada dekade terakhir ini terus mengalami perkembangan yang luar biasa, termasuk di Indonesia. Untuk mengatasi masalah tersebut, langkah dan kebijakan apakah yang dilakukan pemerintah dalam hal ini Ditjen Perhubungan Laut.

Sehubungan dengan perkembangan teknologi kepelabuhanan, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut selalu melakukan updating tentang teknologi-teknologi kepelabuhanan. Dalam pelaksanaannya selalu disesuaikan dengan keadaan, dimana disadari penggunaan teknologi tinggi yang masuk hampir bisa dipastikan memerlukan biaya yang besar. Selama memang diperlukan, serta Negara dapat membiayai (dari APBN/PHLN), maka pembangunan pelabuhan (onshore/offshore/dredging) dengan menggunakan teknologi tinggi dapat dilaksanakan.



Sejalan dengan perkembangan ketenagakerjaan dan teknologi di bidang kelautan, pariwisata juga mengalami perkembangan yang luar biasa, termasuk di Indonesia. Kunjungan wisatawan luar negeri ke Indonesia dengan menggunakan kapal laut terus mengalami peningkatan luar biasa. Kebijakan apakah yang dilakukan pemerintah dalam hal ini Ditjen Perhubungan Laut untuk mengantisipasi hal tersebut.

Pemerintah dalam hal ini Ditjen Perhubungan Laut sangat mendukung kegiatan pariwisata terutama yang menggunakan pelabuhan. Saat ini Ditjen Perhubungan Laut telah berusaha mengakomodasi kegiatan pariwisata dengan melakukan beberapa kegiatan sebagai berikut :

- 1) Pengembangan Pelabuhan Tanah Ampo sebagai Pelabuhan Wisata dengan Skema KPS (sesuai dengan PPP Book Bappenas tahun 2011)
- 2) Pengerukan alur pada Pelabuhan Benoa, Pelabuhan Belawan, Pelabuhan Tanjung Emas, Pelabuhan Tanjung Perak, Pelabuhan Probolinggo, Pelabuhan Celukan Bawang, Pelabuhan Waikelo, dan Pelabuhan Kumai untuk mengakomodasi kapal cruise dengan ukuran yang lebih besar

Selain itu, Ditjen Perhubungan Laut telah merencanakan beberapa studi untuk mendukung kegiatan pariwisata, yaitu:

- 1) Studi Peningkatan Pelayanan Terminal Penumpang, untuk mengakomodir naik turunnya penumpang, termasuk penumpang kapal cruise
- 2) Studi Pengembangan Cruise Terminal, untuk melihat pelabuhan-pelabuhan mana saja yang memiliki potensi untuk dibangun terminal cruise, disinkronkan dengan Masterplan Lokasi Wisata yang dikeluarkan oleh Kementerian Pariwisata

Euforia reformasi pasca otonomi daerah terutama di bidang pembangunan infrastruktur terkesan kebablasan sehingga setiap daerah mengusulkan pembangunan pelabuhan yang berskala internasional. Bagaimana kebijakan pemerintah dalam hal ini Ditjen Perhubungan laut dalam menata kembali sistem angkutan laut yang handal dan efisien serta mendukung terselenggaranya Sistem Transportasi Nasional .

Ditjen Perhubungan Laut saat ini sedang menyusun konsep Rencana Induk Pelabuhan Nasional (RIPN) dan Tatanan Kepelabuhanan Nasional (TKN) yang sedang dalam tahap pembahasan akhir. RIPN dan TKN memuat peran, fungsi, jenis, dan hierarki pelabuhan, seluruh Indonesia, dan pembangunan dan pengembangan yang akan dilakukan di setiap pelabuhan harus disesuaikan dengan peran, fungsi, jenis dan hierarki pelabuhan tersebut. Sehingga, diharapkan pembangunan infrastruktur kepelabuhanan tidak semata-mata karena keinginan daerah, tapi juga harus sesuai dengan RIPN dan TKN.

Pemerintah telah menetapkan kebijakan baru kehadiran Badan Otoritas Pelabuhan (BOP) dalam mata rantai pola pelayanan jasa perhubungan. Sampai saat ini bagaimana pelaksanaan kebijakan tersebut di lapangan, serta bagaimana hasil yang telah dicapai, terutama dalam hal pembagian tugas di lapangan terkait dengan lembaga yang selama ini telah ada.

Otoritas Pelabuhan dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran, dan Peraturan Pemerintah Nomor 61 tahun 2009 tentang Kepelabuhanan. Saat ini Otoritas Pelabuhan sebagai regulator mempunyai tugas melaksanakan pengaturan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan kepelabuhanan pada pelabuhan yang diusahakan secara komersial, sedangkan Badan Usaha Pelabuhan hanya berperan sebagai operator.

Saat ini jumlah kantor Otoritas Pelabuhan sebanyak 4 (empat) lokasi, sebagai berikut:

- 1) Otoritas Pelabuhan I di Belawan;
- 2) Otoritas Pelabuhan II di Tanjung Priok;
- 3) Otoritas Pelabuhan III di Tanjung Perak; dan
- 4) Otoritas Pelabuhan IV di Makassar.

Sebagai organisasi baru, Otoritas Pelabuhan tidak lepas dari tantangan yang ada dilapangan. Namun demikian, pembinaan dan peningkatan kapasitas para petugas Otoritas Pelabuhan terus dilakukan, bahkan melalui kerjasama dengan Negara lain seperti Jerman dan Singapura.□





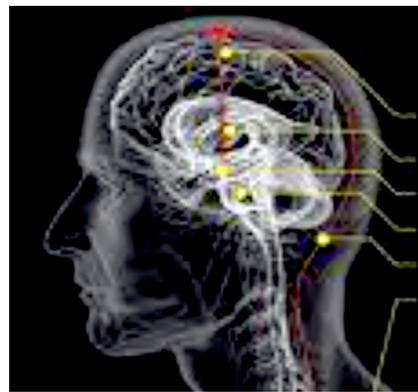
Benarkah Kucing Bernyawa Sembilan?

Benarkah kucing Bernyawa Sembilan ? - Entah sejarah atau mitos dari mana, kucing sejak dulu menjadi satwa paling terkenal dengan julukan benyawa sembilan. Benarkah? mari kita simak.

Mungkin kita pernah lihat kucing yang jatuh dari tempat tinggi membalik tubuhnya dan bisa mendarat dengan mulus tanpa cedera. Kenapa bisa? Apa kucing benar-benar mempunyai sembilan nyawa?

Hal ini terjadi karena kucing (dan beberapa satwa lain) memiliki sistem keseimbangan dan koordinasi yang luar biasa. Sistem inilah yang membuat kucing, ketika jatuh, akan menyadari dalam posisi apa dia jatuh. Kalo dia jatuh dalam posisi terbalik, dia akan segera memutar tubuh dan segera meregangkan kakinya sehingga angin menahan jatuh tubuhnya dan bersiap untuk mendarat. Saat bersentuhan dengan tanah, kakinya langsung ditekek supaya mengecilkan efek jatuhnya.

Nah rahasianya, kucing (dan beberapa satwa lainnya) memiliki apa yang disebut dengan terminal velocity, yaitu kecepatan jatuh maksimum yaitu 60 mil perjam. Saat kucing jatuh, kan sesuai hukum fisika, kecepatan jatuh si kucing makin bertambah. Ternyata, saat kecepatan jatuh kucing mencapai terminal velocity, di saat itulah kucing merasa paling rileks dan nyaman. Maka dia mulai meregangkan kakinya seperti bajing loncat untuk mengurangi efek jatuhnya. Nah itulah sebabnya makin tinggi dia jatuh, makin ada kesempatan untuk merasa rileks. Itu juga sebabnya kalo dijatuhin dari tempat yang rendah, kucing ga sempat ngerasa rileks. Makanya jatuhnya lebih berasa. [Sumber <http://anehdidunia.blogspot.com/2012/06/benarkah-kucing-bernyawa-9.html#ixzz22vd6luKu>]



Tidur dan Mimpi, Masih Misteri

Misteri Pada Manusia yang Belum Terpecahkan. Menurut laporan Life Science Amerika Serikat, bahwa sejumlah besar misteri yang sulit dipecahkan dalam tubuh manusia terhimpun di dalam otak besar. Otak besar merupakan organ yang paling membingungkan, diantaranya adalah tidur dan bermimpi masih merupakan misteri yang belum mampu dipecahkan manusia hingga saat ini.

Mimpi

Jika kita menanyakan soal yang sama pada 10 orang, apa yang menyebabkan kita bermimpi? Mungkin kita akan memperoleh 10 jawaban yang tidak sama. Ini dikarenakan misteri yang belum bisa dipecahkan ilmuwan saat ini. Teori pertama bahwa melalui rangsangan saraf informasi antar molekul otak besar menjalankan latihan terhadap otak besar selama mimpi berlangsung. Teori lainnya adalah orang-orang bermimpi akan tugas dan perasaan yang tidak sempat diperhatikan lagi, dalam proses demikian bisa membantu kita memperkuat ingatan dan pikiran. Umumnya, ilmuwan setuju dengan pengertian bahwa "mimpi bisa terjadi saat tidur sebentar".

Tidur

Dalam sepanjang hidupnya, manusia paling tidak menghabiskan seperempat waktunya untuk tidur. Tidur sangat vital bagi keberlangsungan hidup makhluk menyusui, termasuk manusia. Dua kondisi selama tidur berlangsung yakni masa tidur penuh (aktivitas bola mata melambat), saat demikian aktivitas metabolisme otak melambat, dan masa tidur sebentar (saat demikian bisa bermimpi), saat demikian aktivitas otak sangat dinamis. Menurut ilmuwan, tidur dalam masa sepenuhnya dapat membuat tubuh kita istirahat, menjaga stamina, seperti tidurnya binatang. Tidur dalam masa sebentar dapat membantu membentuk sesuatu yang diingat, namun, pengertian ini belum dibuktikan. [Sumber <http://anehdidunia.blogspot.com/2012/07/misteri-pada-manusia-yang-belum.html#ixzz22vfTWcjG>]



Salah Hitung... Kiamat' Bangsa Maya Bukan 2012

Tahun 2012 pernah jadi sangat penting dan membuat ketar-ketir gara-gara muncul film Hollywood bertema kiamat, '2012'. Film besutan sutradara Roland Emmerich itu memanfaatkan mitos akhir penanggalan Bangsa Maya, 21 Desember 2012, sebagai hari kehancuran dunia.

Saat ini, tahun 2012 kembali disebut-sebut gara-gara terbit buku berjudul "Calendars and Years II: Astronomy and Time in the Ancient and Medieval World" (Kalender dan Tahun II: Astronomi dan Waktu di Dunia Kuno dan Abad Pertengahan) terbitan tahun 2010.

Namun, jangankan soal kebenaran ramalan kiamat. Buku itu malah mengungkap perhitungan akhir kalender 'Long Count' Maya diduga kuat tidak akurat. Selisihnya bisa 50 sampai 60 tahun.

Bagaimana bisa?

Isu besarnya, saat meneliti kalender kuno, arkeolog berusaha mengkorelasikan frame waktu mereka dengan kalender modern (Gregorian). Misalnya, momentum-momentum penting Bangsa Maya seperti kelaparan perang, perayaan agama -- diterjemahkan dalam format hari/bulan/ tahun masa kini.

Para ahli Maya berusaha menemukan momentum penting yang bisa menghubungkan kalender 'Long Count' dengan Gregorian. Menurut Aldana, meski GMT menggunakan sumber bukti astronomi, arkeologi, sejarah untuk mengkorelasikan 'Long Count' dengan kalender modern, ada keraguan ketika bukti-bukti itu ditafsirkan dari artefak Maya kuno dan teks kolonial.

Dalam tulisannya, Aldana menyajikan beberapa alasan mengapa konstanta GMT tak bisa diandalkan. Dia bukan orang pertama yang meragukannya. Namun, penelitian lebih lanjut seperti penentuan waktu dengan radiokarbon perlu dilakukan untuk mendukung dalilnya.

Jadi, masih percaya kiamat bakal terjadi

2012? [Sumber: LiveScience, Discovery News/hs <http://www.beritamemarik.com/2010/10/salah-hitung-kiamat-bangsa-maya-bukan.html>]



Tikus Bantu Tentara Endus Ranjau

Pemerintah bersama ilmuwan Kolombia memutuskan menggunakan tikus sebagai hewan pendeteksi logam dan ranjau darat yang ditanam oleh para pemberontak Kelompok Bersenjata Revolusioner Kolombia (FARC). Para tikus itu dikembangkan dalam suatu tempat dan diberikan program pelatihan sejak 2006 untuk menemukan ranjau darat yang membunuh atau melukai ratusan orang setiap tahun.

Tikus dianggap lebih modern ketimbang anjing untuk mendeteksi ranjau darat, bahkan anjing dianggap lebih tradisional. Meski anjing memiliki indera penciuman yang tajam, tikus lebih ringan dan kemungkinan ranjau meledak sangat kecil. Tikus-tikus ini kemudian diajarkan mengenali perintah suara dan bau spesifik logam yang digunakan dalam ranjau darat, dan kemudian untuk bekerja dalam jumlah besar di area terbuka.

"Tikus ini akan sangat membantu, dan akan memberikan masukan yang bagus untuk mereka yang berusaha untuk mendeteksi ranjau," kata Pejabat Kepolisian Kolombia, Erick Guzman sebagaimana dilansir Reuters. "Kami berharap bahwa generasi ini akan siap pada awal tahun depan yang akan diuji dalam lingkungan yang nyata."

Statistik menunjukkan pada 2011 korban ranjau darat di Kolombia telah menewaskan 40 orang dan melukai 247 lainnya. Sementara sepanjang 2010 korban tewas mencapai 535 orang. [EH/Sumber: VIVAnews]



Letjen Moeldoko, MSi.

“Autopoiesis” Seorang Prajurit Sejati

// Merunut kembali jejak Letjen TNI Moeldoko, adalah membaca arus semangat yang tak ada henti dalam merajut sejarah pembebasan manusia. Dari jalinan pergumulan kisahnya, dimana ia harus pandai sembunyi dari kejaran masinis sepur ketika berangkat sekolah kala SMP sampai menjabat Wakil Gubernur di Lemhannas RI, juga selalu hadir rasa kepedulian. Semangat dan kepedulian ini terus berdetak berkelindan tak terpisahkan dengan jalan hidupnya sebagai upaya menjadi prajurit professional sekaligus intelektual publik hingga kini. //

Ia memang bukanlah siapa-siapa. Lahir dari rahim seorang ibu istri jogoboyo atau 'hansip' di sebuah dusun Kecamatan Purwoasri, Kediri, Jawa Timur, Moeldoko muda hanya berbekal semangat dalam meniti masa depannya. “Sepeda pun kami tak punya,” kisahnya ketika ditanya mengapa harus suka kucing-kucingan dengan masinis kereta

kampung. Alasannya, tuturnya lebih lanjut, karena jarak dari rumah ke sekolah ketika SMP di Kecamatan Papar hampir sepuluh kilometer.

Lepas sekolah menengah pertamanya, ia merantau ke kota santri yang melahirkan banyak tokoh Islam di negeri ini. Moeldoko rela menjadi anak kost yang seminggu sekali pulang mengambil

ransum bekal hidupnya selama menempuh pendidikan di SMA Negeri 2, Jombang. Berbekal senyum dan muka innocence, tak segan ia menyapa lebih dulu para kernet bus untuk sekedar menghindari dari tagihan karcis. Sebagai anak bungsu dari duabelas bersaudara, keterhimpitan inilah yang kemudian mampu berevolusi

dan menyeretnya menjadi manusia utuh secara fundamental untuk perbaikan masa depan hidupnya.

Merawat Kepedulian

“Saya harus melanjutkan sekolah yang tak mengeluarkan biaya,” suara hatinya berkata saat lulus sekolah menengah atas. Niat ini tak lepas dari kondisi kehidupan keluarga besarnya saat itu. Dan pilihannya adalah menjadi taruna di Akademi Militer. Pilihan ini didukung seringnya ia melihat sosok gagah seorang taruna Akmil yang datang mengunjungi pacar di desanya.

Tekad dan semangatnya untuk terus berkelit dari masa lampaunya serta keinginan untuk ‘menciptakan dirinya sendiri’ tak sia-sia. Menjadi lulusan terbaik dengan menyandang gelar Adhi Makayasa tahun 1981 tak membuatnya berhenti belajar. Di tingkatan pendidikan militer lanjutan, Sesko AD angkatan 1995, ia pun menyabet gelar lulusan terbaik. Saat mengikuti Sesko TNI tahun 2001, prestasinya tetap bersinar. Selanjutnya, ketika mengikuti Pendidikan Strategi Perang Semesta tahun 2007 dan Lemhannas 2008, prestasinya tetap moncer. Selalu menjadi yang terdepan. Selalu yang terbaik.

Menjadi pintar memang tak tiba-tiba. Selalu ada jejak prestasi sejak belia. Namun Moeldoko lain. Menurutnya, ia seorang murid yang biasa-biasa saja ketika di sekolah dasar sampai lanjutan atas. “Mungkin saat itu karena pikiran saya tak bisa fokus ke sekolah saja. Setiap pulang sekolah harus berpikir bagaimana bisa segera sampai rumah. Dan di setiap pagi saya juga harus berpikir bagaimana bisa sampai sekolah tidak telat,” kisahnya mengingat masa-masa sulit di kampung halaman.

Baginya, mengejar sebanyak mungkin ilmu pengetahuan adalah untuk merawat kepedulian bagi perbaikan hidup pribadi dan sebanyak mungkin manusia

yang bisa dijangkaunya. Untuk itulah ia rela menenggelamkan diri mengikuti pendidikan di luar dinas dengan memilih universitas terbuka untuk melengkapi jenjang sarjana. Sementara untuk S2 ia lanjutkan di Universitas Indonesia.

“Sebagai prajurit saya hanya ingin efektif memperjuangkan martabat bangsa dan negara dengan menopang diri melalui pengetahuan yang tangguh,” kata Letjen TNI Moeldoko yang kandidat doktor di kampus Yellow Jacket, Depok, serius. Menurutnya, melalui pendidikan formal yang baik, dengan kemampuan menghimpun dan mengembangkan pengetahuan secara sistematis dan metodik, menjadi sangat penting bagi dirinya untuk sanggup merumuskan dan mengatasi berbagai masalah dalam menjalankan tugas.

Pengetahuan yang tangguh, yang juga merupakan aset paling strategis baginya, tak lain adalah pengetahuan modern. Untuk itu, sebagai wujud rasa kepeduliannya, ia pernah mengajak para petani muda untuk berilmupengetahuan berbasis sains saat menjabat Pangdam Tanjungpura. Dimintanya kampus Universitas Tanjungpura dan Universitas Palangkaraya yang memiliki fakultas pertanian untuk membuka pintu. Dan diajaknya di masing-masing wilayah itu sekitar limaratusan petani untuk belajar secara cuma-cuma segala konsep, teori, metaphor, dan pandangan negara tentang ketahanan pangan dengan sederhana dan murah.

Kegiatan ini juga dilanjutkan di IPB saat tugasnya berpindah menjadi Pangdam Siliwangi. “Saya ajak para petani muda Jawa Barat untuk belajar secara informal di kampus pertanian paling bergengsi itu,” lanjutnya bersemangat tentang kepeduliannya di tempat lain. Sampai saat ini, kegiatan yang telah dimulai sejak dua tahun lalu hingga kini masih berjalan secara

berkala meski dirinya sudah tak bertugas lagi di bumi parahyangan.

Menurut Moeldoko, pengetahuan modern bagi para petani bisa dihimpun tanpa harus menuntaskan seluruh jenjang pendidikan formal. Dirinya berharap, dengan bertambahnya wawasan para petani dalam mengantisipasi iklim, kemajuan teknologi serta kehandalan dalam membuat program pemasaran, stigma petani hidup miskin bisa terhapus. “Dengan berkumpul menjadi satu entitas, mereka saya harapkan mampu memecahkan dan mempertegas semangat untuk saling menautkan masa depan dengan tindakan bersama dalam mengolah informasi dan pelampauan diri,” lanjutnya kemudian.

Contoh cara berpikir dan bekerja sistematis ini pernah pula dilakukan saat masyarakat di wilayah tugasnya mempertanyakan keberadaan pesantren Al Zaytun, di Kabupaten Indramayu. Untuk meredam ketegangan saat itu, dengan rileks Letjen TNI Moeldoko menghadapinya dengan mengunjungi langsung pondok pimpinan KH. Panji Gumilang. Esoknya, media cetak dan audio visualpun memuat berita dan foto-foto keakraban keduanya. “Kuncinya di komunikasi,” terang ahli soft power ini meyakinkan tentang cara bila wilayah yang menjadi tanggungjawabnya menghadapi ketegangan sosial.

Jauh sebelumnya, saat dirinya masih menjabat sebagai Komandan Korem di Bone, Sulawesi Selatan, pendekatan serupa juga pernah dilakukannya. Musibah longsor akibat datangnya air bah telah melantakkan Kecamatan Sinjai. Tak segan ia langsung memimpin evakuasi dan rehabilitasi masyarakat setempat dengan pasukan penuh sehari-hari. Hal ini dilakukan semata agar masyarakat segera bisa membentuk dan menata dirinya sendiri kembali. Dengan

demikian, 'semangat' dan 'hidup' masyarakat kembali hadir meski bencana banyak merenggut sanak keluarga dan lingkungan mereka.

Swacipta

Moeldoko memang bekerja seperti layaknya seseorang yang paham tentang sistem swacipta. Sebuah sistem dengan konsep yang sangat teknis serta banyak unsur deskriptif nan abstrak, dimana dialektika fundamental antara fungsi dan struktur melahirkan

apa yang oleh pakar biologi berkebangsaan Chile, Humberto Maturana dan Francisco Varela, disebut sebagai autopoiesis.

Secara sederhana, sistem ini diartikan sebagai sistem hidup yang sanggup menciptakan dan membentuk dirinya sendiri asalkan syarat-syaratnya terpenuhi. Ia bisa berupa sebuah sel, sebuah bakteri, sebuah komunitas, ataupun sebuah lembaga. Dan hal ini bisa dipinjam untuk mempertegas semangat dan kepedulian Letjen TNI

Moeldoko dalam mempengaruhi diri dan lingkungannya.

Pak Wagub, ia kini biasa disapa di lingkungan Lemhannas RI, terus bekerja dan menggebrak di bawah supervisi atasannya, Gubernur Prof. Budi Susilo Sorpanji. Bak sepasang pendekar sejati, kedua pimpinan yang sama-sama meraih prestasi tertinggi saat mengikuti pendidikan di Lemhannas ini terus berikhtiar menciptakan lembaganya menjadi institusi kelas dunia melalui proses besar autopoiesis. [eddy soepadmo]



LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

Mengucapkan

DIRGAHA YU



KEMERDEKAAN REPUBLIK INDONESIA



KEPALA STAF ANGKATAN LAUT BESERTA SEGENAP PRAJURIT TNI AL

Mengucapkan
Dirgahayu



**Modernisasi Alutsista adalah Kebutuhan Guna Mewujudkan
TNI AL yang Handal dan Disegani**

Kekerasan dan Nasionalisme

Oleh: Adrianus Meliala

Menggabungkan dua ide, yakni nasionalisme dan kekerasan, dalam satu pemikiran bukanlah perkara gampang. Ini mengingat kedua ide itu termasuk jarang atau bahkan tak pernah dipasangkan dalam satu pengertian. Bandingkan dengan “nasionalisme dan kepahlawanan” atau “nasionalisme dan penggunaan produksi dalam negeri”.

Terkait nasionalisme dan kekerasan, maka imajinasi kita bisa berkembang pada anggapan bahwa, katakanlah, nasionalisme ada hubungannya dengan kekerasan. Semakin tinggi nasionalisme, semakin tinggi kekerasan. Atau sebaliknya.

Ini bukan isapan jempol. Bukan tak jarang ada pihak-pihak yang mengasah nasionalisme warga negaranya dengan cara mendorong semangat chauvinistik, fasistik atau imperialistik. Ketiga semangat itu pada dasarnya memiliki kesamaan, yakni kemauan dan kesediaan mengagresi pihak lain. Selanjutnya, nasionalisme juga tak jarang diasah dengan menggelorakan semangat berperang, semangat menginvasi wilayah lain atau bahkan semangat membantai etnis lain. Pada titik ini, nasionalisme menjadi begitu mengerikan, sekurang-kurangnya bagi orang lain.

Itulah saat dimana kekerasan menghasilkan sesuatu yang paradoks dikaitkan dengan nasionalisme. Apabila nasionalisme dianggap sebagai sesuatu yang penting dan fungsional terkait upaya pemeliharaan ketahanan

bangsa, tidak demikian halnya dengan kekerasan. Secara umum, kekerasan dianggap sebagai yang mengganggu atau bahkan yang bisa melemahkan nasionalisme, sehingga perlu dijauhi atau dibuang.

Untuk itu, mari kita berpikir bahwa antara keduanya tidak ada hubungannya. Artinya, di satu sisi nasionalisme boleh tinggi atau rendah, di sisi lain kekerasan juga bisa berkembang secara berbeda.

Bisa terlihat oleh mata, tetapi bisa pula tidak kasat mata serta simbolik.

Situasinya dengan demikian mirip Indonesia sekarang. Contohnya anggota tim nasional sepakbola yang mengenakan lambang burung garuda. Apakah pemain yang seyogyanya memiliki nasionalisme tinggi itu lalu tidak bakal berkelahi di lapangan? Belum tentu. Beberapa kali Timnas terlibat juga dalam tawuran massal di lapangan.

Kita lihat contoh lain. Ada sinyalemen bahwa semangat nasionalisme anak muda Indonesia kini menipis, tergerus oleh budaya barat dan globalisasi. Indikasinya, menyanyikan lagu kebangsaan “Indonesia Raya” pun tak hafal.

Seiring dengan itu, anak muda dewasa ini makin cepat marah, brutal dan semakin gampang terlibat dalam tindak kekerasan.

Kita bisa merasa lega kalau memang benar bahwa tidak ada hubungan antara nasionalisme dan kekerasan. Tetapi kalau ternyata ada hubungannya?

Paradoks antara keduanya



adalah paradoks yang amat realistis untuk dihadapi. Kita tidak perlu malu melihat kenyataan bahwa, walau tidak berhubungan langsung, namun kerap kali keduanya, khususnya kekerasan, muncul secara eksplisit. Pejabat melakukan kekerasan, mahasiswa demikian pula, aparat keamanan pun juga. Pihak-pihak yang karena pendidikan dan pekerjaannya kita anggap sebagai orang-orang yang nasionalis, ternyata tidak ragu-ragu berbuat kekerasan. Hal mana, pada akhirnya membuat kita kaget dan terhenyak.

Selanjutnya, kita perlu bersama-sama mengupayakan agar kekerasan tidak muncul atau tidak dilakukan, terutama di kalangan mereka yang mengaku atau menyebut diri nasionalis.

Walaupun telah disebut bahwa keduanya tidak berhubungan atau berkaitan, tetapi secara etika dan tata-krama, rasanya tidak pantas apabila keduanya ditemui pada diri seseorang yang mengaku diri terhormat dan tokoh masyarakat.[]

Adrianus Meliala
Alumnus PPSA 17 Lemhannas RI.



Hanna Fransisca (Zhu Yong Xia)

Nasionalisme dan Kebebasan Berkarya

Jakarta, (Swantara) – Ditengah keramaian suasana, Zhu Yong Xia dengan panggilan akrab Hanna Fransiska, seniman multi talenta ini berusaha membuka kembali lembaran kenangan yang sudah sempat dipendam dan disimpan dalam ingatannya tentang semangat nasionalisme di kampung halamannya, Singkawang dari kaca mata sastra dan budaya.

“Mencermati hidup keseharian di kampung halaman saya, rasanya seperti dikembalikan pada kenangan masa kecil yang penuh lika-liku kisah. Yang pasti, seiring putaran waktu, semangat nasionalisme di kampung halaman saya semakin hari semakin menebal. Hal ini dapat dilihat dari keikutsertaan masyarakat dalam aktivitas politik, seperti dalam proses pemilihan pemimpin,” tutur Hanna.

Warga Singkawang, menurut Hanna, hidup berdampingan dengan harmonis, menjadi salah satu miniatur Indonesia. Cinta tanah air dan nasionalisme tergambar dari cara dan sikap hidup. Wihara, Klenteng, Gereja dan Mesjid tumbuh saling berdekatan, tanpa ada pemasalahan. Meskipun dentang lonceng dan kumandang adzan bergema, memadati ruang hampa kampung dan langit-

langitnya, masyarakat yang menganut agama dan kepercayaan yang berbeda saling menghormati.

Sebaliknya, Hanna menuturkan, saat masyarakat Tionghoa yang beragama Konghucu mengikuti prosesi peribadatan, seperti upacara kematian dengan tradisi melempar-lempar kertas yang diyakini sebagai bekal uang bagi simati dalam perjalanan ke surga (nirwana), dan memperdengarkan musik dengan keras, masyarakat pemeluk agama dan budaya lain menghormatinya dan tidak merasa terganggu.

Meskipun demikian kerukunan antarumat beragama dan lintas budaya tidak selalu berjalan mulus, pernah suatu ketika, ada sekelompok atau golongan tertentu yang ingin mencoba memecahbelah Indonesia dan merusak semangat nasionalisme.

“Isu yang mereka ambil cukup sensitif yakni mencoba merobohkan patung naga yang berdiri di jantung kota untuk menyulut emosi etnis Tionghoa pada masa itu. Ada upaya untuk merusak kerukunan umat beragama. Mereka berasumsi ini bukan negara Cina, padahal keberadaan patung naga tersebut berkaitan dengan kepercayaan dan budaya. Tidak hanya itu, setelah upaya untuk merobohkan Patung

Naga, juga pernah beberapa kali dilakukan perusakan dan pembakaran klenteng pasca perusakan patung naga,” ungkap Hanna yang pernah beberap kali meraih penghargaan kesusasteraan tersebut.

Hanna mengenang, pada era Orde Baru, masyarakat Singkawang yang mayoritas etnis Tionghoa, paling antipati dan masa bodo dengan yang namanya kegiatan politik, karena dianggap tidak ada manfaatnya bagi kehidupan mereka.

“Sikap semacam itu tentu tidak muncul begitu saja, tetapi akibat trauma masa lalu, tepatnya peristiwa politik pada 1965. Namun seiring perjalanan waktu, masyarakat Singkawang, sudah mulai berpartisipasi dalam kegiatan politik, bahkan ikut mencalonkan diri dalam pemilihan calon walikota Singkawang. Dalam pesta demokrasi tersebut ada tiga kandidat yang mewakili etnis Tionghoa. Hal ini menunjukkan, bahwa orang-orang Tionghoa Singkawang, telah benar-benar menjadi orang Indonesia, dan merasa bahwa dirinya harus terlibat secara aktif untuk membangun daerah serta bangsa yang lebih maju dan beradab,” jelas Hanna.

“Meski ada sejumlah warga berusia lanjut masih trauma dengan peristiwa G30S pada 1965, luka yang juga dialami oleh nenek dan ibuku. Pernah suatu ketika saya dimarahi oleh ibu karena menyebut nama orang nomor satu di Indonesia saat itu. Katanya, “Jangan menyebut sembarangan nama itu, tidak boleh. Awas kalau sekali lagi ibu dengar kamu menyebut nama itu,” ancam ibu. Padahal pada waktu itu kan saya sedang belajar dan menghafal PSPB. Meskipun kami dan masyarakat Tionghoa lainnya terluka, tapi kami tetapi tinggal di Indonesia dan mematuhi segala aturan dan hukum yang berlaku. Hal ini menunjukkan tentang cinta tanah air dan rasa nasionalisme. Meskipun demikian, yang pasti rasa nasionalisme masyarakat Singkawang tetap kuat dan tinggi,” demikianlah peristiwa masa lampau yang coba saya ingat dari tumpukan lembaran kenangan.” ungkap Hanna. (NS)

Kehilangan Identitas

Menyinggung semangat nasionalisme saat ini, Hanna menilai, dari sisi agama, budaya dan pendidikan tampak sudah mulai luntur. “Tolak ukurnya dapat diukur dari berabagai aspek, misalnya, muda-mudi sekarang sudah mulai kehilangan rasa bangga terhadap Indonesia. Mereka lebih senang berbahasa asing daripada berbahasa Indonesia, sehingga mereka tidak jarang mencampur adukkan bahasa Indonesia dengan bahasa Inggris. Contoh lain, generasi muda lebih senang menggunakan produk-produk asing ketimbang pruduk sendiri, baik pakaian, makanan juga musik. Dengan kata lain, kelunturan nasionalisme sangat tampak nyata di kalangan muda-mudi,” tutur Hanna.

“Lunturnya rasa nasionalisme ini juga diperparah

lagi dengan langkanya ketauladanan dari para pemimpin. Kita ingat, beberapa waktu yang lalu, di salah satu media elektronik, wakil rakyat kita berkelahi bak anak remaja yang sedang puber. Juga terjadi konflik-konflik antarumat beragama dan pelanggaran untuk beribadah di beberapa daerah. Maka jangan heran, jika hari ini banyak pelajar yang tawuran, lebih parahnya lagi pelajar tawuran dengan warga. Kita seperti tidak ingat bahwa Indonesia punya tiga konsep yang adiluhung, yaitu musyawarah, mufakat dan gotong royong. Artinya segala persoalan bisa diselesaikan dengan bijak, jika kita menempatkan ketiga konsep tadi pada setiap persoalan. Bukan malah mengedepankan kekerasan dan anarkisme,” tutur Hanna.

“Untuk itulah saya terus menulis, terus berkarya lewat sastra, sebagai usaha memperkokoh nasionalisme dari sisi budaya. Dengan menulis puisi, cerpen dan naskah drama saya memotret suasana dari kaca mata sastra. Di sanalah segala hal yang saya lihat dan rasakan bisa tertuang dengan bebas. Saya juga menulis puisi bernafaskan Tionghoa dan menulis puisi Tionghoa. Hal ini saya lakukan sebagai usaha untuk memperkenalkan budaya Tionghoa pada masyarakat luas, sekaligus menjelaskan bahwa di negara Indonesia ini, ada suku dan ada budaya Tionghoa. Beginilah budayanya,” ungkap Hanna, penyair yang kini telah menjadi ibu empat orang anak.

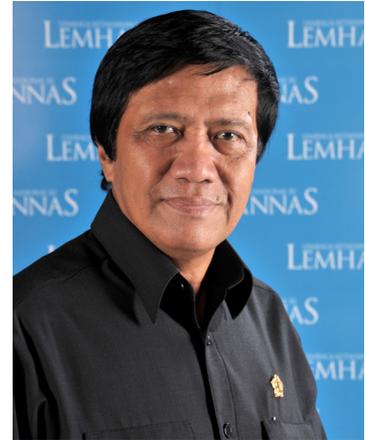
Hanna yang pernah meraih beberapa penghargaan bergengsi dari bidang kesusasteraan ini juga menawarkan solusi atas permasalahan yang terjadi. “Untuk individu, setiap kita masyarakat perlu meningkatkan ketakwaan terhadap Tuhan, agar tidak terbentuk sikap fanatik yang fatal. Sikap yang merugikan orang atau kelompok lain yang berbeda. Dengan kata lain, rasa cinta kasih harus terus ditingkatkan, hal ini dilakukan mengingat rasa toleransi di Indonesia yang mulai memudar. Tidak hanya itu, kita sebagai masyarakat juga harus pandai memilah dan memilih pemimpin yang baik dan benar. Masyarakat pemilih adalah masyarakat yang jeli memilih pemimpinnya,” jelas Hanna.

“Untuk mengerem laju penurunan rasa nasionalisme, pemerintah harus memiliki ketegasan, yakni ketegasan hukum dan aturan agar keduanya tidak diperjual belikan. Pemerintah juga harus meningkatkan perhatian pada daerah, jangan ada kesan terlalu abai sehingga tidak ada lagi daerah yang ingin memerdekakan diri. Yang pasti, rasa nasionalisme jangan hanya dibincangkan menjelang perayaan kemerdekaan (Agustusan), akan tetapi setiap waktu, setiap saat. Lagu-lagu yang menggugah rasa nasionalisme dan cinta tanah air harus terus diperdengarkan,” tegas Hanna Fransisca. [FE/NS]

Dr. Kausar, AS., M.Si.

Tenaga Profesional Bidang Kewaspadaan Nasional Lemhannas Rlrt

Kerjasama Pemerintah Pusat dan Daerah untuk Peningkatan Kesejahteraan



Jakarta, (Swantara) - Dr. Kausar, AS., M.Si., Tenaga Profesional Bidang Kewaspadaan Nasional Lemhannas RI yang juga menjadi alumni Kursus Singkat Angkatan Lemhannas RI VIII menyatakan keprihatinannya atas sikap pimpinan daerah yang lebih mengutamakan kepentingan kelompok, partai, dan golongan dalam mengelola kekayaan daerah.

“Rasa nasionalisme wajib dimiliki oleh siapapun di negara ini, terutama pimpinan daerah, karena dalam pembukaan UUD 1945 jelas tujuan pemerintah adalah untuk menyejahterakan rakyat, dan itu semua terkait dengan rasa nasionalisme kita sebagai bangsa yang besar,” kata Kausar.

Menurut dia, koordinasi dan kerjasama antara pemerintah pusat dan daerah sangat sangat penting untuk menjaga keutuhan semangat kebangsaan, sehingga sangat disayangkan, masih ada saja kelompok-kelompok yang mengutamakan kepentingan pribadi dan golongan ketimbang berusaha bersama-sama meningkatkan kesejahteraan masyarakat

“Oleh karena itu, pemerintah pusat dan daerah harus memiliki sistem yang terintegrasi dalam manajemen potensi negara yang begitu besar, yang terdiri dari 33 provinsi, 491 kabupaten kota, 6.500 kecamatan, 76.510 desa dan kelurahan. Negara ini harus memiliki manajemen yang ditujukan untuk kepentingan rakyat,” kata alumni Lemhannas RI yang juga membidangi masalah Otonomi Daerah dan Kewaspadaan Nasional tersebut.

Menurut dia, pemerintah harus menjaga kepentingan rakyat, karena kalau tidak ada rakyat, tidak ada negara. “Membangun nasionalisme adalah tugas pemerintah, yaitu dengan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, membangun rasa kebangsaan, dan meningkatkan kualitas pendidikan, kalau semua hal mendasar tersebut terbangun dan diterapkan sesuai dengan ideologi Pancasila, rasa nasionalisme masyarakat pasti terbangun,” kata Kausar.

Transparansi pengelolaan daerah dan pembangunan di daerah adalah hal yang mutlak

perlu diperhatikan oleh pemerintah pusat dan daerah, karena pengelolaan sumber daya alam di daerah harus ditujukan demi kesejahteraan dan kepentingan rakyat. “Pemerintah dan para pengelola sumber daya sebenarnya dapat menggunakan community development program. Namun kesejahteraan masyarakat sampai saat ini masih sering diabaikan oleh pemerintah walaupun biaya untuk birokrasi yang dihabiskan begitu besar,” Kausar menjelaskan.

Negara ini mempunyai sumber daya yang luar biasa, namun pengelolaan SDA bukanlah hal yang sederhana. How to manage it? Kausar mengatakan bahwa pemerintah perlu mengutamakan pembangunan kesejahteraan rakyat seperti yang tertera di Pembukaan UUD 1945, yakni negara bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, membangun rasa kenegaraan bagi semua.

“Jika masyarakat sejahtera dan semua aspek dasar masyarakat tercukupi, akan muncul wawasan kebangsaan, rakyat akan merasa memiliki negara ini,” tuturnya.

Untuk menjamin terwujudnya keadilan masyarakat terutama di daerah, pemerintah pusat dan daerah harus menaati prinsip concurrence yaitu kerjasama pengelolaan daerah secara bersama antar tingkatan dan susunan pemerintahan. Kerjasama tersebut terkait dengan 26 Urusan Wajib dan 8 Urusan Pilihan Pemerintah Daerah, yang intinya ditujukan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Urusan wajib yang diselenggarakan oleh pemerintahan daerah terkait dengan pelayanan dasar (basic services) bagi masyarakat, seperti pendidikan dasar, kesehatan, lingkungan hidup, perhubungan dan kependudukan.

Penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan dari pemerintah daerah didasarkan pada kriteria eksternalitas, akuntabilitas, dan efisiensi terutama untuk yang sifatnya pelayanan mendasar bagi masyarakat. Kalau urusan tersebut dilaksanakan dengan amanah, saya pikir rasa kebangsaan dan nasionalisme negara ini akan tetap terjaga,” kata Kausar.^[EN]



Retno Intani ZA
Alumnus PPSA XVII/2011

Nasionalisme Berbasis Pasar

Dalam era kekinian, membicarakan masalah nasionalisme rasanya hopeless. Mudah diucapkan susah diaplikasikan dan hanya dipandang sebelah mata oleh para pembuat kebijakan, pelaksana kebijakan atau bahkan kebanyakan masyarakat. Rasa nasionalisme hanyalah menjadi sebuah keprihatinan karena kekuatan kapital lebih mendominasi perhatian sehingga kehidupan publik sering dilihat hanya dari posisi warga masyarakat sebagai konsumen, baik dalam lingkup kekuasaan Negara, maupun dalam lingkup pasar.

Ashadi Siregar (2001) mengatakan, sebagai konsumen kekuasaan Negara, warga merespon kebijakan dan pelayanan Negara. Sementara sebagai konsumen pasar, dicerminkan dari nilai ekonomis warga bagi produsen. Setiap pergerakan warga dinilai dengan besaran nilai uang. Hal ini mengabaikan adanya ranah publik yang berorientasi pada kehidupan warga masyarakat yang sarat dengan interaksi kultural dan adanya diskusi-diskusi publik yang berdasarkan rasionalitas dan kecerdasan. Oleh karena itu untuk membangun nasionalisme diperlukan kerangka 'nation and state building' dan membangun 'civil society' (masyarakat madani) sehingga negara terus bisa menjadi fasilitator dan regulator bagi warga bangsanya sesuai kebutuhan jaman kekinian. Tetapi bagaimana?

Di era global sekarang ini, susah rasanya menghindari dominasi kekuasaan pasar tetapi bagaimanapun, civil society sebagai format baru kehidupan publik perlu diwujudkan. Format civil society akan menghargai kehidupan manusia, empati dan toleransi yang digerakkan atas dinamika kehidupan masyarakat. Sebenarnya, kalau merujuk pada kajian Ashadi Siregar, membangun civil society pada dasarnya adalah membalik arus utama yang tadinya dari kekuasaan Negara dan pasar ke warga, menjadi arus dari warga ke kekuasaan Negara dan pasar. Pergerakan

itu dapat dimulai dari ranah publik. Ranah yang bebas dari dominasi pasar dan kekuasaan Negara.

Ada baiknya kita belajar dari sejarah. Kita pernah mengalami dinamika kehidupan publik yang berbasiskan nilai kultural dan berorientasi pada kemanusiaan dari kehidupan warga masyarakat itu sendiri yang kemudian mendasari pergerakan arus kekuasaan Negara dan pasar. Gerakan masyarakat tanggal 28 Oktober 1928, para pemuda datang berbondong-bondong ke Jakarta dari seluruh pelosok Nusantara dengan menamakan dirinya jong Medan, jong Sumatera, jong Java, jong Sunda, jong Ambon, jong Papua, jong Manado, jong Kalimantan dan sebagainya. Pada hal kita tahu pada saat itu, komunikasi dan transportasi masih sangat sulit. Founding Fathers, dengan sangat cerdas dan cermat menyimpulkan bahwa tekad dan semangat para pemuda tersebut bersumber dari nilai-nilai luhur budaya bangsa yang tumbuh merata diseluruh nusantara dari Sabang sampai Merauke. Ini mencerminkan tekad dan semangat para pemuda yang digulirkan oleh Budi Utomo pada tanggal 20 Mei 1908. Tekad dan semangat itu kemudian mewujudkan karya agung sumpah pemuda yang menghasilkan deklarasi, satu tanah air, tanah air Indonesia, satu bangsa, bangsa Indonesia, dan satu bahasa, bahasa Indonesia. Ini dirumuskan oleh founding fathers dan diucapkan melalui pidato Bung Karno pada tanggal 01 Juni 1945, dengan apa yang kita kenal sekarang sebagai Pancasila (Soemarmo, 2012).

Jadi, dengan kata lain bila Pancasila diterapkan secara konkret, jelas akan membawa pergerakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara kita ke ruang publik atas dasar kultural itu. Masalahnya, sudahkan nilai kultural itu dimaknai oleh semua pihak?^[NS]

Alumni Kursus Singkat Khusus Angkatan Pertama

Syahrul Yasin Limpo
Gubernur Sulawesi Selatan

Bagi Syahrul Yasin Limpo, peningkatan kesejahteraan masyarakat adalah hal utama.

“Untuk membangun Indonesia ada tiga pilar utama yakni agama yang membentuk karakter bangsa, perekonomian yang membawa kesejahteraan masyarakat dan pendidikan yang memberikan kemampuan dasar untuk menjawab tantangan,” kata Limpo. Limpo memandang, dari tiga hal tersebut, pemerintah dapat memperbaiki dimensi kebutuhan dasar masyarakat, karena bila kebutuhan dasar terpenuhi, karakter masyarakat pasti lebih kuat, dan pemerintahan akan menjadi baik di mata masyarakat.

Limpo yang alumni Kursus Singkat Khusus Angkatan Pertama Lemhannas mengemukakan hal itu saat menjadi pembicara dalam Program Pendidikan Reguler Angkatan XLVIII di Lemhannas RI (25/7). Dalam kesempatan tersebut ia membahas keberhasilan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dalam program surplus pangan, khususnya beras, jagung, dan produksi sapi.

Daerah Sulawesi Selatan saat ini menempati posisi sebagai daerah strategis bagi Indonesia bagian Timur. Dengan nilai ekspor mencapai 138,65 juta USD pada Juni 2012, dengan tujuan negara ekspor ke Jepang, Amerika Serikat, Malaysia, China, dan Korea Selatan, dengan nilai ke lima negara tersebut mencapai 126,88 juta USD atau 91,51 persen dari total ekspor Sulawesi Selatan.

“Persoalan yang dihadapi saat ini adalah bagaimana menghadirkan pemerintahan yang makin capable dan proaktif mewujudkan kehidupan masyarakat yang



lebih baik. Para pimpinan daerah memiliki tanggung jawab yang besar dalam menciptakan kehidupan ekonomi dan pendidikan masyarakat,” kata Limpo.

Konflik di tengah masyarakat, menurut dia, umumnya terjadi akibat permasalahan ekonomi dan masalah linear, seperti kurangnya lapangan pekerjaan, atau terjadi distorsi kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah.

Aksi-aksi anarkis, kekerasan atau upaya disintegrasi oleh kelompok tertentu terjadi terutama karena rendahnya pemahaman agama, pendidikan, dan rendahnya tingkat ekonomi. “Kalau semua terjamin, akan tercipta pemerintahan yang kuat yang pada gilirannya juga mendorong terciptanya kehidupan nasional yang harmonis.”[EN/NS]

I Putu Sastra Wingarta, S.IP., M.Sc.
Tenaga Profesional Bidang Kewaspadaan
Nusantara Lemhannas RI

Bangsa Sebagai Rumah Tangga



Putu Sastra Wingarsa mengibaratkan bangsa sebagai sebuah rumah tangga.

“Kalau anggota keluarga sudah tidak merasa aman, sejahtera, dan saling membutuhkan lagi, maka kita perlu mempertanyakan, apakah keluarga tersebut dapat dipertahankan?” kata Putu Sastra Wingarsa mengawali pembicaraan dengan Redaksi Majalah Swantara.

Selanjutnya, pertanyaannya, apakah ‘Bangsa’ itu? Bangsa ini dibangun oleh para pendiri bangsa Indonesia, bahwa bangsa ini kalau mau dibentuk tidak perlu sama secara fisik, tapi visi, seperti yang pernah dikatakan oleh Ernest Renan. Kalau kita bicara nasionalisme, kita berbicara konsep bangsa, konsep nation. Putu Wingarsa memandang bahwa Indonesia pada awal didirikan bukan berasal dari suku yang sama, “Founding Fathers membangun Indonesia mereka berasal dari beragam suku, ada Jong Ambon, Jong Sumatera, Jong Java, mereka hendak membentuk satu bangsa, Bangsa Indonesia. Yang bisa menyatukan bangsa besar ini adalah tujuan untuk merdeka. lalu bagaimana saat ini, ketika Indonesia sudah merdeka dari penjajah?” kata Putu Wingarsa.

Bagi Putu Wingarsa, tujuan negara Indonesia adalah untuk menjadi bangsa yang merdeka seperti yang terdapat di pembukaan UUD 1945 dalam alinea pertama. Dari awal dalam pembukaan tersebut disebutkan, bahwa Indonesia adalah sebuah bangsa yang tidak harus selalu sama, sama satu suku, satu

agama, tapi yang penting adalah satu jiwa.

“Sekarang permasalahannya ibarat orang menikah, mampu atau tidak sebuah keluarga untuk tetap satu jiwa? Kondisi Indonesia saat ini patut diwaspadai, kita perlu mempertanyakan pada diri masing-masing, masih kah Indonesia satu jiwa? Masih kah satu arah? Saya hanya bisa berkomentar, kita perlu mewaspadai banyak indikator yang membuat bangsa ini merasa tidak satu jiwa lagi. Indikatornya adalah separatisme.

Separatisme terjadi karena adanya masalah keamanan, rendahnya kesejahteraan, dan tidak berfungsinya elemen-elemen negara. “Diantara kita sudah tidak merasa aman. Ibarat istri dan suami merasa tidak aman dalam rumah tangga tersebut. Masalah selanjutnya yaitu kesejahteraan, kesenjangan antara kaya dan miskin, antara yang bisa makan apa atau makan siapa? Kemudian, ketika masing-masing elemen tidak dapat melakukan fungsi dan tidak ada kerjasama lagi,” kata Putu Sastra Wingarsa. Meskipun demikian, Putu Sastra Wingarsa mengatakan, “Bicara nasionalisme bangsa Indonesia, baik secara bukti dan teori kita masih merasa satu jiwa, satu ikatan, yaitu ‘grand solidarity’, solidaritas besar. Hal ini selanjutnya dapat dilihat dari sikap masyarakat, yaitu ketika ada bangsa lain yang menghina bangsa kita, maka rakyat dan pemerintah siap mengganyangnya, namun tentu saja masalah keamanan dan kesejahteraan harus terus ditingkatkan,” ujar Putu Sastra Wingarsa. □



Gubernur Lemhannas RI Prof. Dr. Ir. Budi Susilo Soepandji, D.E.A. Tukar menukar Cendramata dengan Tamu CDSS Australia bertempat di ruang tamu pimpinan tanggal 5 Juni 2012.



Gubernur Lemhannas RI Prof. Dr. Ir. Budi Susilo Soepandji, D.E.A. Foto bersama dengan tamu Alzajair bertempat di Gd. Depan Lemhannas RI tanggal 16 Juli 2012.



Drs. Suladi, M.Pd. dari Badan Pengembangan Bahasa memberi ceramah kepada Peserta Pelatihan penulisan Buku dan Artikel bagi Tajar, Taji, Taprof, Pejabat Eselon II, III dan IV Lemhannas RI tanggal 17 Juli 2012 bertempat di Gd. Tri Gatra Lt. III Timur.



Sekretaris Utama Lemhannas RI Drs. Chandra Manan Mangan, M.Sc., didampingi Karo Humas Brigjen TNI Sahat Aritonang dan Narasumber Gatot Dewa Broto dari Kominfo RI membuka Sosialisasi PPID dan Keterbukaan Informasi Publik bertempat di Gd. Asta Gatra Lt. III Timur pada tanggal 31 Juli 2012.



Pejabat Lemhannas Eselon I, II, III, IV dan Staf Lemhannas RI sedang mengikuti Sosialisasi PPID dan Keterbukaan Informasi Publik bertempat di Gd. Asta Gatra Lt. III Timur pada tanggal 31 Juli 2012.



Gubernur Lemhannas RI Prof. Dr. Ir. Budi Susilo Soepandji, D.E.A. di wawancarai dengan Wartawan TVRI dalam rangka Kunjungan kerja Gubernur Lemhannas RI ke TVRI pada tanggal 6 Juni 2012 bertempat di ruang tamu Pimpinan Redaksi TVRI.



Gubernur Lemhannas RI Prof. Dr. Ir. Budi Susilo Soepandji, D.E.A memberi Cenderamata kepada Prof. Dr. KH. Ali Maschan Moesa, M.Si dalam rangkamemperingati Isra Mirad Nabi Muhamad SAW,pada tanggal 21 Juni 2012 bertempat di Gd. Dwi Warna Lt.I.



Gubernur Lemhannas RI Prof. Dr. Ir. Budi Susilo Soepandji, D.E.A memberi sambutan dalam rangka Welcome Party, Malam Perkenalan, International Night, PPRa XLVIII Lemhannas RI dengan Pejabat Lemhannas RI tanggal 25 Juni 2012 bertempat di Gd. Dwiwarna Lt. I.



Menteri Lingkungan Hidup Prof. Dr. Balthasan Kambuaya, MBA ceramah kepada Peserta PPRa XLVIII Lemhannas RI dengan materi "Kebijakan dan Strategi Lingkungan Hidup dalam rangka Pembangunan Nasional" bertempat di Gd. Panca Gatra Lt. III Timur tanggal 19 Juli 2012.



Closing Speech Gubernur Lemhannas RI Prof. Dr. Ir. Budi Susilo Soepandji, D.E., dengan Materi "Hubungan Islam dan Negara Pancasila di Era Reformasi : Suatu Tinjauan Kritis" disampaikan pada Islamic Banking and Finance Institute (IBFI) bekerjasama dengan The Ibrahim Hosen Institute (IHI) pada tanggal 26 Juni 2012 bertempat di Kuningan Jakarta.



Gubernur Lemhannas RI Prof. Dr. Ir. Budi Susilo Soepandji, D.E., didampingi Deputi Bidang Pendidikan Pimpinan Tingkat Lemhannas RI Marsekal Muda TNI Syahrul Ansory diterima oleh Guberur Jawa Timur Sukarwo dan Stafnya dalam rangka Kegiatan SSDN PPRa XLVII Lemhannas RI 2012 bertempat di ruang kerja Gubernur Jawa Timur tanggal 24 Juli 2012.



Talkshow Lemhannas RI dengan TVONE sebagai Narasumber Gubernur Lemhannas RI Prof. Dr. Ir. Budi Susilo Soepandji, D.E.A dan Nurhayati Asegap bertempat di Kuningan Jakarta pada tanggal 11 Juni 2012



Talkshow Lemhannas RI dengan TVRI sebagai Narasumber Gubernur Lemhannas RI Prof. Dr. Ir. Budi Susilo Soepandji, D.E.A , Rais Syuriah PB. NU K.H. Masdar Farid Mas'udi dan Dosen PascaSarjana UNJ Prof. Dr. Siti Musda Mulia, MA pada tanggal 15 Juni 2012 bertempat di TVRI Jakarta.



Wakapolda Metro Jaya Brigjen Suhardi Alius menanda tangani Surat resmi penyerahan Peserta Outward Bound PPSA XVIII Lemhannas RI tahun 2012 kepada Wakil Gubernur Lemhannas RI Letjen TNI Moeldoko, S.I.P., bertempat di Lapangan tengah Lemhannas RI pada tanggal 16 Juni 2012.



Gubernur Lemhannas RI Prof. Dr. Ir. Budi Susilo Soepandji, D.E.A menanda tangani Surat resmi penyerahan Peserta Outward Bound Peserta PPSA XLVIII Lemhannas RI kepada Wakapolda Metro Jaya Brigjen Suhardi Alius pada tanggal 8 Juni 2012 bertempat di Gd. Panca Gatra Lt.III Barat.



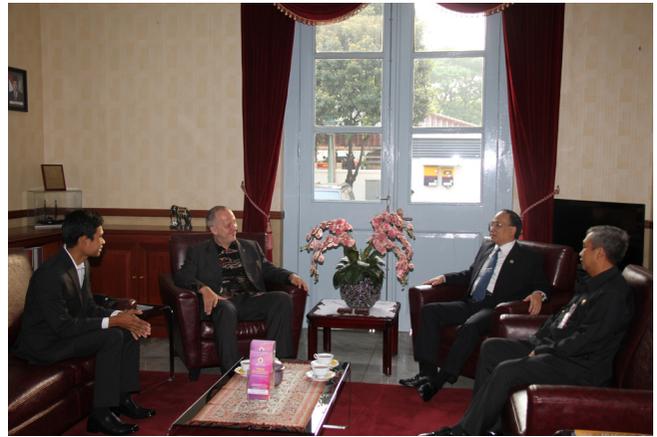
Gubernur Lemhannas RI Prof. Dr. Ir. Budi Susilo Soepandji, D.E.A menerima hasil Pemeriksaan laporan keuangan Lemhannas RI Tahun 2011 dari Ketua BPK RI Drs. Hadi Poernomo, AK bertempat di ruang Sidang Besar Lt.IX Gd. Umar Wirahadi Kusuma BPK RI Jl. Gatot Subroto No.31 Jakpus.



Gubernur Lemhannas RI Prof. Dr. Ir. Budi Susilo Soepandji, D.E., didampingi Deputi Bidang Pendidikan Pimpinan Tingkat Lemhannas RI Marsekal Muda TNI Syahrul Ansory diterima Wagub Lampung M.S. Joko Umar Said dan Stafnya dalam rangka Kegiatan SSDN PPRA XLVII Lemhannas RI 2012 bertempat di ruang tamu Wakil Gubernur Lampung tanggal 23 Juli 2012.



Gubernur Lemhannas RI Prof. Dr. Ir. Budi Susilo Soepandji, D.E.A didampingi Wakil Gubernur Lemhannas RI Letjen TNI Moeldoko, S.I.P., dan Para Pejabat Lemhannas RI menerima Paparan tentang Pengamanan Sistem Data dan Informasi dari Biro Telematika tanggal 19 Juni 2012 bertempat di Gd. Asta Gatra Lt. VI ruang TOT.



Gubernur Lemhannas RI Prof. Dr. Ir. Budi Susilo Soepandji, D.E.A didampingi Deputi Bidang Pendidikan Pimpinan Tingkat Nasional Lemhannas RI Marsekal Muda TNI Syahrul Ansory menerima Kedubes Jerman Prof. DR. Christoph Behrens di ruang tamu Pimpinan dalam rangka ceramah kepada Peserta PPRa XLVII, PPRa XLVIII dan PPSA XVIII Lemhannas RI tanggal 21 Juni 2012.



Wakil Gubernur Lemhannas RI Letjen TNI Moeldoko, S.I.P., menyematkan tanda Jabatan kepada Kepala Biro Kerjasama Settama Lemhannas Kolonel (Laut) Sulistiyanto M.Sc pada acara Pelantikan Pejabat Eselon II dan III Lemhannas RI pada tanggal 4 Juli 2012 bertempat di Gd.Tri Gatra Lt.I ruang Nusantara.



Dialog Kebangsaan kerjasama Lemhannas RI dan Lembaga Peyiaran Publik Radio Republik Indonesia dengan Materi "Menciptakan Kedamaian dan Keamanan di Bumi Cendrawasi : Papua dan Papua Barat" tanggal 26 Juni 2012 bertempat di Studio Jusuf Ronodiputro LPP RRI Jakarta Pusat.



Wakil Gubernur Lemhannas RI Letjen TNI Moeldoko, S.I.P., memberi ceramah kepada Peserta Pemantapan Nilai - Nilai kebangsaan Bagi BP MIGAS, Kontraktor, Kontrak Kerjasama, dan Pemangku Kepentingan Angkatan V Tahun 2012 Lemhannas dengan materi "Indonesia Di Abad Asia" bertempat di Gd. Tri Gatra Lt. III Timur tanggal 25 Juni 2012.



Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral RI Rudi Rubiandini R. S. memberi ceramah kepada Peserta Pemantapan Nilai - Nilai kebangsaan BP MIGAS, Kontraktor, Kontrak Kerjasama, dan Pemangku Kepentingan Angkatan V Tahun 2012 Lemhannas bertempat di Gd. Tri Gatra Lt. III Timur tanggal 28 Juni 2012.



Gubernur Lemhannas RI Prof. Dr. Ir. Budi Susilo Soepandji, D.E.A, Halal Bihalal 1433 H dengan Pejabat Lemhannas RI dan Staf Lemhannas RI bertempat di Lapangan Tengah Lemhannas RI tanggal 27 Agustus 2012.



Pengibaran Bendera Merah Putih dalam rangka Upacara 17 Agustus 2012 bertempat dilapangan Tengah Lemhannas RI.



Drg. Sri Wahyuni Pujiastuti, M.M menandatangani Surat resmi sebagai Ketua KORPRI Lemhannas RI Periode 2012 – 2017 di hadapan Gubernur Lemhannas RI Prof. Dr. Ir. Budi Susilo Soepandji, D.E.A, dalam rangka Pelantikan pengurus KORPRI Lemhannas RI yang baru tanggal 14 Agustus 2012 bertempat di Lobi Nusantara Gd. Tri Gatra Lt. I.



Sambutan Gubernur Lemhannas RI Prof. Dr. Ir. Budi Susilo Soepandji, D.E.A, dalam rangka Buka Puasa bersama Peringatan Nuzul Qur'an 1433 H Alumni IKAL dan Staf Lemhannas RI dengan materi "Jadikan Puasa Ramadhan dan Peringatan Nuzul Qur'an 1433H, Sebagai Spirit untuk Meningkatkan Intergritas dan Pengabdian pada Bangsa dan Negara" tanggal 14 Agustus 2012 tempat Gd. Dwiwarna Lt. I.



Dr. Ir. Budi Susilo Soepandji, D.E.A, Peserta (PPRA) XLVIII Lemhannas RI Prof. Riri Fitri Sari dan Kepala Sekretariat Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat (P4B) Dance Yulian Flassy dalam acara Rumah Publik dengan Tema "Nasionalisme dan Keutuhan NKRI" bertempat Studio 6 LPP TVRI, Senayan tanggal 10 Agustus 2012.



Talkshow TVONE dengan Cimsa Lemhannas RI sebagai Narasumber Gubernur Lemhannas RI Prof. Dr. Ir. Budi Susilo Soepandji, D.E.A, dan Kriminolog Universitas Indonesia Andrianus Meliala Alumni PPSA XVII bertempat di Kuningan Jakarta pada tanggal 27 Agustus 2012.

Lemhannas RI

Pacu Reformasi Birokrasi di Semua Lini



Reformasi birokrasi pada hakikatnya merupakan upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan, ketatalaksanaan dan sumber daya manusia aparatur.

Dengan semangat birokrasi, saat ini berbagai upaya perbaikan dan peningkatan tengah dilakukan Lemhannas RI dalam berbagai lini seiring dengan perubahan visi Lemhannas RI untuk menjadi lembaga yang bisa berkiprah di tingkat yang lebih luas dan mendapatkan pengakuan yang tidak hanya pada tingkat nasional, tapi juga pada tingkat ASEAN pada tahun 2015, Asia Pasifik pada tahun 2020, dan dunia pada tahun 2025.

Pada dasarnya, reformasi birokrasi telah dimulai Lemhannas sejak tahun 2006. Berbagai langkah guna mewujudkan birokrasi yang bersih dan profesional (good governance) telah dilakukan. Saat ini telah disiapkan Perubahan peraturan perundangan, antara lain perubahan peraturan presiden tentang Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia, termasuk perubahan Peraturan Gubernur tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lemhannas RI.

Lemhannas RI melakukan validasi organisasi dengan merevisi Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2006 tentang Lembaga Ketahanan Nasional Republik

Indonesia, dan ini sudah harus diimplementasikan tahun depan. Dalam bidang SDM dilaksanakan penataan dan pembenahan pegawai dengan pendekatan zero growth dan right sizing guna terwujudnya susunan struktural pegawai yang lebih ramping, efektif dan efektif. Assessment dan psikotes juga diselenggarakan guna memilih SDM yang profesional dan kompetitif sesuai tuntutan kebutuhan lembaga.

Selain itu, masih dalam upaya meningkatkan kualitas SDM, para personel Lemhannas diikutsertakan dalam berbagai program pendidikan pelatihan dan pelatihan berbasis beasiswa dari berbagai lembaga. Sedangkan para Tenaga Ahli Pengajar, Tenaga Ahli Pengkaji dan Tenaga Profesional akan dikirimkan ke berbagai lembaga pendidikan dan juga pertemuan ilmiah di luar negeri. Untuk lebih meningkatkan capacity building, para pakar dari luar negeri juga akan didatangkan ke Lemhannas RI.

Disamping upaya di atas, perbaikan juga dilakukan pada kurikulum dan silabus pendidikan di Lemhannas. Perubahan paradigma yang semula "kursus" pun turut dirubah menjadi "pendidikan".

Guna mewujudkan birokrasi yang bersih, akuntabel dan profesional, para pimpinan, pejabat serta seluruh pegawai Lemhannas RI telah menandatangani Pakta Integritas. Hal ini merupakan bentuk implementasi dari Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 49 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Pakta Integritas di lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah. Penandatanganan komitmen tersebut diharapkan akan menjadi permulaan yang baik untuk ke depannya demi terciptanya keterbukaan, kejujuran serta memperlancar pelaksanaan tugas yang berkualitas, efektif, efisien dan akuntabel sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing di Lemhannas RI.

Lemhannas RI akan melaksanakan Penilaian Mandiri (Self-Assessment) secara online yang diluncurkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi pada 20 Juni 2012. Dengan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) ini, maka pengambilan keputusan, pelayanan dan keterbukaan informasi publik, akuntabilitas dan transparansi, serta perbaikan berkelanjutan, semuanya

akan bersifat web-based, real time dan paperless sehingga sistem pelaporan dapat berjalan dengan baik tanpa menimbulkan kerepotan. Hasil dari PMPRB ini nantinya selain akan bermanfaat bagi Lemhannas RI, juga bermanfaat bagi Kementerian PAN dan RB dalam memantau kemajuan reformasi birokrasi nasional.

Penerapan e-government di lingkungan Lemhannas RI telah dan akan terus dikembangkan antara lain melalui e-Learning, e-Evaluation, e-Library, e-Simpeg dengan Finger Print System, e-Office, e-Board, e-Kurtannas dan e-Procurement. Khusus untuk e-Procurement, untuk saat ini, Lemhannas baru menerapkan sistem semi e-procurement. Namun untuk ke depannya, sistem ini akan terus ditingkatkan dan dikembangkan sehingga menjadi full e-Procurement system di mana proses pengadaan akan dilakukan setransparan mungkin sehingga mengunci rapat peluang terjadinya penyelewengan anggaran di bidang pengadaan barang/jasa.

Lemhannas saat ini juga tengah menyusun pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagai tindak lanjut dari UU Nomor satu4 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Undang-Undang ini mewajibkan setiap badan publik pemerintah atau badan publik non Pemerintah yang mendapat bantuan APBN/APBD untuk melayani penyediaan seluruh informasi yang dikelolanya kecuali informasi yang bersifat rahasia menurut Undang-Undang. PPID ini nantinya akan bertugas mengumpulkan, mengelola, menyediakan dan memublikasikan informasi publik dalam kerangka pelayanan publik yang cepat, jujur dan terbuka.

Dalam hal ketatalaksanaan, Lemhannas RI sudah melaksanakan ISO 9001:2008 yang merupakan standar internasional yang mengatur tentang sistem manajemen mutu (quality management system) yang dikeluarkan oleh International Organization for Standardization yang bemarkas di Jenewa – Swiss. Diharapkan penerapan ISO 9001:2008 ini akan semakin mempermudah pengendalian berbagai aktivitas serta peningkatan kemampuan untuk peningkatan kinerja secara berkelanjutan dan efisien.

Mengingat pentingnya wawasan kebangsaan terkait ketangguhan ketahanan nasional yang merupakan tugas dan fungsi Lemhannas, maka selain melaksanakan program-program percepatan reformasi birokrasi yang dicanangkan oleh Kementerian PAN dan RB, Lemhannas RI juga memiliki tiga langkah strategis untuk lebih memacu percepatan reformasi birokrasi, yaitu melalui peningkatan kegiatan training

of trainers (ToT) wawasan kebangsaan ke seluruh wilayah Indonesia, pelaksanaan sosialisasi wawasan kebangsaan melalui roadshow dan talkshow serta penyelenggaraan workshop yang direncanakan dalam bidang peningkatan nilai tawar Lemhannas RI, budaya kerja dan perencanaan program anggaran.

Sebagai bukti dari keseriusan dan integritas Lemhannas RI dalam menerapkan program pemerintah, Lemhannas RI telah berhasil menjadi institusi penerima tunjangan kinerja yang saat ini masih dalam proses realisasi. Pada tahun 2011, tercatat ada 20 kementerian/ lembaga yang melakukan reformasi birokrasi, salah satunya adalah Lemhannas RI. Ke-20 kementerian/ lembaga tersebut telah disahkan persetujuannya oleh Komisi Pengarah pada 19 Januari 2012, namun baru 16 yang remunerasinya mendapat persetujuan DPR, yang salah satunya adalah Lemhannas RI.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Azwar Abubakar menyampaikan bahwa ada tiga tahapan penerapan kebijakan remunerasi, pertama, tahapan dimulainya reformasi birokrasi, dimana kementerian/ lembaga akan mendapatkan remunerasi 40 persen. Kedua, pelaksanaan reformasi birokrasi yang sudah berjalan maka remunerasinya 70 persen. Ketiga, reformasi birokrasi sudah berjalan baik sesuai aturan yang ditetapkan maka kementerian/ lembaga tersebut akan berhak mendapatkan remunerasi 100 persen.

Selain dari keberhasilan untuk menjadi institusi penerima tunjangan kinerja, bukti keberhasilan lainnya adalah dengan diraihinya Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK lima kali berturut-turut untuk laporan keuangannya sejak tahun 2007 hingga 2011, serta penghematan yang telah dilakukannya melalui efisiensi penggunaan fasilitas lembaga dan lain-lain.

Dengan segala upaya perubahan di berbagai lini tersebut, Lemhannas RI, sebagai lembaga think-tank pemerintah telah menunjukkan kesiapannya untuk menjadi role model reformasi birokrasi nasional.

Akhirnya, kesadaran segenap pegawai Lemhannas RI dituntut untuk dapat mendukung penerapan program reformasi birokrasi dengan sebaik-baiknya sehingga dapat terbangun birokrasi yang bersih, efisien, efektif, produktif, transparan dan akuntabel, dan kesiapan SDM meningkat dalam menjawab tantangan tugas yang semakin kompleks ke depannya dalam mewujudkan amanat Presiden Susilo Bambang Yudhoyono agar Lemhannas menjadi world-class institute.^[NS]



Supriyatno

Bekerja Dengan Setia dan Penuh Tanggungjawab

Siang itu, matahari berdiri tepat di puncak kepala, langit semakin memanas, sementara Supriyatno (51 tahun) baru saja menyalakan kembali sepeda motornya untuk menjelajah sebagian dari wilayah Jakarta. Pria kelahiran 24 Oktober 1961 ini bekerja sebagai Caraka Lemhannas (kurir pengantar surat). Sebelum menjadi Caraka, pria yang berkulit coklat dan badan yang mulai mengempis ini, sempat menjadi supir di Lemhannas, yaitu mulai 3 Maret 1986 sampai dengan 2003. Nah, mulai sejak itulah Supri menjadi Caraka Lemhannas RI sampai dengan sekarang.

Setiap harinya Supriyatno atau yang akrab dipanggil dengan

sebutan Supri, mengantarkan surat dinas, surat undangan kegiatan Lemhannas ke wilayah Timur dan Selatan Jakarta. Dalam menjalankan tugas-tugasnya, Supri dibekali motor dinas dan bahan bakar sebanyak 100 liter (Rp.870.00/ liter pertamax) setiap bulannya.

Sama seperti staf atau pegawai Lemhannas lainnya, Supri bekerja setiap hari Senin sampai dengan Jumat. Namun waktu kerja Supri sedikit berbeda dengan staf dan pegawai pada umumnya. Supri memiliki waktu kerja mulai pukul 09.00-17.00 dalam waktu normal. Akan tetapi, jika ada surat yang harus diantara segera, tak jarang Supri menghantarnya pada hari

libur, seperti hari Sabtu dan Minggu, meski sudah larut malam, Supri juga tak jarang menghantarkan surat-suratnya. Hal tersebut dilakukan agar surat-suratnya tidak terlambat sampai pada alamat yang dituju. Karena Supri berprinsip, bahwa semua surat yang dihantarnya adalah penting dan segera.

Setiap harinya, bapak tiga orang anak ini berangkat dari rumah kontrakannya pukul 08.00 dan sampai di kantor pukul 09.00 pagi. Sesampainya di kantor, Supri dan para Caraka lainnya tidak langsung bekerja menghantar surat, melainkan berlatih untuk menggunakan komputer. Meskipun dalam proses latihan tersebut,

para Caraka ini tidak didampingi oleh tenaga pengajar, namun Supri dan para Caraka lainnya, mengaku cukup puas karena sudah bisa menggunakan komputer, meski hanya menghidupkan, mematikan dan sekedar mengetik.

Barulah, ketika jarum jam menunjuk pukul 12.00 dan 13.00 wib, barulah Supri dan para Caraka lainnya mulai berjalan menghantarkan setumpuk surat-suratnya. Setiap harinya, Supri mengaku menghantarkan sebanyak 10 sampai dengan 15 surat. Dalam proses pengantaran Supri mengaku memiliki pengalaman unik, menarik dan pedih.

Salah satu pengalaman yang masih belum lekang dari ingatannya adalah ketika dirinya menghantarkan surat ke Triloka, Komplek Angkatan Udara yang terdapat di daerah Pancoran. "Kejadiannya pada 2008 silam, waktu itu sekitar pukul 14.00 siang, Supri meluncur dari daerah Pejambon. Tiba-tiba ada orang yang mengejar saya, dan mengabarkan bahwa box surat saya terbuka dan surat-suratnya terjatuh. Saya langsung kaget, berhenti dan memeriksa box surat kembali. Ternyata, box surat itu tidak terkunci dengan rapat dan rapih. Saya kemudian memutar balik motor dan menyusuri kembali jalan yang sempat saya lalui. Ternyata tidak ada surat yang jatuh, hanya amplop yang berisi uang terimakasih yang diberikan pada saya ketika menghantar surat. Kalau tidak salah, uang tersebut



berkisar Rp. 20.000-50.000, yang tadinya hendak saya gunakan untuk berbuka puasa. Begitulah yang namanya kalau rezeki belum berpihak, satu sisi saya apes, sisi lain saya ceroboh," ungkap Supri sambil mengenang kejadian tersebut.

Kejadian unik dan sial lain yang pernah saya alami adalah ketika menghantar surat ke jalan Rajawali, Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur, 2005 silam. "Waktu itu rumah tampak sepi. Berkali-kali saya teriakkan, tak seorang pun yang menjawab. Akhirnya, untuk mengejar waktu, karena ada beberapa surat lagi yang harus saya sampaikan. Saya pun beranian diri untuk masuk ke pekarangan rumah tersebut. Tak lama setelah saya masuk, seekor anjing besar dan galak sudah siap mengejar. Saya pun langsung lari terbirit-birit. Setelah

memastikan kondisi aman, saya pun kembali ke rumah tersebut dan memberikan surat pada pembantu rumah tangganya," kenang Supri.

"Apapun pekerjaannya, yang penting dijalankan dengan setia dan penuh tanggungjawab. karena, besar atau kecil pekerjaan yang kita lakukan semuanya memiliki tanggungjawabnya masing-masing. Alhamdulillah, dengan gaji yang saya dapatkan dari Lemhannas, paling tidak saya bisa menyekolahkan anak saya sampai tingkat SMA. Kalau masalah kerusakan kendaraan di jalan, saya sih sudah biasa mengalaminya. Seperti ban motor bocor, rantai putus dan berbagai macam kerusakan kecil lainnya. Kalau kerusakan

seperti itu, biasanya saya dulu yang bayar, setelah itu baru dibayari kantor, tentunya dengan segala kwitansi dan keterangan pendukung lainnya," ungkap Supri.

Untuk Lemhannas sebagai sebuah lembaga negara dan sebagai lembaga tempat Supri bekerja, ia berharap bisa lebih baik, berkembang dan maju dalam segala bidang. "Selain itu, bagi para pemimpin dan petinggi lembaga ini, saya juga berharap agar kesejahteraan para pegawai, seperti kami-kami ini yang menjadi kurir atau supir juga ditingkatkan sedikit demi sedikit. Terkait perayaan Agustusan, saya berharap bangsa Indonesia bisa terbebas dari korupsi dan segala kerusuhan seperti yang terjadi beberapa waktu terakhir ini di negara kita," harap Supri.^[A8]

Sajak-sajak Karin Juliadika

Diantara Sabang dan Merauke

Diantara sabang dan merauke
Aku masih tegak berdiri mengukuhkan diri
Melihat negeri dengan segala kepercayaan hati
Tentang esok yang lebih jernih

Diantara sabang dan marauke
Kibar merah putih menyalak bagai api
Membakar seluruh emosi
Meski masa depan masih menjadi rahasia

Diantara sabang dan merauke
Indonesia adalah nafasku
Padanya aku mengabdikan
Untuk cinta dan perjuangan
Yang tak pernah mati

Rumah pertiwi, 2012

Catatan Harian Tentang Mimpi

Di tebing malam yang runcing
Tiba-tiba pikiranku dirasuki keresahan
Tentang rumah yang tak lagi bertanah
Tentang ikan yang tak lagi punya sungai
Karna airnya habis dihisap kekuasaan yang rakus

Aku berdebat dengan pikiran sendiri
Aku bersembunyi di balik batu waktu
Tapi musim selalu menampilkan wajahku
pada kenyataan yang tak menentu
Kenyataan yang terkadang meniadakanku
Dalam hidup dan kehidupan

Sampai tima di puncak sunyi
Doaku menggema dan berkata
Mimpi tak sekedar bunga lelap
Berjaga dan siagalah selalu
Sebab sekarang dan esok
Adalah siasat yang harus dimainkan
Dengan segala keikhlasan

Rumah pertiwi, 2012

Sepotong Bayang-bayang Tentang Indonesia

Di suatu senja yang rapuh
Matahari pulang ke sarang
Mengemas cahayanya sendiri
Sedang awan berarak menuju bulan
Menembus sunyi, menjelma malam

Di sana aku melihat sepotong bayang-bayang
Wajahnya basah, bibirnya berembun
Dengan segala ketekunan jiwa
Bayang-bayang itu mengeja indonesia
Sambil berharap tak jadi air mata

Rumah pertiwi, 2012

Semangat Yang Menyala

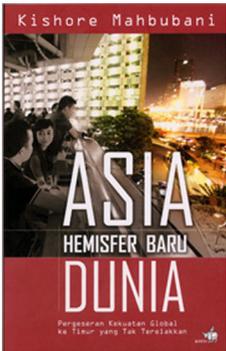
Dulu usia tersurat di moncong senjata
Masa depan hanyalah cerita masa belia
Karna harapan hanyalah milik orang-orang merdeka
Ini kali, tumpah darah, tangis perih
Telah redah
Semangat kembali menyala-nyala
Menyulut rasa yang dulu pernah beku

Dari rahim ibu pertiwi aku lahir dan tumbuh
Menjadi aku, kau dan kita
Menjadi satu dalam kekuatan luka
Meninju musuh yang memburu
Meraih senyum kesempurnaan
Dari pekik kemerdekaan yang tak pernah padam

Dulu aku, kau dan kita berdarah
Dulu aku, kau dan kita tak searah
Sekarang jalanmu dan tujuku
Menjadi kita yang rumah
Satu dalam teduh keabadian

Bumi pertiwi, 2012

Karin Juliadika, lahir di Klaten-Jawa Tengah, pada 18 Juli 1988. Jatuh cinta pada sastra sejak kekanak. Kini tinggal di Jakarta, aktif di komunitas Kembang Malam.



Asia Hemisfer Baru Dunia

Dalam buku *Asia Hemisfer Baru Dunia: Pergeseran Kekuatan Global ke Timur yang Tak Terelakkan*, tesis Kishore Mahbubani adalah jika Asia mampu maju ke panggung utama, maka akan baik untuk kemaslahatan dunia. Bagi orang 'Barat', buku ini nampak akan memprovokasi bila mereka masih sulit melepaskan diri dari peta mental warisan masa lalu. Menurutnya, Asia telah mengalami kemajuan yang cukup bagus untuk melepaskan diri dari kemiskinannya dan gelombangnya bahkan telah jauh melampaui nilai material.

Dimulai dari Restorasi Meiji tahun 1860-an (hal 62), Kishore berpendapat bahwa Asia mengikuti Jepang dalam mengadopsi 7 (tujuh) pilar yang menjadi dasar mengapa Barat mengalami kemajuan. Tujuh pilar tersebut adalah : 1. Ekonomi Pasar Bebas (dengan mengharapkan mazab Adam Smith bisa dijalankan Asia di masa depan); 2. Sains dan Teknologi (mengutip PM Rajiv Gandhi: lebih baik menjadi penyalur otak-otak cemerlang daripada otak-otak itu hanya tinggal di saluran); 3. Meritokrasi (tren memberikan kesempatan yang sama di tengah hambatan tradisional); 4. Pragmatisme (kutipan Deng tentang yang penting tikus bisa menangkap mangsa); 5. Budaya Perdamaian (sesuatu yang sulit dipercaya oleh Barat); 6. Supremasi Hukum (sesuatu yang masih jauh dari target yang dicapai sampai saat ini); serta 7. Pendidikan.

Buku berlatar merah bata ini menggambarkan Asia yang telah berhasil mengadopsi nilai-nilai Barat melalui kata kunci *March to Modernity* atau bergerak menuju modernitas. Negara China dan India digambarkan peranannya sangat penting dalam percaturan global, baik politik maupun ekonomi. Bahkan di bidang geopolitik, Mahbubani memberi contoh bagaimana China sanggup menggandeng negara di kawasan untuk tumbuh bersama. Ironinya, justru Barat kini mulai merasa terancam dan gamang dengan nilai-nilai yang mereka agung-agungkan selama berabad-abad lamanya.

Tak banyak buku sebetulnya yang telah dihasilkan Kishore Mahbubani, seorang dosen dan Profesor Praktik Kebijakan Publik pada Kebijakan Publik Lee Kuan Yew School, Universitas Nasional Singapura. Tapi buku-buku yang ditulismya telah membuatnya keliling duniadanmenawarkangagasanbetapa kekuatan global dunia akan kembali sesuai dengan "jalurnya". Buku pertamanya, *Can Asians Think?*, bermaksud melecut kesadaran bangsa-bangsa Asia untuk berfikir meraih masa depannya. Sementara *The New Asian Hemisphere* ingin mengatakan kepada dunia, bahwa era baru sejarah dunia akan segera dimasuki.

Sampaisaatini, bukuintelahditerjemahkandalamdua belas edisi bahasa yang berbeda yakni Bahasa Arab, China (sederhana dan tradisional), Belanda, Inggris, Perancis, Jerman, Italia, Jepang, Korea, Vietnam, dan Indonesia. Buku ini positif diterima di sebagian besar kawasan Asia, bahkan para intelektual Asia menyebutnya sebagai buku utama Asia, dan digunakan sebagai buku teks di berbagai universitas Amerika terkemuka, termasuk Harvard University.

Namun buku inibukannyatanpacela. Formulasi pragmatis yang dipahami Mahbubani lumayanserampangan karena teks ini seharusnya tak boleh dibaca 'bolehmelanggarapasajatermasuk HAM serta eksploitasi besar-besaran kelas pekerja. Selainitu, Asia bukanlah entitas tunggal. Budaya China sungguhmemilikiperbedaan yang seriusdenganbudayaIndia, Singapura, Filipina bahkan Indonesia.

Atas timbulnya berbagai kritikan ini, Mahbubani mengaku bahwa sebagian kalangan di Barat memang telah mengecam bukunya sebagai karya yang menyebarkan sentimen anti-Barat. Dan ini membuktikan bahwa pendapat Mahbubani tentang bagaimana Barat tidak mau diusik kemapanannya sebagai kekuatan dominan di dunia sejak Perang Dunia II terbenarkan.

Kegiatan Penting Lemhannas RI Agustus – Oktober 2012

Agustus 2012

6 s/d 10 Agustus 2012

Studi Strategis Dalam Negeri (SSDN) untuk peserta pendidikan PPSA XVIII.

7 Agustus 2012

Focus Group Discussion (FGD) Kajian Berlanjut “Meningkatkan Produktifitas guna Mewujudkan Ketahanan Pangan dalam rangka Ketahanan Nasional” oleh Direktorat Pengkajian Ekonomi.

14 Agustus 2012

Focus Group Discussion “Pengelolaan Sumber Daya Air guna Mendukung Pembagunan Nasional dalam rangka Ketahanan Nasional” oleh Direktorat Pengkajian Sosial Budaya.

Agustus s/d November

Direktorat Pengkajian Sosial Budaya melaksanakan Kajian Aktual “Pengelolaan Sumber Daya Air guna Mendukung Pembagunan Nasional dalam rangka Ketahanan Nasional”.

September 2012

3 s/d 6 September 2012

Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan bagi BP Migas angkatan VI .

3 s/d 7 September 2012

Deputi Bidang Pendidikan melaksanakan Studi Strategis Luar Negeri untuk peserta PPRA XLVII.

12 s/d 13 September 2012

Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan bagi Pengusaha Seluruh Indonesia.

10 s/d 14 September 2012

Studi Strategis Dalam Negeri untuk peserta PPRA XLVIII.

17 s/d 23 September 2012

Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan bagi Ketua DPRD seluruh Indonesia.

17 s/d 23 September 2012

Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan bagi Dosen Seluruh Indonesia.

17 s/d 21 September 2012

Studi Strategis Luar Negeri untuk peserta PPSA XVIII.

25 September 2012

Roundtable Discussion “Pengelolaan Sumber Daya Air guna Mendukung Pembagunan Nasional dalam rangka Ketahanan Nasional” oleh Direktorat Pengkajian Sosial Budaya.

Oktober 2012

8 Oktober 2012

Seminar untuk PPRA XLVII

18 Oktober 2012

Penutupan kegiatan pendidikan PPRA XLVII.

16 Oktober 2012

Seminar untuk PPSA XVIII.

25 Oktober 2012

Penutupan kegiatan PPSA XVIII.

29 Oktober s/d 2 November

Studi Strategis Luar Negeri untuk peserta PPRA XLVIII.

BHIRAWA



ANORAGA



**PANGDAM V/BRAWIJAYA BESERTA STAF
DAN SELURUH PRAJURIT KODAM V/BRAWIJAYA**

Mengucapkan :

**DIRGAHAYU
Lemhannas RI Ke-47**

BHIRAWA ANORAGA

